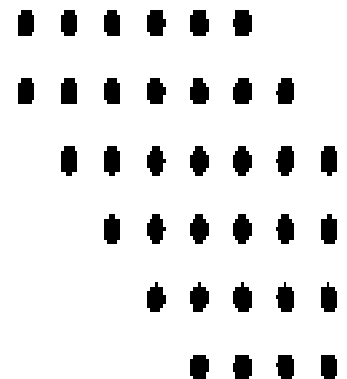




Pemerintah Kabupaten Solok

Rencana Strategis

Dinas Pertanian



2025-2029

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT dan atas rahmat dan karunia-Nya, maka Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian Kabupaten Solok Tahun 2025-2029 dapat diselesaikan. Substansi Renstra Dinas Pertanian Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Solok Tahun 2025-2029, dimana dimuat Visi, Misi dan program prioritas Bupati dan Wakil Bupati Solok dalam kurun waktu lima tahun ke depan.

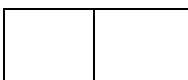
Penyusunan Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Solok Tahun 2025-2029 didasarkan kepada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008.

Tujuan penyusunan Renstra Dinas Pertanian adalah untuk memberikan arah bagi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan pertanian Kabupaten Solok seutuhnya selama lima tahun ke depan dan menyelaraskan kondisi daerah, permasalahan pembangunan, isu strategis, program strategis, kerangka pendanaan, indikator kinerja, dan gambaran pengelolaan keuangan daerah. Dokumen Rencana Strategis Kabupaten Solok Tahun 2025-2029 merupakan pedoman dalam pembuatan Rencana Kerja SKPD Dinas Pertanian Kabupaten Solok dalam merencanakan Program Prioritas dan Kegiatan-kegiatan setiap tahunnya yang menyentuh kebutuhan masyarakat Kabupaten Solok, khususnya masyarakat petani dalam meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat melalui pemberdayaan dan pemanfaatan potensi daerah.

Harapan kami dalam mengemban amanah sebagai Kepala Dinas Pertanian adalah mengajak semua pemangku kepentingan secara bersama-sama berbuat untuk membenahi dan mensejahterakan masyarakat Kabupaten Solok.

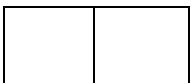
Arosuka, 19 Desember 2025
Kepala Dinas Pertanian

Deslirizaldi, SP, MP
Pembina /IVa
NIP. 19691216 199903 1 004



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	6
1.3. Maksud dan Tujuan	7
1.3.1. Maksud	7
1.3.2. Tujuan	7
1.4 Sistematika Penulisan	7
II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PERTANIAN	9
2.1 Gambaran Pelayanan Dinas Pertanian	9
2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Dinas Pertanian	9
2.1.2. Sumber Daya Dinas Pertanian	15
2.1.3. Kinerja Penyelenggaraan Dinas Pertanian	21
2.1.4. Kelompok Sasaran Pelayanan Dinas Pertanian	26
2.1.5. Mitra Dinas Pertanian dalam Pemberian Layanan	27
2.1.6. Kerja Sama Daerah yang Menjadi Tanggung Jawab Dinas Pertanian	28
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Pertanian	28
III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN	48
3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Pertanian 2025-2029	50
3.1.1. Tujuan dan Sasaran	50
3.1.2. Penahapan Renstra	54
3.2 Strategi dan Arah Kebijakan	55
3.2.1. Arah Kebijakan Pembangunan Berdimensi Kewilayahan	59
3.2.2. Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Solok dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029	60
IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	63
4.1 Program, Kegiatan dan Subkegiatan Dinas Pertanian	63
4.2 Daftar Sub Kegiatan Prioritas	181
4.3 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan	193
4.3.1. Indikator Kinerja Utama	193
4.3.2. Indikator Kinerja Daerah	195
4.3.3. Indikator Kinerja Kunci	196
V. PENUTUP	199
5.1. Kesimpulan	199
5.2. Kaidah Pelaksanaan	199
5.3. Pengendalian dan Evaluasi	200
	iii



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jumlah ASN Dinas Pertanian Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2025	15
Tabel 2.2	Data ASN Lingkup Dinas Pertanian Kabupaten Solok Berdasarkan Golongan dan Status Kepegawaian Tahun 2025 ..	17
Tabel 2.3	ASN Dinas Pertanian Kabupaten Solok berdasarkan Latar Belakang Pendidikan Tahun 2025	18
Tabel 2.4	Data Asset/Modal Bangunan, Lahan/Tanah dan Peralatan Dinas Pertanian Kabupaten Solok Tahun 2024 yang baik	19
Tabel 2.5	Rekapitulasi Sumber Daya Dinas Pertanian Tahun 2025	20
Tabel 2.6	Perkembangan Indikator Urusan Pertanian Kabupaten Solok Tahun 2020-2024	23
Tabel 2.7	Perkembangan Indikator Kinerja Kunci Dinas Pertanian tahun 2020-2024	26
Tabel 2.8	Rumusan Masalah Pokok, masalah dan Akar Masalah	29
Tabel 2.9.	Tekhnik Merumuskan Isu Strategis Dinas Pertanian	46
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Solok	53
Tabel 3.2	Penahapan Renstra Dinas Pertanian	54
Tabel 3.3	Arah kebijakan Renstra	56
Tabel 3.4.	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan	58
Tabel 4.1	Program Dinas Pertanian kabupaten Solok	71
Tabel 4.2.	Teknik Mesumuslan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Solok	74
Tabel 4.3.	Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan	117
Tabel 4.4	Daftar Sub kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	181
Tabel 4.5	Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanian Tahun 2025-2030	194
Tabel 4.6	Indikator Kinerja Daerah Pemerintah Kabupaten Solok tahun 2025-2030	195
Tabel 4.7	Indikator Kinerja Kunci Dinas Pertanian tahun 2025-2030	196



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Tahapan Penyusunan Renstra PD.....	2
Gambar 1.2	Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan	5
Gambar 2.1	Struktur Organisasi Dinas Pertanian Kabupaten Solok Berdasarkan Perbup No.68 Tahun 2020	11
Gambar 2.2	Komposisi ASN Dinas Pertanian Berdasarkan Jenis kelamin .	16
Gambar 2.3	Komposisi ASN Dinas Pertanian Berdasarkan Golongan	17
Gambar 2.4	Komposisi ASN Dinas Pertanian Berdasarkan Pendidikan	19
Gambar 2.5	Ratio PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Kabupaten Solok tahun 2020-2024	21
Gambar 3.1	Konsep Renstra Perangkat Daerah	51
Gambar 3.2	Kerangka Ketidakterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra Perangkat Daerah	52
Gambar 3.3	Tiga Kawasan Utama Kabupaten Solok	59
Gambar 4.1.	Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/subkegiatan rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian	64



PERATURAN BUPATI SOLOK
NOMOR 18 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH TAHUN
2025-2029

RENCANA STRATEGIS DINAS PERTANIAN TAHUN 2025-2029

BAB I
PENDAHULUAN

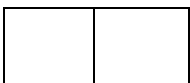
1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus memiliki Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra PD disusun untuk mewujudkan capaian visi dan misi Kepala Daerah serta tujuan setiap organisasi pemerintahan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing OPD.

Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra-OPD) adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun untuk menjamin adanya konsistensi perencanaan dan pemilihan program dan kegiatan prioritas sesuai dengan kebutuhan masyarakat, menjamin komitmen terhadap kesepakatan program dan kegiatan yang di bahas secara partisipatif dengan melibatkan semua stakeholders pembangunan dan masyarakat Kabupaten Solok, memperkuat landasan penentuan program dan kegiatan tahunan daerah secara kronologis, sistematis dan berkelanjutan

Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merupakan dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki nilai strategis dan penting, diantaranya:

1. Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen yang menjadi pedoman OPD selama 5 (lima) tahun, sebagai penjabaran dari RPJMD.
2. Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen yang akan menjadi pedoman dalam penyusunan rencana kerja tahunan (Renja) OPD.
3. Rencana Strategis (Renstra) merupakan alat atau instrumen pengendalian bagi Satuan Pengawas Internal (SPI) OPD dan Bappeda agar pelaksanaan pembangunan jangka menengah dan tahunan daerah, mengarah pada pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran sesuai RPJMD .
4. Rencana Strategis (Renstra) menjadi alat atau instrumen mengukur tingkat pencapaian kinerja kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), mempertanggungjawabkan

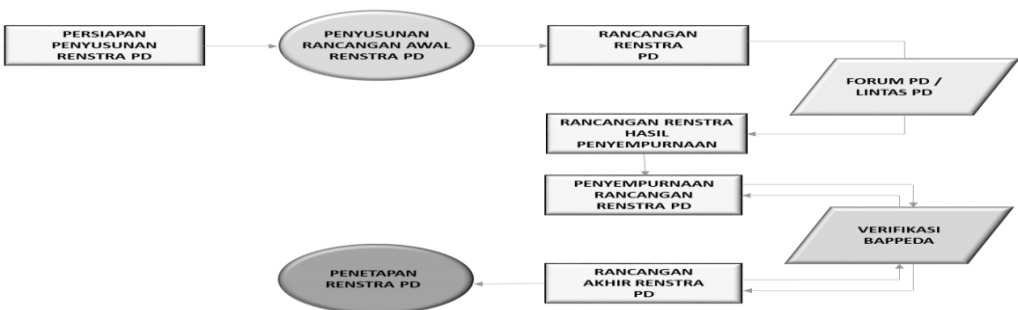


pelaksanaan program dan kegiatan baik jangka menengah maupun tahunan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi OPD.

Fungsi dan manfaat dari perencanaan pembangunan (renstra) adalah sebagai alat koordinasi seluruh stakeholders, sebagai penuntun arah, minimalisasi ketidakpastian, minimalisasi inefisiensi sumberdaya, penetapan standar dan pengawasan.

Rencana Strategis Dinas Pertanian disusun mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang paling sedikit memuat informasi analisis gambaran umum kondisi daerah, perumusan gambaran keuangan daerah, perumusan permasalahan pembangunan daerah, penelaahan dokumen perencanaan lainnya dan perumusan isu strategis. Secara garis besar proses penyusunan Rencana Strategis Dinas Pertanian dapat dilihat pada gambar 1.1.

Gambar 1.1
Tahapan Penyusunan Renstra-PD



Sumber: Permendagri No 86 Tahun 2017

Secara rinci tahapan penyusunan Rencana Strategis Dinas Pertanian Tahun 2025-2029 dapat dijelaskan sebagai berikut:

A. Tahap Persiapan

Kegiatan yang harus dilakukan pada tahap persiapan adalah :

- 1) Pembentukan Tim Penyusunan
Tim penyusun Renstra Strategis ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Solok
- 2) Orientasi
Orientasi Rencana Strategis Dinas Pertanian dilakukan bersama Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Pertanian. Orientasi bertujuan untuk penyamaan persepsi dan teknis penyusunan dokumen Rencana Strategis Dinas Pertanian.
- 3) Penyusunan Agenda Kerja Tim
Rencana kerja Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Pertanian disusun kedalam agenda kerja yang dijadikan sebagai panduan kerja mulai dari tahapan persiapan sampai nantinya ditetapkan.
- 4) Penyiapan data dan informasi
Pengumpulan data dan informasi dilakukan dengan langkah-langkah, sebagai berikut:



- ✓ Menyusun daftar data/informasi dalam bentuk matrik (*check list*) untuk memudahkan analisis;
- ✓ Mengumpulkan data/informasi yang akurat dari sumber-sumber yang dapat dipertanggungjawabkan; dan
- ✓ Menyiapkan tabel-tabel/matrik kompilasi data yang sesuai dengan kebutuhan analisis.

B. Tahap Penyusunan Rancangan Awal

Penyusunan rancangan awal Rencana Strategis Dinas Pertanian dilakukan melalui Pengolahan data dan informasi, Penelaahan dokumen perencanaan lainnya , Analisis gambaran pelayanan Dinas Pertanian, Analisis permasalahan, Perumusan isu-isu strategis, Perumusan tujuan pelayanan jangka menengah, Perumusan sasaran pelayanan jangka menengah, Perumusan strategi dan arah kebijakan dan Perumusan program dan kegiatan/sub kegiatan yang mendukung arah kebijakan Rencana Strategis Dinas Pertanian

C. Tahap Penyusunan Rancangan Akhir

Penyusunan rancangan akhir Rencana Strategis Dinas Pertanian merupakan penyempurnaan atas rancangan awal Rencana Strategis Dinas Pertanian yang berpedoman pada RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan Berita acara forum perangkat daerah. Penyempurnaan rancangan awal renstra perangkat daerah dilengkapi dengan perbaikan atau masukan yang telah dituangkan dalam Berita Acara Forum Perangkat Daerah rancangan awal Renstra.

D. Tahap Penetapan

Setelah rancangan akhir selesai, dokumen Renstra Perangkat Daerah selanjutnya disampaikan kepada Bidang Mitra Dinas Pertanian terkait untuk diverifikasi dan memperoleh pengesahan Kepala Daerah.

Renstra Perangkat Daerah memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat strategis. Begitupun dengan Renstra Rencana Strategis Dinas Pertanian Tahun 2025-2029 mempunyai fungsi strategis sebagai berikut :

1. Sebagai panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian dalam jangka 5 (lima) tahun ke depan pada masa kepemimpinan Kepala Daerah;
2. Menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Pertanian;
3. Instrumen pengendalian dan evaluasi kinerja Dinas Pertanian agar pelaksanaan pembangunan jangka menengah dan tahunan mengarah pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang tertuang dalam RPJMD;
4. Kontrak kinerja Kepala Dinas Pertanian dengan Kepala Daerah; dan
5. Landasan terwujudnya fungsi penunjang perencanaan sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah untuk melaksanakan pasal 155 Peraturan Pemerintah Nomor: 58 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dinas Pertanian Kabupaten Solok sebagai penanggung jawab program dan kegiatan



pembangunan pertanian perlu melakukan penyusunan rencana strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) 2025-2029 sebagai dokumen rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) atau perencanaan yang berjangka waktu 5 (lima) tahun.

Renstra Dinas Pertanian disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas serta berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Solok dan bersifat indikatif. Penyusunan Renstra ini terdiri dari tahapan sebagai berikut: persiapan penyusunan Renstra OPD, penyusunan rancangan Renstra OPD, penyusunan rancangan akhir Renstra OPD dan penetapan Renstra OPD.

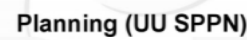
Keterkaitan antara Renstra Dinas Pertanian dengan RPJMD Kabupaten Solok tergambar dari arah kebijakan RPJMD Kabupaten Solok yang dituangkan melalui program dan kegiatan Dinas Pertanian dalam jangka waktu 5 tahun kedepan (2025-2029). Program dan kegiatan ini kemudian dijabarkan ke dalam rencana kerja (Renja) tahunan Dinas Pertanian setiap tahunnya. Dengan demikian penyusunan Renstra ditujukan untuk menjawab sasaran dan tujuan RPJMD melalui pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana dijabarkan pada Rencana Kerja Dinas Pertanian.

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, ruang lingkup perencanaan pembangunan nasional dan dokumen perencanaan terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Strategis Kementerian / Lembaga, Rencana Kerja Kementerian / Lembaga dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Sejalan dengan payung hukum perencanaan ditingkat pusat, maka dokumen perencanaan daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD), dan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja-OPD) serta Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Renstra Dinas Pertanian Tahun 2025-2029 disusun dengan mempedomani dokumen-dokumen perencanaan lainnya, baik ditingkat nasional, provinsi maupun kabupaten/kota. Keterkaitan antar dokumen perencanaan tersebut akan mendukung tercapainya tujuan pembangunan dari pusat sampai daerah. Adapun keterkaitan antar dokumen perencanaan dapat dilihat pada gambar 1.2.



Gambar 1.2.



Budgeting (UU Keu)

Hubungan Dokumen Rencana Kerja OPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya.

1. Keterkaitan Renstra Dinas Pertanian dengan RPJMD Kabupaten Solok
Renstra Dinas Pertanian merupakan penjabaran teknis RPJMD yang disusun oleh Dinas Pertanian dibawah koordinasi Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan (Bapelitbang) Kabupaten Solok. Tujuan, strategi dan kebijakan dalam Renstra Dinas Pertanian dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran program yang ditetapkan dalam RPJMD yang sejalan dengan visi Bupati dan Wakil Bupati dalam RPJMD.
2. Keterkaitan Renstra Dinas Pertanian dengan Renstra K/L
Penyusunan Renstra Dinas Pertanian Tahun 2025-2029 juga diselaraskan dengan Renstra Kementerian Pertanian Tahun 2025-2029. Keterbatasan anggaran yang tersedia di daerah, menuntut kita untuk bisa menelaah dan mengkaji program/kegiatan yang tertuang pada Renstra K/L. Hal ini bertujuan untuk mensinkronkan kegiatan yang bisa dibiayai dengan dana APBN untuk pelaksanaan program dan kegiatan di daerah.
3. Keterkaitan Renstra OPD dengan Provinsi/Kabupaten/Kota
Sama halnya dengan Renstra K/L, penyusunan Renstra Dinas Pertanian juga diselaraskan dengan Renstra Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 dan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat tahun 2025-2029. Hal ini juga dimaksudkan untuk melihat program/kegiatan yang bisa dibiayai dengan dana APBD Tingkat Propinsi.

Renstra sebagai dokumen perencanaan lima tahunan akan *dibreakdown* menjadi dokumen perencanaan tahunan yang disebut Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD).

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Landasan hukum penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah mengacu pada beberapa produk perundang-undangan sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- d. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- k. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
- l. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;



- o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- p. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Solok Tahun 2012-2031;
- q. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045; dan
- r. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pertanian Tahun 2025-2029 dimaksudkan untuk memberikan arahan dan pedoman bagi aparatur Dinas Pertanian dalam melakukan kegiatan pembangunan daerah.

1.3.2. Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari misi Kepala daerah terpilih untuk mendukung sasaran daerah yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Solok tahun 2025-2029, selain itu Renstra juga memiliki tujuan antara lain:

1. Merumuskan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Dinas Pertanian sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta selaras dengan RPJMD Tahun 2025-2029;
2. Menyediakan tolak ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah untuk kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah;
3. Memberikan pedoman dalam menyusun Renja Dinas Pertanian yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan dalam kurun waktu lima tahun

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian Tahun 2025-2029 terdiri dari (delapan) Bab meliputi :

BAB I PENDAHULUAN

Mengemukakan secara ringkas tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, Maksud dan tujuan, dan Sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PERTANIAN

1. Memuat informasi tentang tugas, fungsi, dan struktur perangkat daerah, sumber daya perangkat daerah mencakup sumber daya manusia, asset/modal, kinerja pelayanan perangkat daerah berdasarkan sasaran/target Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah periode sebelumnya, informasi tentang



- tantangan dan peluang pengembangan pelayanan perangkat daerah.
2. Memuat tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah, telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, dan telaahan Rencana Strategis (Renstra) K/L dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis serta penentuan isu-isu strategis perangkat daerah yang akan mempengaruhi kinerja pembangunan untuk masa 5 (lima) tahun mendatang.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Memuat tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan jangka menengah perangkat daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif indikator kinerja perangkat daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai perangkat daerah dalam masa pelaksanaan Renstra sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD 2025-2029.

BAB V PENUTUP

Memuat kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintah daerah.



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PERTANIAN

2.1. Gambaran Pelayanan Dinas Pertanian

2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pertanian

Tugas pokok Dinas Pertanian yang dibentuk berdasarkan Perda No. 8 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah adalah *“Melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Pertanian sesuai dengan kewenangannya”*

Untuk terselenggaranya tugas pokok di atas, maka Dinas Pertanian mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pertanian;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pertanian;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pertanian,;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

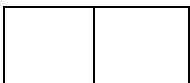
Struktur organisasi Dinas Pertanian berdasarkan Peraturan Bupati Solok Nomor 68 Tahun 2020 terdiri Satu Kepala, Satu Sekretariat, 6 Bidang, 3 Sub Bagian, Kelompok Jabatan Fungsional, dan 18 Seksi dan Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor 800/3548/OTDA tanggal 27 Mei 2022 dengan uraian sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat
 1. Subag Umum dan Kepegawaian
 2. Perencana Muda
 3. Analisis Keuangan Pusat dan daerah Ahli Muda
3. Bidang Prasarana dan Sarana
 1. Analis Prasarana dan Sarana Pertanian Ahli Muda
 2. Analis Prasarana dan Sarana Pertanian Ahli Muda
 3. Analis Prasarana dan Sarana Pertanian Ahli Muda
4. Bidang Tanaman Pangan
 1. Pengawas Mutu hasil pertanian Ahli Muda
 2. Pengawas Benih Tanaman ahli Muda
 3. Pengawas Mutu hasil pertanian Ahli Muda
5. Bidang Hortikultura
 1. Pengawas Mutu hasil pertanian Ahli Muda
 2. Pengawas Benih Tanaman ahli Muda
 3. Pengawas Mutu hasil pertanian Ahli Muda
6. Bidang Perkebunan
 1. Pengawas Mutu hasil pertanian Ahli Muda
 2. Pengawas Benih Tanaman ahli Muda
 3. Pengawas Mutu hasil pertanian Ahli Muda
7. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan
 1. Pengawas Bibit Ternak Ahli Muda
 2. Medik Veteriner Ahli Muda
 3. Medik Veteriner Ahli Muda
8. Bidang Penyuluhan
 1. Penyuluh Ahli Muda

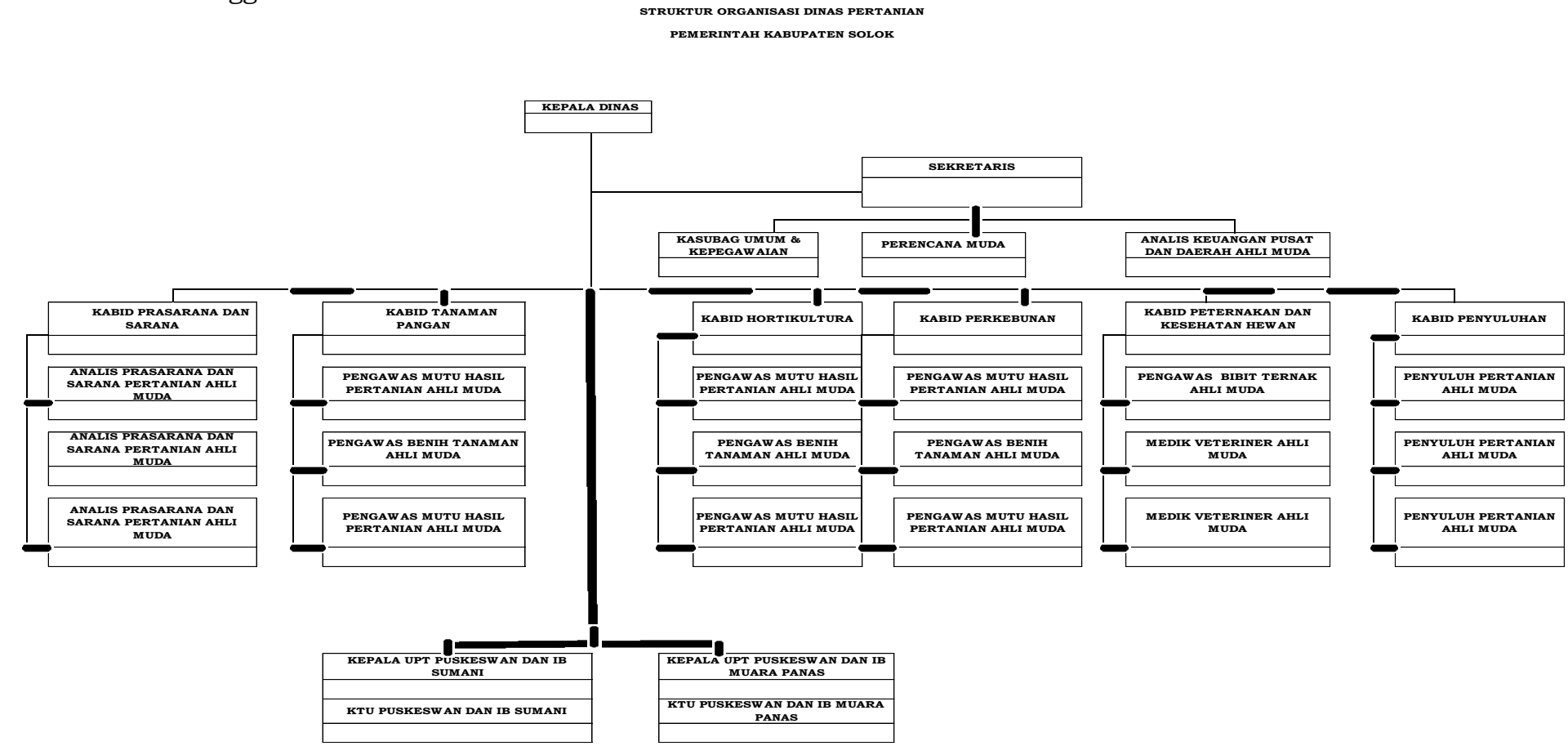


- 2. Penyuluh Ahli Muda
- 3. Penyuluh Ahli Muda

Struktur organisasi Dinas Pertanian secara jelas dapat dilihat pada gambar 2.1 berikut ini.



Gambar 2.1. Peraturan Bupati Solok Nomor 68 Tahun 2020 terdiri Satu Kepala, Satu Sekretariat, 6 Bidang, 3 Sub Bagian, Kelompok Jabatan Fungsional, dan 18 Seksi dan Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor 800/3548/OTDA tanggal 27 Mei 2022



Sumber: SOTK Dinas Pertanian Nomor 68 Tahun 2020

Adapun rincian tugas dan fungsi masing-masing unit kerja yang ada di Dinas Pertanian adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian perencanaan dan program kesekretariatan, koordinasi perencanaan dan program dinas, pengelolaan keuangan, kepegawaian dan umum. Sedangkan fungsi Sekretariat adalah:

- a. Penyusunan program dan anggaran meliputi penyusunan Renstra, Renja, dan RKA.
- b. Penyelenggaraan administrasi perkantoran yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, rumah tangga, hukum, organisasi, dan hubungan masyarakat.
- c. Penyelenggaraan urusan keuangan dan kelengkapan yang meliputi perbendaharaan, pendapatan, pengelolaan barang milik daerah, tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan, monitoring dan pelaporan.

2. Bidang Prasarana dan Sarana

Bidang prasarana dan sarana mempunyai tugas pokok menyelenggarakan program kerja, fasilitasi dan pembinaan serta pengelolaan bidang prasarana dan sarana serta fasilitasi dan pengembangan terhadap kelembagaan kelompok tani.

Fungsi bidang prasarana dan sarana adalah:

- a. Penyusunan program kerja di bidang prasarana dan sarana;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang prasarana dan sarana;
- c. Penyiapan bahan perumusan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan bidang prasarana dan sarana;
- d. Pelaksanaan pelayanan di bidang prasarana dan sarana;
- e. Penyelenggaraan pengelolaan di bidang prasarana dan sarana;
- f. Pembinaan dan fasilitasi terhadap kelembagaan prasarana dan sarana;
- g. Pendayagunaan dan pengembangan kelembagaan prasarana dan sarana ;
- h. Penyusunan bahan evaluasi, pengendalian dan pelaporan di bidang prasarana dan sarana.

3. Bidang Tanaman Pangan

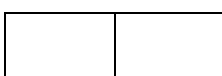
Bidang Tanaman Pangan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan program kerja serta fasilitasi dan pembinaan bidang tanaman pangan, fasilitasi dan pembinaan serta pendayagunaan dan pengembangan kelembagaan tani.

Fungsi Bidang Tanaman Pangan adalah:

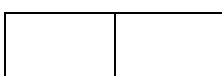
- a. Menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan lainnya sebagai pedoman dan landasan kerja.
- b. Menginventarisasi permasalahan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah.
- c. Menyusun program dan kegiatan dengan berpedoman kepada Renstra.
- d. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan di bidang perbenihan dan perlindungan tanaman pangan.



- e. Menyiapkan bahan penyediaan dan pengawasan peredaran benih tanaman pangan.
 - f. Menyiapkan bahan pengawasan dan pengujian mutu benih tanaman pangan.
 - g. Menyiapkan bahan spesifikasi benih dan pengendalian sumber benih tanaman pangan.
 - h. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kebutuhan benih dan pengembangan varietas unggul tanaman pangan.
 - i. Menyiapkan bahan rekomendasi pemasukan dan pengeluaran benih yang beredar di bidang tanaman pangan.
 - j. Menyiapkan bahan bimbingan produksi benih dan kelembagaan benih tanaman pangan.
 - k. Menyiapkan bahan pengendalian serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) tanaman pangan.
 - l. Menyiapkan bahan pengamatan dan melaksanakan pengelolaan data OPT tanaman pangan.
 - m. Menyiapkan bahan pengendalian, pemantauan, bimbingan operasional pengamatan dan peramalan OPT tanaman pangan.
 - n. Menyiapkan bahan bimbingan kelembagaan OPT tanaman pangan.
 - o. Menyiapkan bahan sekolah lapangan pengendalian hama terpadu tanaman pangan.
 - p. Menyiapkan bahan penanganan dampak perubahan iklim tanaman pangan.
 - q. Menyiapkan bahan penanggulangan bencana alam tanaman pangan.
 - r. Menyiapkan bahan bimbingan teknis perbenihan dan perlindungan tanaman pangan dan;
 - s. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.
4. Bidang Hortikultura
- Bidang Tanaman Hortikultura mempunyai tugas pokok menyelenggarakan program kerja serta fasilitasi dan pembinaan bidang hortikultura, fasilitasi dan pembinaan serta pendayagunaan dan pengembangan kelembagaan tani.
- Fungsi Bidang Hortikultura adalah:
- a. Penyusunan rencana dan anggaran bidang hortikultura.
 - b. Penyusunan bahan kebijakan bidang peningkatan produksi hortikultura.
 - c. Penyiapan bahan rencana tanaman dan produksi di bidang hortikultura.
 - d. Pemberian bimbingan peningkatan mutu dan produksi bidang hortikultura dan
 - e. Pemberian bimbingan penerapan teknologi budidaya bidang hortikultura.
5. Bidang Perkebunan
- a. Penyusunan kebijakan di bidang perbenihan, produksi, tataguna lahan, perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan.
 - b. Penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan benih dibidang perkebunan.
 - c. Pengawasan mutu dan peredaran benih bidang perkebunan.



- d. Pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi bidang perkebunan.
 - e. Penyusunan rencana dan pengawasan tataguna lahan perkebunan.
 - f. Pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, bencana alam, gangguan usaha, pencegahan kebakaran, dan dampak perubahan iklim bidang perkebunan.
 - g. Pemberian bimbingan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil bidang perkebunan.
 - h. Pemberian izin usaha/ rekomendasi teknis bidang perkebunan dan
 - i. Pemantauan dan evaluasi bidang perkebunan.
6. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan
- a. Penyusun kebijakan benih/bibit, produksi, peternakan dan kesehatan hewan, perlindungan serta pengolahan dan pemasaran hasil bidang peternakan;
 - b. Pengelolaan sumber daya genetik hewan;
 - c. Perencanaan kebutuhan dan penyediaan benih/ bibit ternak, pakan ternak dan benih/ bibit hijauan pakan ternak;
 - d. Pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi ternak
 - e. Pengendalian penyakit hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
 - f. Pengawasan peredaran dan penggunaan serta sertifikasi benih/ bibit ternak dan obat hewan;
 - g. Pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan, dan produk hewan;
 - h. Pelaksanaan sertifikasi persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan;
 - i. Pemberian izin /rekomendasi bidang peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan veteriner;
 - j. Pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil bidang peternakan dan
 - k. Pemantauan dan evaluasi bidang peternakan dan kesehatan hewan.
7. Bidang Penyuluhan
- a. Penyusunan kebijakan, strategi dan mekanisme serta program penyuluhan pertanian;
 - b. Pelaksanaan pengembangan mekanisme, tata kerja dan metode penyuluhan pertanian;
 - c. Pelaksanaan penataan kelembagaan dan metode kerja serta hubungan kerja penyelenggaraan penyuluhan;
 - d. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, pengemasan dan penyebaran materi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
 - e. Pengelolaan kelembagaan, ketenagaan, sarana dan prasarana serta pembiayaan penyuluhan;
 - f. Pengembangan kelembagaan petani dan penumbuhan kelembagaan ekonomi petani serta forum masyarakat bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
 - g. Peningkatan kapasitas penyuluh pemerintah, swadaya dan swasta melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan;



- h. Pembinaan balai penyuluhan Kecamatan dan pos penyuluhan Nagari dan;
 - i. Pengembangan kerjasama dan kemitraan penyelenggaraan penyuluhan.
8. Kepala UPT
- a. Perencanaan program dan kegiatan pelayanan kesehatan hewan dan inseminasi buatan
 - b. Pembinaan produktivitas dan reproduktivitas ternak milik masyarakat atau ternak bantuan pemerintah kepada masyarakat melalui kegiatan pelayanan kesehatan hewan, inseminasi buatan dan penanggulangan gangguan reproduksi ternak
 - c. Pengendalian dan pemberantasan penyakit hewan menular dan kesiagaan darurat wabah
 - d. Pengawasan terhadap bahan pangan asal hewan (daging, susu, telur) yang aman, sehat, utuh dan halal
 - e. Pelaksanaan kerjasama dengan instansi dan organisasi lain yang menyangkut di bidang kesehatan hewan di daerah dengan persetujuan Kepala Dinas.
9. Kepala Tata Usaha UPT
- a. Pelaksanaan administrasi keuangan, kepegawaian dan umum
 - b. Penyusunan dan pengoordinasian program kerja
 - c. Pengelolaan tata usaha rumah tangga dan perlengkapan
 - d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan

2.1.2. Sumber Daya Dinas Pertanian

a. Sumber Daya Manusia

Berdasarkan Peraturan Bupati Solok Nomor 68 Tahun 2020 terdiri Satu Kepala, Satu Sekretariat, 6 Bidang, 3 Sub Bagian, Kelompok Jabatan Fungsional, dan 18 Seksi dan Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor 800/3548/OTDA tanggal 27 Mei 2022.

Dilihat dari kedudukan kepegawaian aparatur Dinas Pertanian maka jumlah sumber daya aparatur dinas pada keadaan tanggal 1 Januari 2025 adalah sebanyak 181 orang yang terdiri atas 125 orang ASN dan 56 orang tenaga harian lepas. Berdasarkan bezetting bulan Juni 2025, ASN Dinas Pertanian berjumlah 120 orang dengan rincian 84 orang PNS, 36 orang P3K. Adapun perincian jumlah pegawai berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel 2.1.

Tabel 2.1. Jumlah ASN Dinas Pertanian Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2025

No	Uraian	Jumlah		Total
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Kepala Dinas Pertanian	1	0	1
2	Sekretariat	5	5	10
3	Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian	5	0	5
4	Bidang Tanaman Pangan	1	4	5
5	Bidang Hortikultura	1	3	4

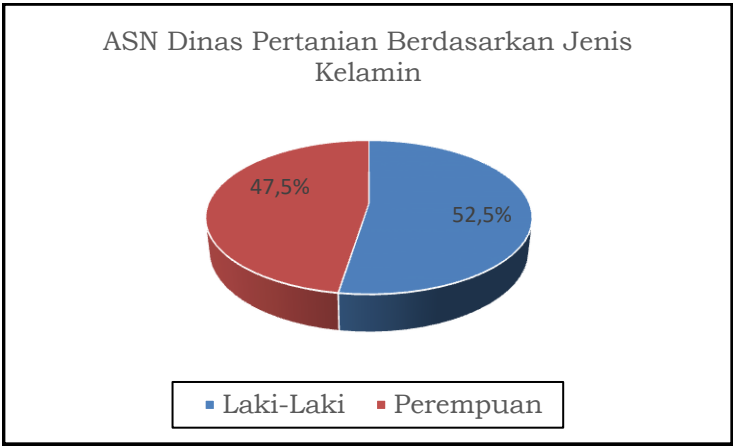
--	--

No	Uraian	Jumlah		Total
		Laki-Laki	Perempuan	
6	Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan	3	4	7
7	Bidang Perkebunan	2	1	3
8	Bidang Penyuluhan	5	2	7
9	UPT Puskesmas IB Muara Panas	3	4	7
10	UPT Puskesmas IB Sumani	5	1	6
11	BPP Kec. Pantai Cermin	2	1	3
12	BPP Kec. lembah Gumanti	0	5	5
13	BPP Kec. Hiliran Gumanti	3	3	6
14	BPP Kec. Payung Sekaki	2	1	3
15	BPP Kec. Tigo Lurah	2	0	2
16	BPP Kec. Lembang Jaya	3	3	6
17	BPP Kec. Danau Kembar	2	1	3
18	BPP Kec. Gunung Talang	3	4	7
19	BPP Kec. Bukit Sundi	1	3	4
20	BPP Kec. IX Koto Sungai Lasi	3	2	5
21	BPP Kec. Kubung	2	5	7
22	BPP Kec. X Koto Diatas	4	1	5
23	BPP Kec. X Koto Singkarak	4	2	6
24	BPP Kec. Jujung Sirih	1	2	3
	Total	63	57	120

Sumber: DUK Dinas Pertanian, Juni 2025

Aparatur Dinas Pertanian berdasarkan jenis kelamin, jumlah yang laki-laki lebih banyak dari yang perempuan, dimana aparatur laki-laki berjumlah 63 orang atau 52,5% dan perempuan berjumlah 57 orang atau 47,5% dari total aparatur yang ada. Komposisi aparatur Dinas Pertanian berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada gambar 2.2.

Gambar 2.2.
Komposisi ASN Dinas Pertanian Berdasarkan Jenis kelamin



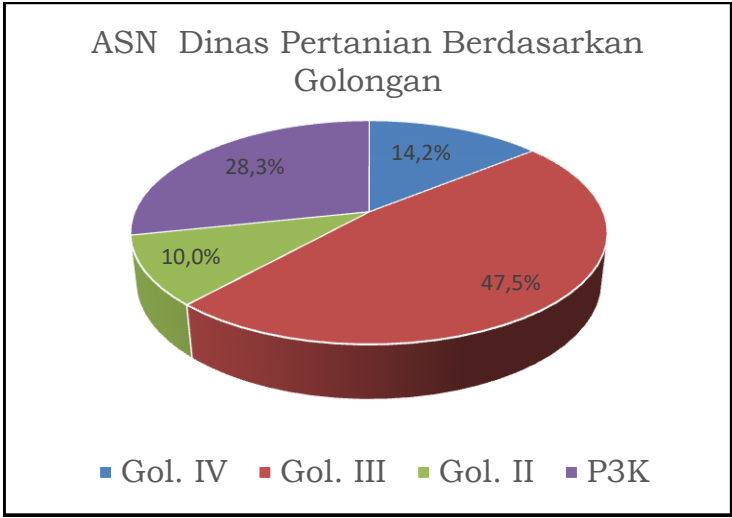
Tabel 2.2. Data ASN Lingkup Dinas Pertanian Berdasarkan Golongan dan Status Kepegawaian Tahun 2025

Uraian	1 Juni 2025 (orang)	Persentase
Gol. IV	17	14,2%
Gol. III	57	47,5%
Gol. II	12	10%
P3K	34	28,3%
Jumlah	120	100%

Sumber: DUK Dinas Pertanian, Juni 2025

Berdasarkan golongan, sebaran pegawai Dinas Pertanian umumnya berada pada golongan III yaitu sebanyak 57 orang atau sebesar 47,5%, sedangkan yang paling sedikit adalah golongan II sebanyak 12 orang atau sebesar 10,0%. Banyaknya aparatur pada golongan III disebabkan masa kerja yang sudah lama dan beberapa aparatur yang diangkat langsung pada golongan III. Adapun komposisi aparatur Dinas Pertanian berdasarkan golongan, dapat dilihat pada gambar 2.3.

Gambar 2.3.
Komposisi ASN Dinas Pertanian Berdasarkan Golongan



Sedangkan sebaran keadaan Aparatur Sipil Negara (ASN) berdasarkan latar belakang pendidikan disajikan pada tabel 2.3 berikut:

--	--

Tabel 2.3. ASN Dinas Pertanian berdasarkan Latar Belakang Pendidikan Tahun 2025

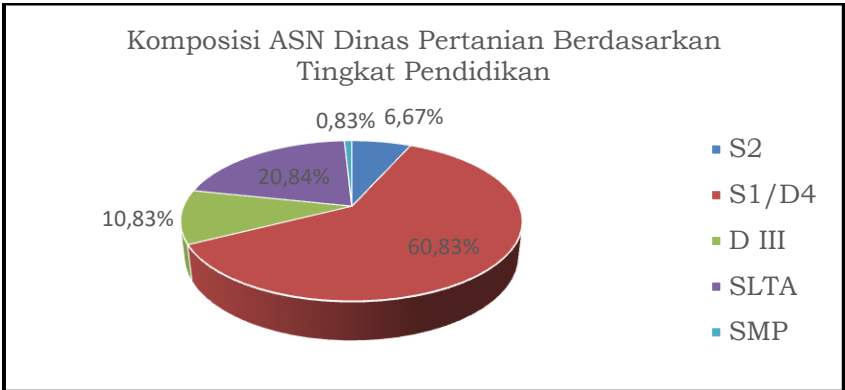
Tingkat Pendidikan	Jurusan	Jumlah	Persentase
S2		8	6,67%
	- Pembangunan wilayah Pedesaan	2	
	- Lingkungan	1	
	- Pertanian	1	
	- Peternakan	1	
	- Administrasi Publik	1	
	- Akuntansi Pemerintahan	1	
	- Kesehatan Masyarakat Veteriner	1	
S1		73	60,83
	- Dokter Hewan	7	
	- Peternakan	24	
	- Pertanian	41	
	- Sosial	1	
D3		13	10,83%
	D III Pertanian	10	
	D III Peternakan	1	
	Tekhnik Elektronika	1	
	Kimia Analisis	1	
SLTA		25	20,84%
	SPMA	20	
	STM	1	
	SMU	2	
	SMEA	1	
SMP		1	0,83%
	SMP	1	
	Jumlah	120	

Sumber: DUK Dinas Pertanian, Juni 2025

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa rata-rata tingkat pendidikan ASN di Dinas Pertanian adalah Sarjana Strata 1 dan D4, dengan jumlah lebih dari separuh jumlah keseluruhan pegawai yaitu 60,84%. Sedangkan pegawai yang berlatar belakang pendidikan sekolah menengah (SMA dan SMP) berjumlah 25 orang atau 20,84% dari jumlah keseluruhan pegawai.



Gambar 2.4.
Komposisi ASN Dinas Pertanian Berdasarkan Pendidikan



b. Asset/Modal Dinas Pertanian

Dalam upaya mendukung tugas dan fungsi Dinas Pertanian perlu ada asset/modal yang dimiliki, diantaranya asset lahan/tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan dan lain-lain. Dimana sampai Tahun 2024 kekayaan Dinas Pertanian sebesar Rp. 38.385.640.510,16,- disajikan pada tabel 2.4. berikut:

Tabel 2.4. Data Asset/Modal Bangunan, Lahan/Tanah dan Peralatan Dinas Pertanian Tahun 2024

No	Nama Bidang Barang	Jumlah (Rp)	Kondisi	
			Baik	Tidak Baik/ Rusak Berat
1	Tanah (Kib.A)	2.507.949.000,00	√	
2	Peralatan dan Mesin (Kib.B)	11.457.506.214,00	√	
3	Peralatan dan Mesin (Kib.B)	1.525.482.522,00		√
4	Gedung dan Bangunan (Kib. C)	20.765.801.086,16	√	
5	Gedung dan Bangunan (Kib. C)	813.968.470,00		√
6	Jalan, Irigasi dan Jaringan (Kib. D)	661.343.200,00	√	
7	Aset Tetap Lainnya (Kib. E)	-		
8	Konstruksi dalam Pengerjaan (Kib.F)	653.590.018,00	√	
	Total	38.385.640.510,16		

Sumber: Dinas Pertanian, 2025

Keberadaan sumber daya manusia dan sumber daya sarana prasarana di Dinas pertanian dapat memperkuat keberadaan Dinas pertanian, sebaliknya jika tidak terpenuhi secara optimal juga dapat menjadi kelemahan yang akan memperlambat tercapainya kinerja. Adapun kekuatan dan kelemahan Dinas pertanian berdasarkan sumber daya yang ada dapat dilihat pada Tabel 2.5

--	--

Tabel 2.5. Rekapitulasi Sumber Daya Dinas Pertanian Tahun 2025

No	Uraian	Kekuatan	Kelemahan
1.	Sumber Daya Manusia		
	a. Berdasarkan jenis kelamin	Jumlah laki-laki lebih banyak dari perempuan. Untuk pekerjaan di lapangan, aparatur laki-laki mempunyai kemampuan yang cukup baik	Beberapa tugas tertentu lebih membutuhkan aparatur perempuan
	b. Berdasarkan golongan	Aparatur Dinas Pertanian didominasi oleh Golongan III, sehingga secara kemampuan dalam menjalankan tugas dan fungsi cukup baik	Aparatur golongan II lebih banyak berjabatan sebagai penyuluh pertanian dan untuk fungsional umum terbatas sehingga untuk pekerjaan teknis seperti bendahara, operator computer dan lainnya masih kekurangan personil.
	c. Berdasarkan tingkat pendidikan	Aparatur Dinas Pertanian didominasi oleh tamatan S1 atau sederajat, sehingga mempunyai kemampuan yang cukup baik dalam menjalankan tugas dan fungsi	Dinas pertanian membutuhkan aparatur yang berlatar belakang teknik sipil untuk mendukung kegiatan pembangunan infrastruktur jalan pertanian dan irigasi
2	Aset	Tersedianya sarana dan prasarana untuk melaksanakan tugas dan fungsi	Beberapa sarana dan prasarana masih kurang seperti kendaraan operasional dan rehab gedung Dinas, BPP dan Puskesmas



2.1.3. Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Dinas Pertanian

A. Indikator Utama Pembangunan

1. Rasio PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan

Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan merupakan sektor penyumbang terbesar untuk PDRB dan juga merupakan sektor yang unggulan di Kabupaten Solok. Karena secara agroklimat Kabupaten Solok cocok untuk untuk tanaman hortikultura dan tanaman pangan dan untuk perikanan Kabupaten Solok juga memiliki danau dan sungai yang potensial untuk produksi perikanan.

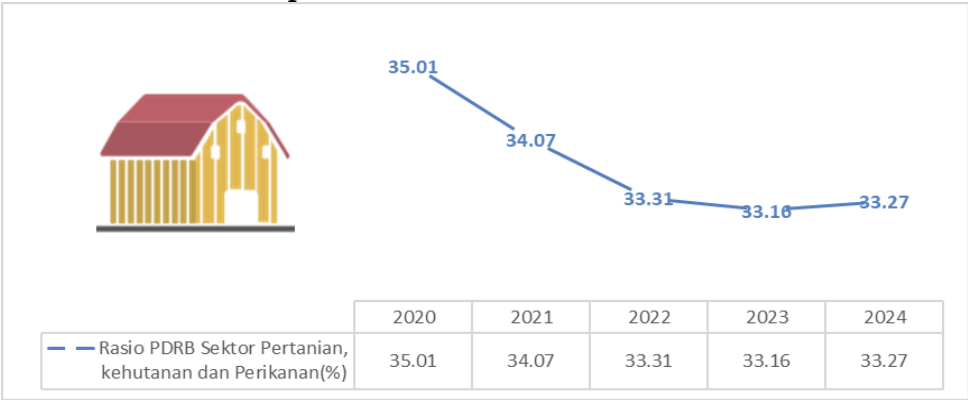
Rasio PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan cenderung menurun setiap tahunnya. Walau secara laju dan produktivitas sektor ini cenderung meningkat, namun secara kontribusi mengalami penurunan selama 5 (lima) tahun terakhir. Terjadinya penurunan ini disebabkan oleh beberapa sektor lapangan usaha mengalami percepatan tumbuh yang sangat signifikan misalnya di sektor jasa akomodasi makan minum karena diiringi dengan perkembangan sektor pariwisata di Kabupaten Solok.

Agar produksi komoditi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan terus meningkat setiap tahun, perlu dilakukan upaya peningkatan luas tanam, luas panen dan produktivitas. Sedangkan untuk komoditi peternakan diperlukan upaya untuk meningkatkan populasi ternak.

Produksi komoditi pertanian tertinggi pada tanaman bawang merah yaitu sebesar 188.555,86 ton disusul dengan produksi padi sebesar sebesar 179.316,1 ton. Untuk beberapa komoditi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan yang mengalami penurunan produksi disebabkan oleh turunnya luas tanam, luas panen dan produktivitas.

Peningkatan produksi komoditi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan dipengaruhi oleh peningkatan luas panen dan produktivitas sedangkan untuk sektor peternakan peningkatan produksi dipengaruhi oleh jumlah populasi ternak. Dengan demikian perlu dilakukan beberapa kebijakan yang mendukung peningkatan produksi komoditi pertanian. Rasio PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan pada tahun 2020-2024 dapat dilihat pada gambar 2.5.

Gambar 2.5
Rasio PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan
Kabupaten Solok Tahun 2020-2024



Sumber : Kabupaten Solok Dalam Angka, 2025



Namun demikian, hingga saat ini belum tersedia data kuantitatif mengenai proporsi nilai tambah dari pengolahan produk pertanian, sebagaimana telah dikonfirmasi oleh Dinas Pertanian dan BPS. Selain itu, belum terdapat program subsidi atau insentif khusus yang mendorong petani melakukan hilirisasi atau inovasi dalam pengolahan hasil pertanian. Oleh sebab itu, strategi penguatan sektor ini masih sangat bergantung pada upaya menjaga stabilitas harga komoditas utama, antara lain melalui penyediaan fasilitas cold storage, kerja sama antar daerah yang kekurangan pasokan, serta pengaturan jadwal tanam guna menghindari over atau under produksi yang bisa memicu fluktuasi harga pasar.

Melalui kebijakan tersebut, diharapkan kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan terhadap PDRB Kabupaten Solok dapat ditingkatkan secara berkelanjutan, sekaligus menciptakan nilai tambah dan meningkatkan ketahanan pangan daerah.

B. Indikator Perurusan

Kabupaten Solok mempunyai keunggulan komparatif di bidang pertanian, dengan berbagai potensi yang dimiliki untuk mengembangkan berbagai komoditi seperti pangan, hortikultura, peternakan, perkebunan dan perikanan. Potensi yang dimiliki antara lain iklim dan agro ekosistem yang sesuai, tersedianya sumber daya genetik yang melimpah, tersedianya SDM (petani dan petugas), dukungan kebijakan pemerintah dan jumlah penduduk besar. Meskipun memiliki potensi yang besar, namun perkembangan pertanian pada komoditas tanaman pangan dan hortikultura belum berkembang dengan optimal, karena ketersediaan benih tanaman pangan dan hortikultura yang unggul bersertifikat belum mencukupi kebutuhan petani di Kabupaten Solok. Sementara di sub sektor peternakan untuk komoditas Ayam Kukuak Balenggek merupakan ternak endemik yang hanya dimiliki di Kabupaten Solok, akan tetapi perlu untuk pengembangan plasma nutfah Ayam Kukuak Balenggek di Kabupaten Solok. Populasi Ayam Kukuak Balenggek saat ini sebanyak 5045 ekor, dan itu tersebar di wilayah Kabupaten Solok, populasi terbanyak terdapat di Kecamatan Tigo Lurah, Kecamatan Danau Kembar dan Lembah Gumanti.

Pertanian merupakan kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, atau sumber energi, serta untuk mengelola lingkungan hidupnya. Secara umum peran sektor pertanian cukup dominan dalam pembangunan di Kabupaten Solok dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

--	--

Tabel 2.6. Perkembangan Indikator Urusan Pertanian Kabupaten Solok Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
1	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	3,50%	3,82%	7,98%	3,72%	-14,12%
2	Peningkatan Produksi Hortikultura	6,80%	13,50%	12,14%	12,06%	-2,96%
3	Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan	-3,09%	4,69%	-10,80%	23,06%	7,73%
4	Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan	-2,11%	38,69%	-2,84%	43,22%	22,51%
5	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang ditetapkan menjadi LP2B	-	-	-	90,16%	90,16%
6	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)	33,17%	4,33%	0,35%	36,11%	4,08%
7	Persentase Unit Usaha Pangan asal Hewan yang Memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner)	2%	2%	4%	5%	6%
8	Persentase Penanganan Bencana Pertanian	54,60%	55,40%	60,80%	60,30%	41,10%
9	Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim Terhadap Pertanian	85%	95%	94%	94%	88%
10	Persentase Izin Usaha Pertanian yang diterbitkan	-	-	-	-	-
11	Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang ditingkatkan	5,10%	-	9,64%	5,41%	-

Sumber: Dinas Pertanian, 2025

Peningkatan produksi tanaman pangan pada komoditi unggulan Kabupaten Solok yaitu untuk tanaman padi dan ubi jalar mengalami penurunan pada tahun 2024 dibandingkan tahun 2023 Untuk tanaman padi penurunan produksi disebabkan turunnya produktivitas pada tahun 2024 sedangkan untuk ubi jalar disebabkan turunnya luas tanam, luas panen dan produktivitas pada tahun 2024.

Peningkatan produksi hortikultura pada komoditi unggulan Kab.Solok yaitu bawang merah, cabe merah, kentang, alpukat,



manggis, durian, pepaya, pisang,dan markisah. Produksi bawang merah meningkat pada tahun 2020-2023 dan turun pada tahun 2024. Penurunan produksi ini disebabkan turunnya luas tanam dan luas panen pada tahun 2024. Produksi cabe merah tahun 2024 mengalami penurunan terhadap produksi cabe merah tahun 2023. Penurunan luas panen merupakan faktor penyebab turunnya produksi cabai merah tahun 2024. Perkembangan produksi cabe merah menunjukkan adanya fluktuasi dari tahun 2020-2024. Produksi kentang tahun 2024 mengalami penurunan dibandingkan produksi kentang tahun 2023. Penurunan luas tanam, luas panen dan produktivitas merupakan faktor penyebab turunnya produksi kentang tahun 2024. Perkembangan produksi manggis berfluktuasi dari tahun 2020-2024. Jumlah tanaman menghasilkan dan produktivitas merupakan faktor yang mempengaruhi produksi manggis. Perkembangan produksi durian berfluktuasi dari tahun 2020-2024. Jumlah tanaman menghasilkan dan produktivitas merupakan faktor yang mempengaruhi produksi durian. Perkembangan produksi pisang menunjukkan adanya peningkatan dari tahun 2020-2024.. Peningkatan jumlah tanaman menghasilkan merupakan faktor penyebab naiknya produksi pisang.

Perkembangan produksi pepaya menunjukkan adanya peningkatan dari tahun 2020-2024. Peningkatan jumlah tanaman menghasilkan dan merupakan faktor penyebab naiknya produksi pepaya tahun 2024. Perkembangan produksi alpukat menunjukkan adanya kenaikan dari tahun 2020-2024. Peningkatan jumlah tanaman menghasilkan dan produktivitas merupakan faktor penyebab naiknya produksi alpukat. Perkembangan produksi markisah berfluktuasi dari tahun 2020-2024. Jumlah tanaman menghasilkan dan produktivitas merupakan faktor yang mempengaruhi produksi markisah.

Peningkatan produksi peternakan yang dihitung adalah produksi daging sapi yang merupakan komoditi unggulan di kabupaten Solok. Perkembangan produksi daging sapi menunjukkan adanya fluktuasi dari tahun 2020-2024. Kenaikan jumlah pemotongan ternak merupakan faktor penyebab naiknya produksi daging sapi

Peningkatan produksi perkebunan yaitu: Kakao, cengkeh, karet, dan kopi menunjukkan adanya kenaikan dari tahun 2020-2024. Kenaikan produksi perkebunan ini disebabkan karena naiknya luas panen dan produktivitas.

Cakupan Luas Lahan Pertanian yang ditetapkan menjadi LP2B.Berdasarkan Peraturan Bupati Solok nomor 51 tahun 2023 tentang Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan ditetapkan bahwa luas sawah yang dilindungi adalah 19.343,10 Ha. Cakupan luas lahan sawah yang ditetapkan menjadi LP2B 90,16% dari luas sawah 21.454,03 Ha. Luas sawah ini merupakan hasil pengukuran luas lahan sawah pada tahun 2023 yang dilakukan oleh Dinas Pertanian bekerjasama dengan Universitas Andalas.

Persentase Unit Usaha Pangan asal Hewan yang Memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner) Sertifikat NKV adalah sertifikat sebagai bukti tertulis yang sah, telah dipenuhinya persyaratan higiene dan sanitasi sebagai jaminan keamanan dan



kualitas produk hewan pada unit usaha produk hewan. Sertifikat NKV (Nomor Kontrol Veteriner) dikeluarkan berdasarkan hasil evaluasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat pada pada unit usaha produk hewan. Pada saat ini terdapat 100 unit usaha produk hewan yang ada di kabupaten Solok. Dari tahun 2020-2024 baru 6 unit usaha produk hewan yang telah memiliki sertifikat NKV.

Persentase Penanganan Bencana Pertanian adalah kejadian yang mengganggu atau merusak kegiatan pertanian yang mengakibatkan kerugian hasil panen, kerusakan lahan dan gangguan pada sistem pertanian. Bencana ini dapat disebabkan oleh banjir, kekeringan dan serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT). Bencana pertanian yang sering terjadi adalah serangan OPT. Penanganan bencana pertanian di Kabupaten Solok meningkat pada tahun 2020-2022 dan mengalami penurunan dari tahun 2022-2024. Turunnya penanganan bencana pertanian disebabkan masih kurangnya sarana untuk pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dan terbatasnya kemampuan petani untuk melakukan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian.

Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim, perubahan iklim adalah keadaan cuaca yang berubah-ubah diluar pengendalian manusia, yang berdampak buruk langsung atau tidak langsung pada usaha pertanian, seperti: banjir, kekeringan, dan serangan OPT. Hal ini dapat menyebabkan turunnya produksi bahkan gagal panen. Penanganan dampak perubahan iklim terhadap pertanian meningkat pada tahun 2020-2023 dan menurun pada tahun 2024. Turunnya penanganan DPI disebabkan kurangnya sarana dan prasarana untuk penanganan DPI sebagai antisipasi penanganan dampak perubahan iklim seperti penggunaan teknologi hemat air melalui irigasi tetes/kabut/sprinkle, irigasi perpipaan, irigasi per pompaan, teknologi panen air (embung), irigasi air tanah dan penerapan teknologi mitigasi dampak perubahan iklim.

Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang ditingkatkan,persentase SDM penyuluh pertanian yang ditingkatkan kapasitasnya dihitung berdasarkan jumlah penyuluh pertanian yang naik kelas jabatan penyuluh pertanian dibagi dengan jumlah total Penyuluh Pertanian di Kabupaten Solok. Jumlah penyuluh pertanian yang naik kelas jabatan terbanyak pada tahun 2022 yaitu sebanyak 8 orang.

C. Indikator Kinerja Kunci
Indikator Kinerja Kunci Dinas Pertanian pada tahun 2020-2024 adalah:

- 1. Produktifitas pertanian per Ha per tahun
- 2. Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular.

Perkembangan Indikator Kinerja Kunci Dinas Pertanian tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

--	--

Tabel 2.7. Perkembangan Indikator Kinerja Kunci Dinas Pertanian tahun 2020-2024

No.	Indikator Kinerja Kunci (Outcome)	2020	2021	2022	2023	2024
1	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	645,29%	640,41%	664,42%	655,17%	62,97%
2	Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	13,04%	-39,42%	1049,21%	-72,92%	628,06%

Sumber: Dinas Pertanian, 2025

Data produktifitas pertanian di dapat dari jumlah produksi di bagi dengan luas panen tanaman Padi, Jagung, Ubi kayu, Ubi jalar, Kedelai, Kacang Tanah, dan Kacang Hijau. Peningkatan produktifitas pertanian per hektar per tahun mengalami fluktuasi dari tahun 2020-2024. Produktifitas tertinggi terjadi pada tahun 2022 dan terendah pada tahun 2024. Turunnya produktifitas disebabkan karena adanya cuaca/iklim ekstrem seperti kekeringan dan curah hujan tinggi, serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dan rendahnya pemakaian benih unggul bersertifikat.

Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular juga mengalami fluktuasi dari tahun 2020-2024. Penurunan kasus tertinggi pada tahun 2023 dan kenaikan kasus tertinggi terjadi pada tahun 2022. Angka pengendalian penyakit hewan yang naik turun disebabkan oleh perubahan musim, pola penyakit yang berubah, tingkat kekebalan hewan yang bervariasi dan upaya pengendalian yang tidak konsisten. Selain itu globalisasi dan pergerakan hewan serta produk hewan antar wilayah juga memicu penyebaran penyakit dan memengaruhi angka pengendalian.

2.1.4. Kelompok Sasaran Pelayanan Dinas Pertanian

Untuk mendukung pencapaian Misi Keempat RPJMD Kabupaten Solok Tahun 2025–2029, yaitu “*Peningkatan Ekonomi Berbasis Potensi dan Sumber Daya Nagari*”, Dinas Pertanian menetapkan arah strategis pembangunan subsektor pertanian tanaman pangan, hortikultura perkebunan dan peternakan melalui Rencana Strategis Tahun 2025–2029. Tujuan yang ingin dicapai adalah “*Meningkatkan kontribusi sektor pertanian terhadap pertumbuhan ekonomi*”. Untuk mencapai tujuan tersebut, ditetapkan kelompok-kelompok sasaran yang menjadi fokus dalam pelaksanaan program dan kegiatan meliputi :

- Petani tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan serta peternak yang tergabung dalam kelembagaan tani seperti kelompok tani dan gabungan kelompok tani (Gapoktan). Kelembagaan ini berperan langsung dalam proses produksi



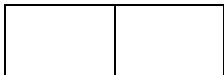
sehingga harus didorong untuk peningkatan kapasitas kelembagaan, adopsi teknologi dan akses terhadap input produksi. Dengan semakin berkurangnya petani usia produktif maka perlu ditumbuhkannya petani milenial sebagai upaya meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM pertanian yang unggul, inovatif, dan adaptif terhadap tantangan pertanian modern.

- Kelembagaan ekonomi petani, seperti Kelompok Usaha Bersama (KUB), Koperasi Tani dan Unit Pengolahan Hasil (UPH), dan yang berperan dalam memperkuat rantai nilai dan akses pasar produk pertanian. Penguatan kelembagaan ini menjadi bagian penting dalam strategi peningkatan nilai tambah, daya saing, distribusi, dan keberlanjutan usaha tani.
- Stakeholder pertanian seperti penyuluh pertanian, petugas medic veteriner, paramedic veteriner, petugas pendamping petani, pelaku UMKM agribisnis, BUMN dan perusahaan swasta menjadi bagian dari sasaran strategis, karena berperan penting dalam memperkuat ekosistem pertanian secara menyeluruh.

2.1.5. Mitra Dinas Pertanian dalam Pemberian Layanan

Mitra perangkat daerah dalam pemberian layanan untuk mencapai target kinerja Dinas Pertanian adalah:

1. Lembaga/instansi pemerintah yang menjadi mitra kerja Dinas Pertanian adalah:
 - a. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR): irigasi, jalan pertanian.
 - b. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Solok: pemasaran hasil pertanian dan penguatan usaha tani.
 - c. Dinas Lingkungan Hidup: pengelolaan lingkungan
 - d. Badan Perencanaan penelitian dan pengembangan: perencanaan pembangunan.
 - e. Dinas Perikanan dan Pangan: pengujian mutu hasil pertanian.
2. Mitra non Pemerintah terdiri atas:
 - a. Kelompok tani/Gapoktan merupakan ujung tombak di lapangan yang menjadi mitra utama untuk menerapkan teknologi pertanian, mengelola lahan, dan meningkatkan hasil produksi.
 - b. Perguruan tinggi dan lembaga riset: universitas dan lembaga penelitian sering menjadi mitra dinas pertanian dalam mengembangkan inovasi teknologi pertanian, seperti benih unggul atau sistem irigasi yang efisien
 - c. Industri dan Swasta: Perusahaan di sektor pertanian, baik pengolah maupun penyedia saprotan (sarana produksi pertanian)
 - d. Perbankan dan lembaga keuangan: kredit usaha tani (KUR)
 - e. Koperasi tani: pembiayaan dan distribusi
 - f. Masyarakat Umum: Warga atau komunitas lokal juga bisa terlibat dalam program kemitraan, misalnya melalui pengelolaan sumber daya alam pertanian atau pelestarian lingkungan.



2.1.6. Kerja Sama Daerah yang Menjadi Tanggung Jawab Dinas Pertanian

Kerjasama daerah di sektor pertanian bertujuan untuk peningkatan produktivitas dan kualitas hasil pertanian, penguatan ketahanan pangan, peningkatan pendapatan petani dan peningkatan daya saing produk. Dengan adanya Kerjasama daerah memungkinkan petani dan daerah untuk berbagi ilmu pengetahuan dan teknologi, meningkatkan produksi dan kualitas hasil pertanian seperti tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan, kolaborasi antar daerah untuk memperkuat ketahanan pangan regional maupun nasional dengan menyediakan dan mengoptimalkan ketersediaan pangan serta dapat meningkatkan pendapatan petani. Kerjasama daerah yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah di sektor pertanian adalah:

1. Kerjasama dengan PT.Tjipinang Jaya Food Estate untuk pengiriman Berek Solok
2. Kerjasama dengan BRIN untuk memperpendek umur varietas cabai merah
3. Kerjasama dengan PT. Agricorn untuk pengembangan jagung
4. Kerjasama dengan PT. Indofood untuk pengembangan kentang

Selain itu Kabupaten Solok juga telah melakukan kerjasama sektor pertanian dengan beberapa wilayah di Provinsi Riau, termasuk dengan Kota Pekanbaru dan Kabupaten Kampar, yang bertujuan untuk menyerap surplus produksi pertanian Solok (seperti cabai) dan memenuhi kebutuhan pangan di daerah-daerah tersebut, serta untuk menekan inflasi dan memperkuat ketahanan pangan bersama.

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Pertanian

A. Permasalahan Pelayanan Dinas Pertanian

Analisis permasalahan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah merupakan langkah awal yang tepat untuk dilakukan, agar pemerintah daerah dapat menemukan isu utama yang dihadapi sebagai bahan untuk mendalami pokok permasalahan dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Permasalahan pembangunan daerah merupakan gap antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Permasalahan pembangunan yang berasal dari analisa lingkungan eksternal dan internal dapat menjadi prediksi terhadap berbagai peluang dan ancaman yang mungkin muncul dalam pelaksanaan pembangunan Kabupaten Solok. Permasalahan tersebut kemudian dirumuskan sebagai bagian dari isu-isu strategis yang perlu untuk menjadi perhatian dalam penyusunan kerangka kebijakan agar sesuai dengan kebutuhan pembangunan Kabupaten Solok. Isu strategis pembangunan daerah merupakan seluruh sumber kekuatan daerah, baik yang efektif maupun potensial, yang dimiliki dan didayagunakan dalam membangun Kabupaten Solok guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan (sustainability) pembangunan di Kabupaten Solok



Pembangunan pertanian mempunyai peran yang penting dalam pembangunan nasional yaitu untuk peningkatan ketahanan pangan, peluang kerja, sumber pendapatan serta mempengaruhi terhadap laju pertumbuhan ekonomi. Namun dalam pelaksanaan pelayanan sekaitan dengan tugas dan fungsi yang diemban oleh Dinas Pertanian masih terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi. Beberapa permasalahan yang muncul dalam urusan pertanian dapat dilihat pada tabel 2.8.

Tabel 2.8. Rumusan masalah pokok, masalah dan akar masalah

MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
Masih rendahnya pertumbuhan sektor pertanian	Masih rendahnya produktivitas pertanian	Tingginya alih fungsi lahan pertanian
		Masih kurangnya bibit benih unggul
		Belum optimalnya penyediaan dan pemerataan sarana dan prasarana
		Masih terbatasnya pemanfaatan teknologi
		Belum optimalnya kuantitas dan kapasitas SDM
		Belum optimalnya pengendalian penyakit dan hama
		Belum optimalnya penangkaran potensi lokal
		Masih rendahnya jangkauan pemasaran
		Belum optimalnya penggunaan kalender tanam
		Masih lemahnya pengawasan perlindungan kawasan pertanian dan peternakan
		belum optimalnya pengendalian penyakit ternak
		Ancaman Penyakit Hewan Menular Strategis dan Zoonosis (PHMSZ)
	Masih Rendahnya hilirisasi pertanian	Masih pola pikir masyarakat terhadap nilai tambah komoditi pertanian
		Kelembagaan belum berorientasi agribisnis
		Belum optimalnya pemanfaatan digitalisasi
		Kurangnya tindak lanjut MOU dengan stakeholder terkait
		Masih terbatasnya akses permodalan
		Belum optimalnya pemasaran

Sumber: Dinas Pertanian, 2025

Masih rendahnya produktivitas pertanian di Kabupaten Solok ini disebabkan oleh: tingginya alih fungsi lahan pertanian, masih kurangnya bibit benih unggul, belum optimalnya penyediaan dan



pemerataan sarana dan prasarana, masih terbatasnya pemanfaatan teknologi, belum optimalnya kuantitas dan kapasitas SDM, belum optimalnya penangkaran potensi lokal, masih rendahnya jangkauan pemasaran, belum optimalnya penggunaan kalender tanam, masih lemahnya pengawasan perlindungan kawasan pertanian dan peternakan, belum optimalnya pengendalian penyakit ternak dan ancaman Penyakit Hewan Menular Strategis dan Zoonosis (PHMSZ).

Kabupaten Solok sebagai salah satu daerah agraris di Sumatera Barat memiliki potensi lahan pertanian yang luas dan subur. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, terjadi trend peningkatan alih fungsi lahan yang cukup signifikan, terutama dari lahan pertanian produktif menjadi lahan non-pertanian seperti permukiman, industri kecil, dan infrastruktur. Fenomena ini menimbulkan kekhawatiran terhadap keberlanjutan ketahanan pangan, kelestarian lingkungan, dan tata ruang wilayah yang berkelanjutan.

Alih fungsi lahan di Kabupaten Solok disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain peningkatan kebutuhan lahan untuk pembangunan, pertumbuhan penduduk, lemahnya pengawasan terhadap pemanfaatan ruang, serta rendahnya insentif bagi petani untuk mempertahankan fungsi lahannya. Selain itu, nilai ekonomi dari lahan non-pertanian yang dianggap lebih menguntungkan juga mendorong masyarakat untuk menjual atau mengalihkan fungsi lahannya.

Akibat dari alih fungsi lahan ini, terjadi penurunan luas lahan sawah irigasi, menurunnya produksi pangan lokal, terganggunya ekosistem lingkungan, serta potensi meningkatnya konflik pemanfaatan ruang. Jika tidak segera dikendalikan, kondisi ini akan berdampak terhadap penurunan kualitas hidup masyarakat dan pencapaian pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Solok.

Pertanian merupakan sektor unggulan dan tulang punggung perekonomian di Kabupaten Solok. Namun demikian, salah satu tantangan yang masih dihadapi dalam peningkatan produktivitas dan kualitas hasil pertanian adalah rendahnya penggunaan bibit unggul oleh petani. Meskipun pemerintah telah menyediakan berbagai program bantuan dan sosialisasi, tingkat adopsi bibit unggul oleh petani masih tergolong rendah.

Beberapa faktor penyebab kondisi ini antara lain keterbatasan akses petani terhadap bibit unggul berkualitas, kurangnya pengetahuan dan kesadaran akan manfaat penggunaan bibit unggul, serta masih kuatnya ketergantungan terhadap bibit lokal yang secara turun-temurun digunakan meskipun memiliki produktivitas yang lebih rendah. Di sisi lain, sistem distribusi dan penyuluhan yang belum merata juga menjadi kendala dalam memperluas pemanfaatan bibit unggul.

Akibatnya, hasil pertanian di beberapa wilayah di Kabupaten Solok belum mencapai potensi maksimal, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Jika tidak segera diatasi, hal ini berisiko menghambat daya saing komoditas pertanian lokal, terutama dalam menghadapi tantangan pasar dan perubahan iklim. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang lebih intensif dan terpadu dalam mendorong penggunaan bibit unggul oleh para petani, guna mendukung



ketahanan pangan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat tani di Kabupaten Solok.

Meskipun Kabupaten Solok memiliki potensi besar di sektor pertanian dan peternakan, namun masih dihadapkan pada permasalahan rendahnya jangkauan pemasaran dan minimnya perlindungan terhadap kawasan pertanian dan peternakan. Sistem distribusi hasil pertanian dan peternakan belum optimal, menyebabkan keterbatasan akses pasar bagi para petani dan peternak, terutama di wilayah terpencil. Hal ini berdampak pada rendahnya nilai jual produk serta ketergantungan pada pasar lokal atau tengkulak.

Hilirisasi pertanian di Kabupaten Solok hingga saat ini masih tergolong rendah. Kondisi ini disebabkan oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Salah satu penyebab utama adalah masih kuatnya pola pikir masyarakat yang berorientasi pada usaha tani tradisional dan berfokus pada produksi semata, tanpa mempertimbangkan nilai tambah pascapanen. Selain itu, kelembagaan pertanian di tingkat lokal belum sepenuhnya berorientasi bisnis, sehingga kurang mampu mendorong inovasi dan pengembangan produk yang kompetitif di pasar.

B. Isu Strategis

Isu strategis adalah keadaan atau kondisi yang harus mendapatkan perhatian atau prioritas dalam perencanaan pembangunan daerah karena mempunyai dampak yang signifikan bagi daerah. Isu strategis memiliki karakteristik penting, mendasar, mendesak, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Isu-isu strategis pembangunan pertanian di Kabupaten Solok dirumuskan berdasarkan permasalahan-permasalahan pembangunan daerah, tantangan dan potensi pembangunan daerah kedepan. Perumusan isu strategis tidak hanya menjawab akar permasalahan tetapi juga sejalan dengan sasaran pembangunan daerah dan nasional.

Isu strategis diidentifikasi dari berbagai sumber antara lain: (1) isu strategis dinamika internasional, nasional dan regional yang berpengaruh terhadap Kabupaten Solok, (2) Isu Strategis dari kebijakan pembangunan daerah jangka panjang Kabupaten Solok, (3) Isu Strategis dari kebijakan pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Solok, (4) Isu Strategis yang bersumber dari analisis situasi dan kondisi pertanian yang terjadi serta memiliki dampak bagi keberlanjutan pembangunan pertanian dan perlu diatasi secara bertahap.

1 Isu Strategis Global

Perkembangan dunia saat ini semakin pesat yang memberikan dampak terhadap suatu negara secara langsung maupun tidak langsung. Perkembangan tersebut memberikan kemudahan akses bagi seluruh Negara baik dari segi social maupun ekonomi dan politik.



Salah satu perkembangan yang paling pesat yaitu pada bidang teknologi yang bergerak dari Revolusi Industri 4.0 yang sekarang telah di canangkan Revolusi Industri 5.0. konsep Revolusi Industri 5.0 yang masih dalam tahap pengembangan dan perdebatan, tetapi secara umum mengacu pada perkembangan teknologi yang terus meningkat otomatis dan digitalisasi dalam industri dan sektor produksi. Revolusi Industri 5.0 membawa dampak signifikan bagi sektor pertanian, mengubah cara petani beroperasi dan berinteraksi dengan teknologi. Konsep ini menekankan pada integrasi manusia dan mesin, pemanfaatan kecerdasan buatan, serta fokus pada keberlanjutan dan efisiensi. Dampaknya meliputi peningkatan produktivitas, efisiensi sumber daya, dan kualitas produk, serta munculnya tantangan terkait adopsi teknologi dan kesenjangan digital. Namun apabila perkembangan ini tidak ditanggapi dengan langkah yang tepat akan menjadi boomerang bagi suatu negara jika tidak mengikuti perubahan yang ada.

Oleh karena itu isu internasional dalam perencanaan pembangunan menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Solok, beberapa isu yang menjadi perhatian bagi Pemerintah Kabupaten Solok adalah Kemajuan Teknologi Informasi dan *Sustainable Development Goals (SDG's)*.

a. Kemajuan Tekhnologi

Pada saat ini hampir seluruh manusia sangat tergantung pada tekhnologi, bahkan tekhnologi menjadi kebutuhan dasar bagi setiap orang. Tekhnologi memberikan kemudahan bagi manusia dalam melaksanakan aktifitas seperti mobilitas yang cepat, pelayanan yang lebih mudah dan cepat, peningkatan perekonomian, dan sebagainya.

Kemajuan tekhnologi disektor pertanian memberikan dampak signifikan bagi sektor pertanian. Dampaknya meliputi: (1) Peningkatan produktifitas dengan menggunakan tekhnologi seperti IoT (Internet of Things), AI dan robotika pertanian untuk mengoptimalkan proses pertanian dari penanaman sampai panen, (2) Efisiensi Sumber Daya dengan analitik prediktif dan pemantauan real time membantu petani dalam mengelola sumber daya seperti air, pupuk dan pestisida secara lebih efisien, mengurangi pemborosan dan dampak lingkungan, (3) Peningkatan kualitas produk dengan menggunakan tekhnologi seperti sensor dan drone untuk memantau kondisi tanaman secara detail, membantu petani dalam mengidentifikasi masalah dan mengambil tindakan yang tepat untuk meningkatkan kualitas panen, (4) Pertanian Presisi dengan menggunakan tekhnologi presisi untuk merawat tanaman yang sesuai dengan kebutuhannya dan menghasilkan panen yang lebih optimal, (5) Analisis data dan informasi yang disediakan oleh tekhnologi membantu petani untuk membuat keputusan yang lebih tepat terkait dengan pengelolaan lahan, pemupukan dan pengendalian hama.

Penggunaan Teknologi peternakan modern juga dapat meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan kesejahteraan hewan. Ini mencakup penggunaan sensor dan IoT seperti sensor suhu, kelembaban dan kamera yang terpasang pada ternak atau dikandang yang bertujuan untuk memantau kondisi hewan dan lingkungan secara real time, otomatisasi proses peternakan dengan



menggunakan robot atau mesin yang dirancang untuk mendistribusikan pakan secara otomatis, menghemat waktu dan tenaga kerja bioteknologi dalam peternakan seperti Inseminasi Buatan, transfer embrio dan rekayasa genetik serta analisis data untuk pemantauan, manajemen, dan pengolahan hasil peternak. Selain itu terdapat juga aplikasi peternakan digital untuk membantu peternak memantau kesehatan, produksi, inventaris, keuangan peternakan dan pemasaran produk peternakan.

Oleh karenanya Pemerintah kabupaten Solok dalam perencanaan pembangunan sangat perlu memperhatikan isu kemajuan teknologi dengan menekankan integrasi manusia dan mesin, pemanfaatan kecerdasan buatan serta focus pada keberlanjutan dan efisiensi sumber daya dan kualitas produk. Untuk mengatasi dampak negative yang dapat ditimbulkan dari kemajuan teknologi seperti pengurangan tenaga kerja yang nantinya dituangkan dalam program dan kegiatan.

b. Sustainable Development Goals (SDG's)

Konsep SDGs ini diperlukan sebagai kerangka pembangunan baru yang mengakomodasi semua perubahan yang terjadi pasca 2015-MDGs. Terutama berkaitan dengan perubahan situasi dunia sejak tahun 2000 mengenai isu depletion sumberdaya alam, kerusakan lingkungan, perubahan iklim semakin krusial, perlindungan sosial, food and energy security, dan pembangunan yang lebih berpihak pada kaum miskin. Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan agenda global yang terdiri dari 17 poin utama dan 4 pilar untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Isu-isu yang diangkat SDGs adalah pembangunan berkelanjutan atau sustainable development seperti penghapusan kemiskinan dan kelaparan, peningkatan kesehatan dan pendidikan, pemberdayaan kota yang berkelanjutan, perang melawan perubahan iklim dan perlindungan laut dan kemaritiman.

Pembangunan pertanian berkelanjutan merupakan bagian krusial dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya pada SDG 2: Tanpa Kelaparan. Tujuan ini mencakup upaya untuk mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan, meningkatkan nutrisi, dan mempromosikan pertanian berkelanjutan. Pembangunan pertanian berkelanjutan dalam konteks SDGs tidak hanya berfokus pada peningkatan produksi, tetapi juga pada kelestarian lingkungan, kesejahteraan petani, dan ketahanan pangan jangka panjang.

Pentingnya pertanian kelanjutan dalam SDGs adalah: (1) Untuk ketahanan pangan dimana pertanian berkelanjutan memastikan ketersediaan pangan yang cukup dan terjangkau untuk semua, mengurangi risiko kelaparan dan kekurangan gizi, Ketahanan pangan menjadi perhatian utama, terutama di negara-negara dengan populasi besar, karena pertumbuhan penduduk yang terus meningkat, (2) Untuk kesejahteraan petani dimana pembangunan pertanian berkelanjutan berupaya meningkatkan pendapatan dan kualitas hidup petani, terutama petani kecil melalui akses ke sumber daya, teknologi dan pasar, (3) Untuk kelestarian lingkungan dengan meminimalkan dampak negative terhadap lingkungan seperti penggunaan pestisida berlebihan dan deforestasi sertamendukung keanekaragaman hayati, (4) Adaptasi perubahan iklim dimana pertanian berkelanjutan membantu petani beradaptasi



dengan perubahan iklim seperti kekeringan dan banjir, Perubahan iklim memicu fluktuasi cuaca ekstrem seperti el Nino dan curah hujan ekstrim dapat menyebabkan kekeringan dan banjir yang merusak tanaman serta infrastruktur pertanian sehingga berdampak pada penurunan produksi dan gangguan rantai pasokan dan (5) Untuk peningkatan gizi yang berkontribusi pada peningkatan gizi masyarakat melalui produksi pangan yang beragam dan bergizi.

Oleh karena Indonesia sebagai negara yang merupakan bagian dari PBB dan masyarakat internasional memiliki komitmen dalam pencapaian SDG's yang telah disepakati dan memasukkannya dalam penyusunan perencanaan pembangunan yang nantinya akan menjadi rujukan bagi Pemerintah Daerah, khususnya Pemerintah Kabupaten Solok yang memperhatikan pencapaian SDG's dalam mewujudkan Kabupaten Solok yang maju dan sejahtera.

2. Isu Strategis Nasional

Isu-isu strategis nasional merupakan isu-isu yang memiliki potensi untuk menghambat pembangunan nasional sehingga perlu adanya antisipasi khusus dalam menghadapinya. Masih adanya isu-isu strategis nasional yang belum terselesaikan menjadi catatan tersendiri bagi pemerintah untuk berusaha lebih keras dalam menyelesaikannya. Namun yang menjadi persoalan adalah ketika isu strategis nasional belum terselesaikan dan muncul isu strategis baru yang tentu saja perlu adanya treatment khusus dalam mengantisipasinya.

a. Dampak Hilirisasi Mulai Terlihat Positif Bagi Perekonomian Indonesia

Di era hilirisasi industri yang kini menjadi skala prioritas Pemerintah di Indonesia, penanaman modal sangat penting untuk memperkuat sektor industri dan pertumbuhan perekonomian di tanah air. Berikut ini adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penanaman modal di era hilirisasi industri di Indonesia, diantaranya : Pertama, identifikasi potensi sektor industri. Sebelum memutuskan untuk menanamkan modal di wilayah NKRI, para investor perlu melakukan penelitian dan mengidentifikasi sektor industri yang memiliki potensi untuk berkembang. Beberapa sektor industri yang memiliki potensi di Indonesia antara lain agroindustri, otomotif, farmasi, dan teknologi.

Kedua, dukungan infrastruktur. Kondisi terkini terkait infrastruktur yang memadai sangat penting dalam pengembangan sektor industri. Pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk meningkatkan infrastruktur di seluruh wilayah NKRI yang terbentang dari Aceh hingga Papua, termasuk jalan tol, bandara, pelabuhan, dan stasiun kereta api. Ini akan membantu menarik lebih banyak investasi ke Indonesia dan memperkuat sektor industri.

Ketiga, regulasi dan kebijakan investasi yang jelas. Pemerintah Indonesia telah menerbitkan berbagai peraturan dan kebijakan untuk menarik minat para investor berinvestasi ke Indonesia. Investor harus memahami peraturan dan kebijakan ini agar dapat berinvestasi dengan baik dan aman.

Keempat, ketersediaan tenaga kerja yang berkualitas. Tenaga kerja yang berkualitas sangat penting dalam mengembangkan sektor industri. Investor juga perlu memperhatikan kualitas tenaga kerja



yang tersedia di Indonesia, dan mengambil langkah untuk melatih mereka jika memang dibutuhkan.

Kelima, kerjasama dengan perusahaan lokal dalam bentuk kemitraan. Kerjasama dengan perusahaan lokal dapat membantu investor untuk memahami pasar dan memperkuat posisi mereka di Indonesia. Perusahaan lokal juga dapat membantu investor mengatasi tantangan lokal yang mungkin nanti akan mereka hadapi.

Dalam rangka mengembangkan sektor industri di Indonesia, penanaman modal yang tepat dan strategis sangat penting. Dengan perhatian pada potensi sektor industri, dukungan infrastruktur, regulasi dan kebijakan investasi yang jelas, tenaga kerja yang berkualitas, dan Kerjasama dalam format kemitraan dengan perusahaan lokal, investor dapat memperkuat posisi mereka di Indonesia, dan tentu saja turut serta membantu mengembangkan sektor industri di wilayah Indonesia.

Namun demikian, hilirisasi industri juga memiliki beberapa dampak negatif, seperti peningkatan penggunaan sumber daya alam yang berpotensi merusak lingkungan, serta risiko terjadinya ketergantungan pada investor asing dalam pengembangan sektor industri. Oleh karena itu, perlu adanya regulasi yang tepat dan juga didukung dengan kebijakan strategis Pemerintah di Indonesia sehingga dapat menumbuhkan hilirisasi industri yang ramah lingkungan dan sekaligus menarik investor untuk memaksimalkan dampak positif hilirisasi industri bagi penanaman modal di Indonesia yang diiringi dengan pemerataan ekonomi yang adil, dan berkelanjutan bagi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.

Penerapan Standar Sustainability yang Tinggi di Level Global

Sustainability (berkelanjutan) yang terkait lingkungan telah menjadi indikator pasar secara global. Kalau tidak menjadi perhatian kita, bisa saja produk kita bagus tapi tidak diminati oleh pasar. Pada Tahun 2020 di China permintaan akan produk perawatan kulit berbahan alami atau produk organik terbilang tinggi. Konsumen di Korea Selatan memilih produk berkelanjutan, tidak membahayakan, dan tidak membunuh hewan dalam proses pembuatannya. Sementara itu, konsumen Jepang lebih memilih produk berkualitas tinggi dan berteknologi canggih. Kesadaran mereka akan kesehatan dan keberlanjutan meningkatkan pertumbuhan produk kecantikan alami dan organik.

Industri nasional dinilai telah mampu menerapkan Global Sustainability Standards sebagai langkah menembus pasar ekspor. Hal tersebut ditunjukkan dengan penerapan sertifikat *Indonesian Sustainable Palm Oil* (ISPO) di industri minyak kelapa sawit dan Sistem Verifikasi dan Legalitas Kayu (SVLK) untuk industri hasil hutan. Global Sustainability Standards merupakan suatu terobosan baru untuk menghadapi persaingan yang fokus pada standar berkelanjutan dan *global value chain*.

Berdasarkan data yang dirilis ISEAL Alliance, beberapa contoh manfaat sertifikasi berkelanjutan global antara lain kinerja petani di sektor kakao yang mampu meningkatkan nilai tambah sebesar 69 persen dan rata-rata hasil panen akan mencapai 687 Kg per Ha dibanding tidak tersertifikasi hanya 322 Kg per Ha.

Selanjutnya, untuk sektor kehutanan, desa-desa yang berada di kawasan Hak Pengusahaan Hutan (HPH) yang tersertifikasi akan



mendapatkan keuntungan lebih besar, seperti menurunkan polusi udara mencapai 31 persen. Selain itu, di industri kopi, tingkat keuntungan bagi perkebunan yang tersertifikasi akan membuat biaya pemeliharaan eksternal yang lebih rendah sekitar 20 persen dan meningkatkan keuntungan lebih tinggi sebesar 13 persen.

Swasembada Pangan

Swasembada pangan merupakan tujuan yang penting untuk memastikan ketersediaan pangan yang cukup, berkualitas, dan terjangkau bagi seluruh masyarakat, serta mengurangi ketergantungan pada impor pangan. Latar belakang swasembada pangan di Indonesia merujuk pada upaya negara untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakatnya secara mandiri, tanpa ketergantungan pada impor. Ketergantungan pada impor pangan menimbulkan risiko terhadap ketahanan pangan nasional, terutama dalam menghadapi volatilitas harga global dan gangguan rantai pasok dunia. Oleh karena itu dibutuhkan strategi peningkatan produktifitas dan efisiensi hulu hilir pertanian yang berbasis data dan wilayah.

Target swasembada pangan menjadi prioritas didukung oleh Kementerian Pertanian untuk meningkatkan luas tanam dan produktifitas.

3. Isu Strategis Regional

Wilayah Sumatera yang berada di pantai barat Indonesia secara geografis memiliki keunggulan komparatif berada dekat dengan jalur lintas perdagangan global yang memiliki dua pintu gerbang Selat Malaka dan Selat Sunda. Potensi besar ini secara kewilayahan belum dimanfaatkan dalam mengoptimasi pembangunan ekonomi regional Sumatera dan Indonesia. Di samping itu, pulau Sumatera memiliki keragaman sumber daya alam hayati yang cukup berlimpah dan dekat dengan jalur perdagangan dunia yang saat ini perannya didominasi negara lain di kawasan Asia Tenggara. Guna mengejar capaian PDRB per Kapita Indonesia 6-7 kali lipat dari USD 5.500 (2022) menuju USD 33.000 (2045) membutuhkan kemampuan ekonomi terutama di Sumatera sedemikian rupa.

Berbagai hambatan yang muncul kekinian dalam pembangunan ekonomi di Sumatera antara lain adalah masih terjadinya ketimpangan ekonomi antara wilayah barat dan timur Sumatera. Wilayah barat dengan geografis wilayah yang menghadap ke Samudra Hindia membutuhkan arah dan sinergi kebijakan pembangunan antar wilayah agar dapat dikembangkan selaras dengan pembangunan di Sumatera bagian timur. Kawasan Sumatera bagian timur memiliki konektifitas antar wilayah relatif lebih baik saat ini dalam pengembangan infrastruktur transportasi pembangunan untuk masa datang.

Sumatera kawasan barat pada dasarnya memiliki keunggulan sumberdaya alam maritim dan pesisir pantai dengan potensi ekonomi yang sangat besar dan perlu dikembangkan dengan konsep pembangunan kawasan. Terjadinya ketimpangan pembangunan kewilayahan di Sumatera dan juga disertai dengan potensi bencana alam baik banjir, kabut asap, gempa bumi, tsunami dan erupsi gunung berapi juga membutuhkan pengelolaan dan manajemen resiko untuk pembangunan. Berkenaan dengan hal tersebut arah



dan kebijakan jangka panjang untuk pembangunan regional Sumatera direkomendasikan sebagai wilayah “*Mata Rantai Utama Bioindustri dan Kemaritiman yang Berdaya Saing, Berkelanjutan serta Hubungan Ekonomi Biru di Kawasan Barat Indonesia.*”

Merujuk kepada konsep Rancangan Teknokratik RPJMN Tahun 2025-2029, isu strategis wilayah sumatera adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya hilirisasi komoditas unggulan daerah seperti kelapa sawit, karet,kopi dan lain-lain;
2. Belum optimalnya kualitas SDM dimana mayoritas tenaga kerja didominasi oleh lulusan pendidikan menengah ke bawah;
3. Degradasi lingkungan karena aktivitas perkebunan kelapa sawit dan pertambangan;
4. Belum meratanya akses dan kualitas pelayanan dasar seperti fasilitas kesehatan dan pendidikan terutama didaerah 3 T;
5. Masih terbatasnya kapasitas dan kualitas infrastruktur konektivitas antarwilayah;
6. Masih tingginya kerentanan dan potensi bencana terutama di pesisir barat sumatera.

4. Isu Strategis Kabupaten Solok

Isu-isu Strategis pembangunan Kabupaten Solok merupakan penegasan dari permasalahan pembangunan yang dielaborasi dengan dinamika isu-isu strategis di level internasional, nasional dan regional sumatera. Dengan mempertimbangkan aspek-aspek dalam penentuan isu-isu strategis yang telah diuraikan, sehingga dirumuskan isu strategis pembangunan jangka menengah Kabupaten Solok Tahun 2025-2029 sebagai berikut :

a. Pembangunan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing

Pembangunan SDM dititikberatkan pada penuntasan pemenuhan layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial melalui peningkatan standar hidup masyarakat. Pembangunan manusia bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia pada seluruh siklus hidup sehingga mampu melahirkan manusia sehat, cerdas, kreatif, sejahtera, resilien, unggul, dan berdaya saing.

Pembangunan kesehatan dihadapkan pada tantangan masih rendahnya cakupan dan kualitas pelayanan kesehatan dan gizi masyarakat, baik kesehatan ibu dan anak, usia sekolah, usia produktif maupun lansia. Pengendalian penyakit dan kapasitas ketahanan kesehatan juga belum optimal. Penyakit menular masih tinggi, penyakit tidak menular terus meningkat, penyakit tropis terabaikan belum dapat dieliminasi, adanya ancaman penyakit berpotensi wabah/kejadian luar biasa, dan perilaku hidup sehat belum membudaya serta belum meratanya penyediaan infrastruktur air bersih dan sanitasi. Selain itu, disparitas kapasitas sistem kesehatan terjadi di seluruh wilayah yang menyebabkan permasalahan pada kualitas pelayanan kesehatan di masyarakat.

Sementara pada bidang pendidikan masih menghadapi tantangan di antaranya, belum meratanya akses pendidikan yang menyebabkan ketimpangan partisipasi pendidikan antarwilayah dan sosial-ekonomi. Selain itu, kualitas pendidikan masih rendah antara lain disebabkan oleh sarana prasarana pendidikan yang belum



memadai, dan keterbatasan guru berkualitas yang belum terdistribusi secara merata serta belum optimalnya pembangunan dan pemeliharaan jalan menuju sarana pendidikan. Selain itu, beberapa sarana sekolah masih berada pada wilayah blank spot.

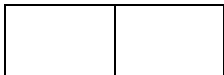
Adapun perlindungan sosial berfokus untuk meningkatkan standar hidup masyarakat dan menjaga kesinambungan kesejahteraan, khususnya untuk penduduk rentan. Tantangan yang dihadapi yaitu masih rendahnya akurasi dan integrasi program bantuan sosial, risiko bencana alam dan non alam, perubahan iklim, transisi besar lainnya, terbatasnya layanan dan pengasuhan bagi kelompok rentan, belum meratanya kesempatan kerja dan berusaha bagi penyandang disabilitas, lansia, dan kelompok rentan, serta rendahnya akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau. Sementara itu, penyelenggaraan program jaminan sosial belum optimal akibat rendahnya kepesertaan aktif dan literasi masyarakat serta program yang belum sepenuhnya konvergen memberikan perlindungan yang inklusif khususnya bagi pekerja informal dan jaminan hari tua bagi seluruh penduduk.

b. Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan

Pembangunan ekonomi jangka menengah dalam rangka peningkatan pendapatan menengah dan mengejar pertumbuhan berbasis produktivitas menghadapi berbagai isu dan tantangan struktural. Transformasi ekonomi dilakukan guna mendorong penguatan ekonomi agar menghasilkan pertumbuhan yang berkelanjutan, berdaya saing dan berkualitas. Transformasi yang dilakukan adalah transformasi struktural dari pertanian ke industrialisasi. Hal tersebut dapat dilakukan melalui hilirisasi pertanian secara optimal dengan memanfaatkan potensi dan sumber daya lokal. Saat ini Industrialisasi belum menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir, bahkan peranannya belum memberikan kontribusi yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi. Upaya pengembangan sektor industri pengolahan dihadapkan pada berbagai isu strategis, baik dari sisi penawaran (supply) seperti inefisiensi faktor produksi, kompleksitas dan nilai tambah produk yang masih rendah, struktur industri yang belum kuat, Rendahnya produktivitas tenaga kerja menjadi tantangan besar dalam memperluas kelas pendapatan menengah karena sebagian besar angkatan kerja berpendidikan menengah ke bawah dan bekerja di sektor bernilai tambah rendah.

Di sisi lain, perkembangan teknologi industri semakin masif, sehingga perlu akselerasi peningkatan kemampuan dan produktivitas tenaga kerja industri, serta kemampuan adopsi teknologi, pemanfaatan RD&D (Research, Development, and Demonstration) dan penerapan standarisasi yang masih terbatas atau pun dari sisi permintaan (demand).

Hal tersebut terjadi juga di sektor pertanian, bahkan penyerapan tenaga kerja berpendidikan menengah ke bawah pada sektor pertanian relatif tinggi. Selain itu, sektor pertanian masih memiliki tantangan untuk meningkatkan nilai tambah dan produktivitas. Hal tersebut disebabkan oleh rendahnya adopsi teknologi. Lambatnya regenerasi petani dengan belum optimal dalam melibatkan generasi milenial berperan serta dalam sektor pertanian serta degradasi kualitas lahan akibat penggunaan pupuk yang



berlebihan serta belum optimalnya penggunaan pupuk organik secara berkelanjutan. Sektor pariwisata dan ekonomi kreatif juga dihadapkan pada pengembangan dan pengelolaan pariwisata yang belum berkualitas. Salah satu faktor yang mempengaruhi kurang optimalnya pariwisata adalah infrastruktur yang belum memadai. Beberapa destinasi wisata masih sulit dijangkau karena terbatasnya aksesibilitas yang kurang memadai dan masih minimnya ketersediaan amenities. Hal ini membuat wisatawan merasa kurang nyaman untuk menikmati destinasi yang ada. Penyediaan infrastruktur yang baik dapat menunjang kemudahan akses bagi wisatawan, serta memberikan pengalaman yang lebih baik dalam berkunjung. Selain infrastruktur, masalah lainnya adalah belum optimalnya promosi pariwisata Kabupaten Solok. Masih banyak destinasi wisata di Kabupaten Solok yang belum terkelola lebih baik. Pariwisata yang berdaya saing dapat membantu meningkatkan minat dan kunjungan wisatawan ke Kabupaten Solok. Kekayaan budaya juga harus lebih dipromosikan secara intensif dan kreatif, baik di dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat maupun luar negeri.

Selain itu, kualitas pelayanan wisata di kabupaten Solok juga perlu ditingkatkan. Pelayanan yang baik dan ramah dapat memberikan pengalaman yang lebih baik bagi wisatawan selama berada di Kabupaten Solok. Kualitas SDM Pelaku usaha pariwisata juga belum optimal mengingat dilengkapi dengan sertifikat serta belum optimalnya standarisasi Clean, Health, Safety and Environment (CHSE). Sektor UMKM dan koperasi masih terkendala dalam meningkatkan kapasitasnya, terutama dari sisi permodalan dan adopsi teknologi sehingga menghambat UMKM dan koperasi untuk naik kelas. Belum kompetitifnya produk UMKM akibat SDM pelaku UMKM yang belum responsif terhadap teknologi digital serta masih perlunya diversifikasi produk UMKM yang berakibat pada pertumbuhannya yang masih rendah. Diharapkan BUMD, koperasi dan UMKM dapat bersinergi dalam mendukung pembangunan sehingga dapat lebih berdampak, inklusif, dan berkelanjutan.

Pendekatan ekonomi hijau belum mencapai posisi yang kuat. Beberapa kendala yang dihadapi di antaranya karena membutuhkan biaya dan teknologi tinggi untuk implementasinya. Percepatan digitalisasi dihadapkan pada tantangan keberagaman geografi dan karakteristik daerah yang berbeda sehingga pelaksanaannya masih perlu terus didorong secara kolaboratif.

Kesenjangan dan karakteristik antar daerah dan wilayah yang berbeda juga menyebabkan pengintegrasian ekonomi domestik masih perlu intervensi lebih jauh untuk optimalisasinya. Selain itu, rendahnya akses hunian layak yang menimbulkan permukiman kumuh. Implementasi ekonomi hijau difokuskan dalam optimalisasi pengembangan komoditas unggulan sesuai dengan potensi lokal secara berkelanjutan.

Sektor pertambangan dan penggalian juga mulai memberikan pengaruh yang cukup signifikan terhadap pengembangan ekonomi di Kabupaten Solok. Berdasarkan Buku Kabupaten Solok Dalam Angka, selama dua tahun terakhir sektor ini menduduki urutan ketujuh dari tujuh belas lapangan usaha yang memberikan kontribusi terhadap PDRB Kabupaten Solok. Potensi pertambangan yang cukup besar dipercaya akan bisa meningkatkan perekonomian



masyarakat, namun disaat yang sama aktivitas pertambangan juga akan menjadi ancaman bagi kelestarian lingkungan hidup jika perencanaan, pelaksanaan dan pengawasannya tidak dilakukan secara komprehensif dan tidak memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

c. Pemerintahan yang baik dan Berintegritas

Tata kelola merupakan konsep penting dalam diskursus pembangunan dan telah diterima secara universal sebagai elemen krusial dalam menentukan strategi pembangunan. Tata kelola tidak hanya menyangkut kemampuan pemerintah dalam mengelola sumber daya, namun juga terkait dengan bagaimana pengelolaan tersebut dilakukan secara transparan, akuntabel, inklusif, bermanfaat, serta berdampak secara sosial dan ekonomi. Transformasi tata kelola diperlukan untuk merespon munculnya kecenderungan besar (global megatrends) dan adanya perubahan lingkungan strategis di level nasional maupun regional, terutama terkait dengan revolusi teknologi informasi dan komunikasi, meningkatnya tuntutan dan kesadaran masyarakat. Selain itu, transformasi tata kelola menjadi instrumen untuk menjaga kesinambungan, konsistensi, dan sinkronisasi kebijakan pembangunan makro dan sektoral.

Namun demikian, masih terdapat berbagai persoalan tata kelola, baik yang menyangkut wilayah birokrasi, politik dan hukum. Reformasi Birokrasi masih bersifat prosedural dan administratif sehingga belum dapat mencegah terjadinya praktik praktik koruptif. Hal tersebut terlihat dari adanya kecenderungan penurunan skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) pada dua tahun terakhir. Selain itu, tumpang tindih regulasi, lemahnya pengawasan dan koordinasi antar lembaga, serta pembagian kewenangan yang belum ideal dan belum terintegrasinya layanan digital pemerintah, telah menghasilkan inefisiensi birokrasi. Intervensi politik atas birokrasi juga menjadi persoalan menonjol dalam tata kelola pemerintahan. Konteks dan lingkungan politik menjadi penentu dalam proses transformasi tata kelola.

Inpres Nomor 1 Tahun 2025 telah menginstruksikan pemerintah daerah untuk melakukan efisiensi anggaran. Penghematan anggaran terkait dengan prinsip efisiensi dan efektivitas tidak hanya dalam pelaksanaan APBD, namun yang lebih penting adalah dimulai dari hasil perencanaan yang terkoordinasi, terukur dan terarah sesuai kebutuhan daerah dan masyarakat. Program dan kegiatan yang dibiayai dengan dana APBD harus mengacu dan mempedomani visi dan misi yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2025 – 2029 yaitu mewujudkan smart government dan berintegritas dalam melayani dengan program unggulan ; peningkatan digitalisasi pelayanan publik untuk mendorong partisipasi, meningkatkan transparansi, responsive, inovatif, efektif dan efisien serta berintegritas dalam melayani masyarakat.

Penghematan anggaran daerah juga akan berdampak terhadap pencegahan adanya praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Penghematan anggaran dan pencegahan praktek tercela dalam pengelolaan anggaran diperlukan sebuah sistem baru digitalisasi pengelolaan anggaran yang dapat diakses oleh siapa pun yang membutuhkan.



d. Keamanan Daerah, Demokratisasi, dan inklusifitas, serta stabilitas ekonomi makro daerah

Dalam rangka menjamin kepastian hukum melalui pemerintahan yang efektif dan responsif maka arah kebijakan tidak terlepas dari dinamika lingkungan strategis. Dalam bidang hukum, kelembagaan dan praktik penegakan hukum belum terpadu, efisien, dan berlandaskan HAM, rendahnya kepatutan hukum masyarakat karena minimnya literasi dan pemberdayaan, serta akses terhadap keadilan yang terbatas. Dalam bidang demokrasi, belum terjaminnya kebebasan dan kesetaraan sipil, belum meratanya informasi dan komunikasi publik, serta Pancasila dan konstitusionalisme yang belum terinternalisasi. Kelembagaan demokrasi masih bersifat prosedural akibat politik uang dalam pemilu, serta belum optimalnya fungsi lembaga perwakilan. Stabilitas ekonomi makro masih menghadapi tantangan dalam 5 tahun ke depan. Secara eksternal, perlambatan ekonomi, divergensi ekonomi global, tekanan inflasi global, kebijakan suku bunga acuan higher for longer, perubahan iklim, serta tren digitalisasi. Dari sisi domestik, rendahnya penerimaan pendapatan daerah, belum optimalnya kualitas Belanja daerah.

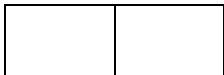
e. Ketahanan Sosial, Budaya, dan Ekologi

Keseimbangan pengakuan nilai-nilai agama, kearifan lokal, dan konservasi lingkungan menjadi dimensi dasar dalam proses pembangunan. Agama dan kebudayaan harus menjadi landasan spiritual, etika, dan moral dalam penguatan ketahanan sosial budaya dan ekologi. Dalam hal ini, sumber daya manusia berperan sebagai katalisator transformasi pembangunan dengan dukungan keluarga sebagai institusi internalisasi nilai positif dan pembangunan integritas karakter individu. Selain itu, perlu dipastikan terselenggaranya kebijakan pemerintah yang ramah gender serta inklusif bagi kelompok rentan, terutama penyandang disabilitas dan lanjut usia, untuk pemerataan pembangunan dan layanan dasar yang optimal.

Seiring dengan meningkatnya populasi, Indonesia dihadapkan pada isu penurunan kualitas lingkungan, keanekaragaman hayati, dan ketersediaan sumber daya alam. Konversi lahan hutan untuk pertanian dan perkebunan telah mengurangi fungsi lingkungan hutan. Petani dan nelayan yang merupakan produsen pangan menghadapi masalah serius berupa stagnasi kesejahteraan. Isu pengelolaan sampah juga perlu diwaspadai, mengingat daya tampung tempat pemrosesan akhir (TPA). Dampak perubahan iklim berpotensi meningkatkan kerugian ekonomi, kerentanan masyarakat, dan intensitas bencana lingkungan, terutama di sektor pertanian serta kesehatan. Akses terhadap air minum dan sanitasi yang buruk juga dapat menyebabkan timbulnya penyakit menular dan masalah pertumbuhan anak.

f. Swasembada Pangan dan Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan dan swasembada pangan ini bukanlah persoalan yang mudah, akan tetapi merupakan tantangan tersendiri menghadapi perubahan iklim dan konservasi lahan yang semakin tergerus akibat pembangunan diberbagai bidang kehidupan. Tekad dan keinginan mulia kabinet merah putih untuk mewujudkan



swasembada pangan sudah sepatutnya ditanggapi serius oleh Daerah, baik provinsi maupun kabupaten/ kota. Kabupaten Solok sebagai daerah penghasil beras kualitas terbaik atau dikenal dengan “Bareh Solok”, tentu berkeinginan yang sama dengan Pemerintah karena itu peningkatan ekonomi berbasis potensi dan sumber daya nagari sebagai salah satu misi guna mewujudkan swasembada pangan dan berbagai komoditas pertanian sebagai ikutannya.

Program unggulan strategis seperti peningkatan produksi dan hilirisasi sektor pertanian serta peningkatan infrastruktur daerah dalam rangka memperluas akses ekonomi akan mampu menerjemahkan dan menjawab keinginan besar mewujudkan swasembada dan ketahanan pangan tingkat daerah.

g. Perubahan Iklim

Perubahan iklim merupakan tantangan global yang dampaknya semakin dirasakan secara lokal, termasuk di Kabupaten Solok. Wilayah ini menghadapi risiko nyata akibat perubahan iklim yang ditandai dengan meningkatnya frekuensi bencana hidrometeorologi, seperti banjir, tanah longsor, kekeringan, dan cuaca ekstrem lainnya. Hal ini diperparah oleh kondisi geografis Kabupaten Solok yang sebagian besar berupa wilayah perbukitan dan daerah aliran sungai yang rentan terhadap bencana lingkungan.

Perubahan iklim juga berdampak langsung terhadap sektor pertanian yang merupakan tulang punggung perekonomian masyarakat. Pola tanam menjadi tidak menentu akibat perubahan musim, curah hujan yang ekstrem, dan peningkatan serangan hama serta penyakit tanaman. Situasi ini mengancam ketahanan pangan lokal dan menurunkan kesejahteraan petani.

Selain itu, terjadi penurunan kualitas dan kuantitas sumber daya air, baik untuk kebutuhan rumah tangga maupun irigasi pertanian. Penurunan tutupan hutan serta alih fungsi lahan turut memperparah kondisi ini, meningkatkan kerentanan daerah terhadap bencana dan memperbesar emisi karbon.

Kesadaran dan kapasitas masyarakat serta pemerintah daerah dalam menghadapi perubahan iklim juga masih terbatas. Perlu penguatan kebijakan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang terintegrasi dalam perencanaan pembangunan daerah. Kabupaten Solok juga memiliki potensi pengembangan energi terbarukan seperti mikrohidro dan tenaga surya yang dapat didorong sebagai bagian dari strategi pembangunan rendah karbon.

h. Kerawanan Bencana

Kabupaten Solok memiliki kondisi geografis yang rawan terhadap gempa bumi, tanah longsor, banjir, serta letusan gunung berapi (Gunung Talang dan sekitarnya). Intensitas curah hujan yang tinggi juga meningkatkan potensi banjir bandang dan tanah longsor di sejumlah kecamatan. Banyak infrastruktur publik, permukiman penduduk, serta fasilitas sosial berada pada kawasan rawan bencana, seperti daerah aliran sungai, lereng curam, dan kawasan sekitar gunung berapi. Hal ini meningkatkan potensi kerugian sosial ekonomi ketika terjadi bencana. Ketersediaan sistem peringatan dini bencana masih terbatas, sementara kapasitas masyarakat dalam kesiapsiagaan dan mitigasi bencana relatif rendah. Kesadaran dan



budaya tangguh bencana di tingkat nagari dan komunitas masih perlu diperkuat.

i. Potensi Pertambangan dan Penggalian

Kabupaten Solok memiliki potensi sumber daya alam berupa bahan galian mineral dan batuan yang dapat menjadi peluang dalam mendukung pembangunan ekonomi daerah. Potensi tersebut antara lain berupa bahan galian golongan C seperti batu kapur, batu andesit, pasir, kerikil, dan tanah urug yang tersebar di beberapa wilayah. Ketersediaan bahan galian ini membuka peluang besar untuk pengembangan sektor konstruksi, industri bahan bangunan, serta menjadi sumber pendapatan daerah melalui pajak dan retribusi pertambangan.

Namun demikian, pemanfaatan potensi pertambangan dan penggalian di Kabupaten Solok juga menyimpan sejumlah isu strategis. Pertama, kegiatan pertambangan rakyat maupun penggalian sering kali belum disertai dengan pengelolaan lingkungan yang baik, sehingga berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan, pencemaran sungai, serta meningkatkan risiko bencana seperti longsor dan banjir. Kedua, tata kelola pertambangan belum sepenuhnya optimal, ditandai dengan masih adanya aktivitas penambangan yang tidak berizin (ilegal), lemahnya pengawasan, serta belum maksimalnya kontribusi sektor ini terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Selain itu, konflik kepentingan antara pemanfaatan ruang untuk pertambangan dengan kepentingan lain, seperti pertanian, kehutanan, dan pariwisata, menjadi tantangan tersendiri. Jika tidak diatur dengan baik, potensi pertambangan justru dapat menimbulkan dampak negatif terhadap ketahanan lingkungan, keberlanjutan pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat sekitar.

5. Isu Strategis Dinas Pertanian

Isu strategis pembangunan jangka menengah Dinas Pertanian Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

a. Swasembada pangan

Swasembada pangan merupakan cita-cita nasional yang menjadi prioritas nasional untuk mencapai target pembangunan nasional. Untuk mewujudkan swasembada pangan ini bukanlah persoalan yang mudah akan tetapi merupakan tantangan tersendiri menghadapi alih fungsi lahan, perubahan iklim pengurangan tenaga kerja dan ketergantungan pada konsumsi beras yang sangat tinggi.

Kabupaten Solok sebagai daerah kawasan padi baik nasional maupun propinsi berkeinginan yang sama dengan pemerintah untuk mendukung swasembada pangan melalui ekstensifikasi dan intensifikasi.

b. Masih rendahnya produktivitas pertanian

Peningkatan produktivitas pertanian akan mempengaruhi peningkatan produksi komoditi pertanian. Untuk itu diharapkan adanya peningkatan produktifitas pertanian setiap tahunnya. Akan tetapi perkembangan produktifitas setiap tahun tidak seperti diharapkan, terjadi kondisi dimana produktifitas pertanian mengalami penurunan. Masih rendahnya produktivitas pertanian di Kabupaten Solok ini disebabkan oleh: tingginya alih fungsi lahan

--	--

pertanian, masih kurangnya bibit benih unggul, belum optimalnya penyediaan dan pemerataan sarana dan prasarana, masih terbatasnya pemanfaatan teknologi, belum optimalnya kuantitas dan kapasitas SDM, belum optimalnya penangkaran potensi lokal, masih rendahnya jangkauan pemasaran, belum optimalnya penggunaan kalender tanam, masih lemahnya pengawasan perlindungan kawasan pertanian dan peternakan, belum optimalnya pengendalian penyakit ternak dan ancaman Penyakit Hewan Menular Strategis dan Zoonosis (PHMSZ).

Dengan demikian, masih rendahnya produktifitas pertanian di Kabupaten Solok merupakan isu strategis yang memerlukan program unggulan strategis untuk peningkatan produktivitas komoditi pertanian.

c. Perubahan Iklim

Perubahan iklim dapat mengganggu keberlanjutan sektor pertanian terutama di daerah tropis yang rentan terhadap dampak perubahan iklim. Penurunan produksi pertanian karena perubahan pola curah hujan, peningkatan suhu dan cuaca ekstrem yang dapat merugikan petani. Untuk sektor peternakan dampak perubahan iklim menyebabkan berkurangnya ketersediaan pakan hijauan dan meningkatnya prevalensi penyakit hewan yang sensitive terhadap iklim seperti antraks, demam tiga hari dan parasitosis. Hal ini dapat menyebabkan penurunan produktifitas ternak dan populasi ternak.

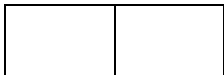
Untuk menghadapi tantangan perubahan iklim maka perlu mengembangkan strategi adaptasi yang sesuai seperti pemilihan varitas tanaman yang tahan terhadap perubahan lingkungan, penggunaan tekhnik irigasi yang efisien, menyediakan pakan yang tahan kekeringan, penyediaan sumber air yang cukup untuk ternak, pemilihan jenis ternak yang lebih tahan terhadap perubahan iklim dan penerapan praktik pertanian berkelanjutan.

Komitmen terhadap mitigasi perubahan iklim juga akan diwujudkan melalui praktek pertanian ramah lingkungan seperti system pertanian organik dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk meningkatkan kualitas ekosistem pertanian, pengembangan pakan yang lebih efisien dengan memperbaiki kualitas pakan, mengurangi emisi metana dari pencernaan ternak, memanfaatkan limbah ternak untuk biogas atau pupuk organik, pengelollan limbah ternak untuk mengurangi emisi gas metana dan menerapkan system produksi peternakan yang berkelanjutan.

d. Masih Rendahnya hilirisasi pertanian.

Sebagian besar produk pertanian masih dijual dalam bentuk segar tanpa pengolahan dan sertifikasi mutu. Hal ini menyebabkan daya saing produk rendah terutama menembus pasar modern dan ekspor antar provinsi. Pengolahan produk pertanian belum terintegrasi dengan system agribisnis. Hilirisasi dibidang pertanian tidak hanya berfokus pada peningkatan nilai tambah tetapi juga pada pengelolaan dan pemasaran yang efektif, meningkatkan produktifitas dan kualitas hasil pertanian.

Hilirisasi pertanian di Kabupaten Solok hingga saat ini masih tergolong rendah. Kondisi ini disebabkan oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Salah satu penyebab utama adalah masih kuatnya pola pikir masyarakat yang berorientasi pada usaha tani tradisional



dan berfokus pada produksi semata, tanpa mempertimbangkan nilai tambah pascapanen. Selain itu, kelembagaan pertanian di tingkat lokal belum sepenuhnya berorientasi bisnis, sehingga kurang mampu mendorong inovasi dan pengembangan produk yang kompetitif di pasar.

--	--

Tabel. 2.9. Teknik Merumuskan Isu Strategis Dinas Pertanian

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN DINAS PERTANIAN	PERMASALAHAN DINAS PERTANIAN	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN DINAS PERTANIAN	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN DINAS PERTANIAN			ISU STRATEGIS DINAS PERTANIAN
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
Sumber daya alam dan agroklimat yang sesuai untuk pertanian.	Masih rendahnya produktivitas pertanian	Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab	Sustainable Development Goals (SDG's)	Penerapan Standar Sustainability yang Tinggi di Level Global	Belum optimalnya kualitas SDM dimana mayoritas tenaga kerja didominasi oleh lulusan pendidikan menengah ke bawah	Swasembada pangan
	Masih Rendahnya hilirisasi pertanian	Penanganan perubahan iklim	Kemajuan Teknologi Informasi	Dampak Hilirisasi Mulai Terlihat Positif Bagi Perekonomian Indonesia	Belum optimalnya hilirisasi komoditas unggulan daerah	Masih rendahnya produktifitas pertanian
				Swasemba-da pangan		Perubahan iklim
						Masih rendahnya hilirisasi pertanian

Sumber: Dinas Pertanian, 2025

--	--

Isu strategis Dinas Pertanian berdasarkan hasil analisis pada berbagai permasalahan yaitu:

- 1. Swasembada pangan.
- 2. Masih rendahnya produktifitas pertanian.
- 3. Perubahan iklim.
- 4. Masih rendahnya hilirisasi pertanian.

--	--

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Berpedoman kepada tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian, maka perlu disusun Rencana Strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu tahun 2025-2029 dengan mempertimbangkan potensi, peluang, kendala dan perubahan-perubahan dilingkungan organisasi. Rencana Strategis Dinas Pertanian mencakup visi, misi, tujuan sasaran, strategi dan kebijakan yang ingin dicapai.

Sesuai dengan visi Bupati dan wakil Bupati terpilih, maka visi pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Solok tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

“TERWUJUDNYA PEMERINTAHAN YANG MELAYANI MENUJU MASYARAKAT MADANI NAN SEJAHTERA”

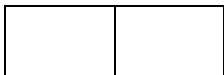
Visi ini memuat tiga kata kunci kondisi yang diharapkan lima tahun kedepan yakni : Pemerintahan yang melayani, Madani dan Sejahtera. Ketiga kata kunci tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut ;

- “Pemerintahan Yang Melayani“, dimaksudkan Penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan oleh organ-organ pemerintahan dalam menjalankan amanah sesuai dengan aturan, memberikan kemudahan, kepastian dan berintegritas dalam melayani.
- “Masyarakat madani“, dimaksudkan Pemerintah Daerah ingin mewujudkan atau membangun masyarakat yang beradab dalam membangun, menjalani, memaknai kehidupannya, taat akan agama, memiliki integritas serta menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan sesuai dengan filosofi ; “ Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah.
- “Sejahtera“, dimaksudkan masyarakat yang terbebas dari jeratan kemiskinan, kebodohan dan rasa takut sehingga memperoleh kehidupan yang aman dan tentram.

Perwujudan visi pembangunan ditempuh melalui misi untuk memberikan arah dan batasan proses pencapaian tujuan. Misi merupakan penggambaran dari visi yang harus diemban atau dilaksanakan oleh organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) dapat mengetahui dan mengenal keberadaan serta peran organisasi dalam mencapai tujuan yang ditetapkan.

Untuk dapat mewujudkan Visi Pembangunan Kabupaten Solok yang telah ditetapkan diatas, maka ditetapkan Misi pembangunan Kabupaten Solok tahun 2025-2029 sebagai berikut:

1. Mewujudkan *Smart Government* dan Berintegritas dalam Melayani
- Misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan publik dan mengoptimalkan sumber daya secara efisien. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penataan pemerintahan dan layanan berbasis digital adalah penyelenggaraan pemerintahan yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna sehingga dapat membuat



tata kelola pemerintahan lebih bersih, efektif, transparan, dan akuntabel. Selain itu, Pemerintah Daerah dapat menggunakan layanan-layanan digital yang sudah dikembangkan oleh Pemerintah Pusat maupun Provinsi sehingga nantinya tidak terdapat tumpang tindih layanan pemerintah. Dalam misi ini diharapkan juga adanya pengembangan sumber daya manusia secara digital, keamanan dan perlindungan data-data Pemerintah Daerah serta pengetahuan dan penguasaan teknologi informasi itu sendiri seperti infrastruktur jaringan, keamanan dan pengelolaan data.

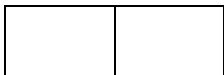
2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing Global

Misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas memiliki kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan yang baik secara fisik dan mental sehingga dapat menjadi pusat pembangunan sosial ekonomi karena memiliki kemampuan dinamis dalam melakukan kegiatan pembangunan. SDM merupakan faktor penting dalam pembangunan daerah. Tanpa SDM yang berkualitas, banyak aspek pembangunan yang akan terhambat. Peningkatan kualitas dilakukan melalui peningkatan kualitas Kesehatan dan peningkatan kualitas pendidikan terutama dalam pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Perubahan yang sangat cepat dalam perkembangan teknologi, ilmu pengetahuan dan keterampilan juga sangat cepat menuntut sumber daya manusia Kabupaten Solok mampu bersaing dan cepat menyesuaikan diri dengan perubahan itu sendiri. Kreativitas dan inovasi merupakan salah satu bagian penting dalam membangun sumber daya manusia yang unggul. Untuk menghadapi Indonesia emas tahun 2045 yang akan datang, maka sejak saat ini harus disiapkan dan dihasilkan sumber daya manusia yang tidak hanya kompetitif tetapi mampu melakukan analisis dan membangun networking dalam berbagai sektor, sehingga potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Solok dapat dimanfaatkan secara maksimal.

Selain itu, di kehidupan sosial bermasyarakat dalam rangka memperkuat jati diri dan kepribadian bangsa norma agama juga mempunyai peran yang sangat penting. Norma agama merupakan sebuah aturan dan kaidah yang berfungsi sebagai petunjuk hidup ini bersifat tidak ada keraguan karena merupakan “anugerah” langsung dari Tuhan YME. Norma agama dapat kita katakan sebagai bentuk kasih sayang Tuhan terhadap manusia, agar manusia dapat selamat dalam menjalani kehidupannya di dunia hingga menuju akhirat nanti.

Ajaran agama akan membentuk penganutnya makin peka terhadap masalah-masalah sosial yang terjadi dalam masyarakat seperti kemaksiatan, kemiskinan, keadilan, kesejahteraan dan kemanusiaan. Kepekaan ini juga akan mendorong manusia untuk tidak bisa berdiam diri menyaksikan kebatilan yang merasuki sistem kehidupan yang ada, seharusnya agama menjadi agen perubahan basis-basis nilai dan moral bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.



3. Mewujudkan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Adat dan Budaya

Misi ini bertujuan untuk memfasilitasi dan meningkatkan peran pemerintah daerah dalam sektor adat dan budaya melalui peningkatan peran Tungku Tigo Sajaringan dan Tali Tigo Sapilin yang merupakan ciri khas daerah. Pelestarian nilai-nilai adat dan budaya masyarakat sesuai dengan Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah juga merupakan salah satu tujuan dari misi ini. Setiap manusia pasti akan mendambakan kehidupan yang harmonis, tentram dan damai dalam kehidupannya. Disinilah norma-norma adat dan budaya tersebut memegang peranan yang sangat penting untuk mencapai tujuan tersebut.

Masyarakat berperan penting dalam proses pembangunan, baik sebagai pelaku maupun sebagai objek pembangunan. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapat memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan memenuhi kebutuhan nyata masyarakat dan mendorong kemajuan berkelanjutan. Partisipasi tersebut dapat dilakukan dengan cara mengidentifikasi masalah dan kebutuhan melalui musyawarah-musyawarah dalam proses perencanaan pembangunan, memberikan usulan, saran, dan informasi, memantau dan mengevaluasi proses Pembangunan, serta menyampaikan masukan, tanggapan, laporan, dan pengaduan.

4. Peningkatan Ekonomi Berbasis Potensi dan Sumber Daya Nagari

Misi ini bertujuan untuk Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Melalui Sektor-sektor unggulan dan potensi yang ada di Kabupaten Solok. Sektor unggulan tersebut diantaranya adalah sektor Pertanian, UMKM, Perdagangan dan Pariwisata yang nantinya diharapkan dapat memberi dampak langsung terhadap peningkatan pendapatan masyarakat secara umum, upaya untuk menciptakan lapangan kerja serta upaya pengurangan kemiskinan dan pemerataan pendapatan

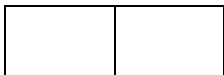
Dinas Pertanian sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya mendukung dan berperan dalam menjalankan misi ke- 4 yaitu peningkatan ekonomi berbasis potensi dan sumber daya nagari.

Pembangunan pertanian pada akhirnya harus berperan meningkatkan pemerataan pendapatan berbasis potensi lokal melalui pengembangan usaha pertanian dengan mengimplementasikan program dan kegiatan untuk mewujudkan melalui pengembangan usaha pertanian berbasis kawasan sesuai potensi wilayahnya.

3.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pertanian Tahun 2025-2029

3.1.1. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan dalam mencapai visi dan misi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis serta permasalahan pembangunan daerah yang terlihat pada hasil akhir (*final outcome*). Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara perubahan Rencana

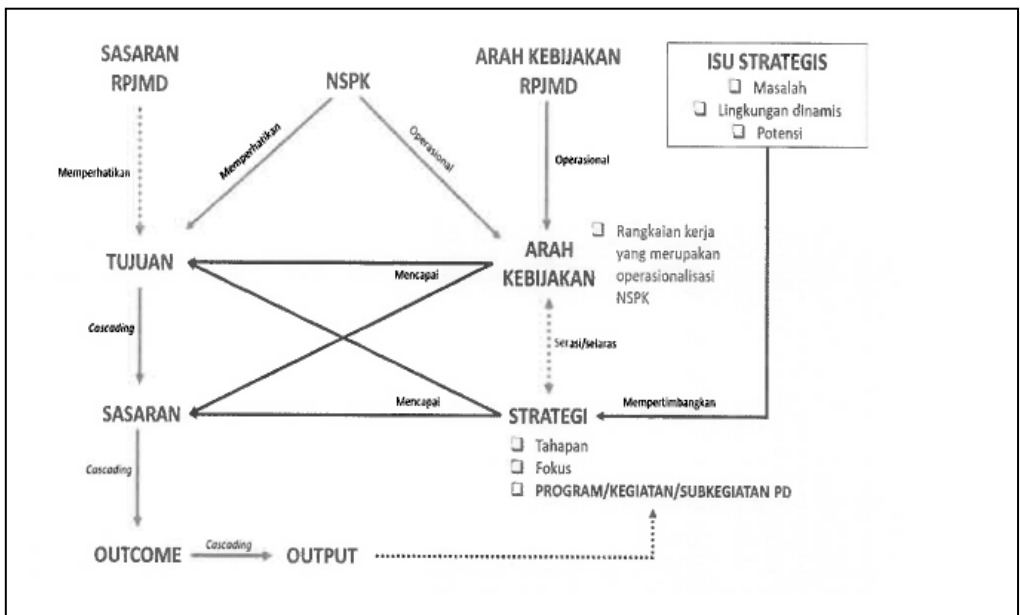


Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara *SMART* (*specific*/khusus, *measurable*/bisa diukur, *action-oriented*/memiliki orientasi pada tindakan, *realistic*/realistis dan *timely*/jelas) selama lima tahun ke depan.

Dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian 2025-2029, perlu dilakukan perumusan tujuan dan sasaran yang jelas dan terukur. Tujuan dan sasaran ini akan menjadi acuan bagi Dinas Pertanian dalam melaksanakan tugas-tugasnya dan mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan.

Gambar 3.1
Konsep Renstra Perangkat Daerah



Sumber: Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 2025

Adapun yang menjadi tujuan dari Dinas Pertanian adalah “Meningkatkan kontribusi sektor pertanian terhadap pertumbuhan ekonomi”. Untuk mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan maka Dinas Pertanian telah merumuskan sasaran yaitu:

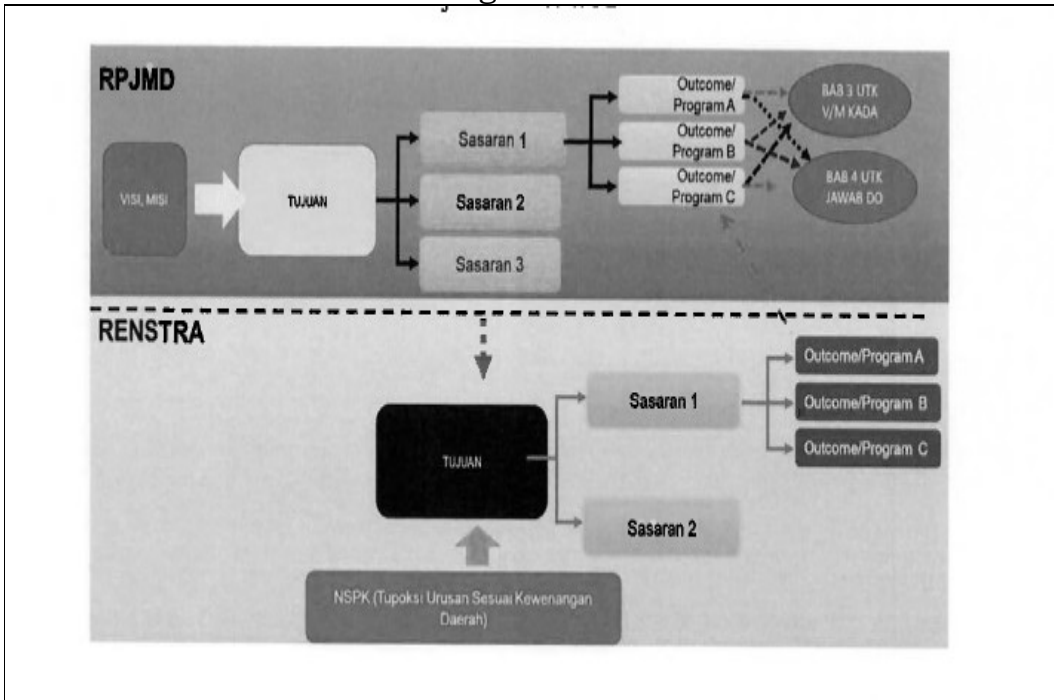
1. Meningkatnya produksi komoditi pertanian.
Sasaran peningkatan produksi komoditi pertanian yang menjadi kinerja utama adalah komoditi unggulan Kabupaten Solok yaitu padi, bawang merah, cabe merah, kentang, alpukat, manggis, durian, pisang, kakao, kopi, kulit manis, daging sapi, daging ayam buras, daging kambing dan daging itik.
2. Meningkatnya perlindungan hewan dan ternak dari Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)
3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Pertanian

Tujuan dan sasaran pembangunan pertanian mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Solok tahun 2025-2029.

VISI	MISI	TUJUAN RPJMD	SASARAN RPJMD/ TUJUAN OPD	SASARAN OPD
Terwujudnya pemerintahan yang melayani menuju masyarakat madani nan sejahtera	Peningkatan ekonomi berbasis potensi dan sumber daya nagari	Meningkatkan perekonomian masyarakat yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan berbasis potensi lokal	Sasaran RPJMD: Pemerataan pendapatan berbasis potensi lokal Tujuan OPD: Meningkatkan kontribusi sektor pertanian terhadap pertumbuhan ekonomi	1. Meningkatnya produksi komoditi 2. Meningkatnya perlindungan hewan dan ternak dari Penyakit Hewan menular Strategis (PHMS) 3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Pertanian

Sumber: Dinas Pertanian, 2025

Gambar 3.2.
Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra Perangkat Daerah



Sumber: Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 2025

Secara terperinci, tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Dinas Pertanian tahun 2025-2029 dapat dilihat pada Tabel 3.1 dibawah ini:

--	--

Tabel 3.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pertanian

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Tahun dan Target Kinerja					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Pemerataan pendapatan berbasis potensi local	Meningkatkan kontribusi sektor pertanian terhadap pertumbuhan ekonomi		PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	Juta Rupiah	4.097.002	4.209.670	4.331.329	4.462.135	4.609.386	4.774.402
		Meningkatnya produksi komoditas pertanian	Persentase peningkatan produksi komoditas pertanian	%	2,13	4,26	6,39	8,52	10,65	12,78
		Meningkatnya perlindungan hewan dan ternak dari penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)	Persentase wilayah yang terkendali penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)	%	65	68	71	74	77	80
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Pertanian	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	73,30	73,55	74,06	76,05	78,03	80,01

Sumber: Dinas Pertanian, 2025

3.1.2. Penahapan Renstra

Dalam rangka penentuan program prioritas dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan dan sasaran perangkat daerah diperlukan penahapan pembangunan per tahun. Penahapan pembangunan dapat dilihat pada tabel 3.2.

Tabel 3.2. Penahapan Renstra Dinas Pertanian

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Penguatan pembangunan infrastruktur dasar pertanian dalam mendukung pengembangan pondasi transformasi kawasan agrikultur nasional	Penguatan pembangunan infrastruktur dasar pertanian dalam mendukung pengembangan pondasi transformasi kawasan agrikultur nasional	Penguatan pembangunan infrastruktur dasar pertanian dalam mendukung pengembangan pondasi transformasi kawasan agrikultur nasional	Penguatan pembangunan infrastruktur dasar pertanian dalam mendukung pengembangan pondasi transformasi kawasan agrikultur nasional	Penguatan pembangunan infrastruktur dasar pertanian dalam mendukung pengembangan pondasi transformasi kawasan agrikultur nasional
Penguatan kolaborasi dan interaksi sektor pertanian dalam mendukung pengembangan pondasi transformasi kawasan sentra	Penguatan kolaborasi dan interaksi sektor pertanian dalam mendukung pengembangan pondasi transformasi kawasan sentra	Penguatan kolaborasi dan interaksi sektor pertanian dalam mendukung pengembangan pondasi transformasi kawasan sentra	Penguatan kolaborasi dan interaksi sektor pertanian dalam mendukung pengembangan pondasi transformasi kawasan sentra	Penguatan kolaborasi dan interaksi sektor pertanian dalam mendukung pengembangan pondasi transformasi kawasan sentra
Peningkatan SDM dengan melakukan pelatihan dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia, terutama di sektor pertanian	Peningkatan SDM dengan melakukan pelatihan dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia, terutama di sektor pertanian	Peningkatan SDM dengan melakukan pelatihan dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia, terutama di sektor pertanian	Peningkatan SDM dengan melakukan pelatihan dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia, terutama di sektor pertanian	Peningkatan SDM dengan melakukan pelatihan dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia, terutama di sektor pertanian
Meningkatkan produktivitas pertanian dengan mendorong penggunaan teknologi pertanian modern	Meningkatkan produktivitas pertanian dengan mendorong penggunaan teknologi pertanian modern	Meningkatkan produktivitas pertanian dengan mendorong penggunaan teknologi pertanian modern	Meningkatkan produktivitas pertanian dengan mendorong penggunaan teknologi pertanian modern	Meningkatkan produktivitas pertanian dengan mendorong penggunaan teknologi pertanian modern
Penyediaan bibit benih unggul	Penyediaan bibit benih unggul	Penyediaan bibit benih unggul	Penyediaan bibit benih unggul	Penyediaan bibit benih unggul
Penerapan Smart Farming	Penerapan Smart Farming	Penerapan Smart Farming	Penerapan Smart Farming	Penerapan Smart Farming



TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
Peningkatan penyediaan dan pemerataan sarana dan prasarana	Peningkatan penyediaan dan pemerataan sarana dan prasarana	Peningkatan penyediaan dan pemerataan sarana dan prasarana	Peningkatan penyediaan dan pemerataan sarana dan prasarana	Peningkatan penyediaan dan pemerataan sarana dan prasarana
Peningkatan Pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Peningkatan Pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Peningkatan Pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Peningkat-an Pengenda-lian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Peningkatan Pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner
Penggunaan Teknologi tepat guna	Penggunaan Teknologi tepat guna	Penggunaan Teknologi tepat guna	Penggunaan Teknologi tepat guna	Penggunaan Teknologi tepat guna
Peningkatan penangkaran potensi lokal	Peningkatan penangkaran potensi lokal	Peningkatan penangkaran potensi lokal	Peningkat-an penangkar-an potensi lokal	Peningkat-an penangkaran potensi lokal
Meningkatkan Pengendalian dan penanggulang-an bencana pertanian	Meningkatkan Pengendalian dan penanggula-ngan bencana pertanian	Meningkatkan Pengendalian dan penanggulang-an bencana pertanian	Meningkatkan Pengendali-an dan penanggulang-an bencana pertanian	Meningkat-kan Pengendalian dan penanggulanga n bencana pertanian
Pengembangan Industri Olahan Pertanian	Pengembang-an Industri Olahan Pertanian	Pengembang-an Industri Olahan Pertanian	Pengembang-an Industri Olahan Pertanian	Pengembang-an Industri Olahan Pertanian
Pengembangan Komoditas Unggulan	Pengembangan Komoditas Unggulan	Pengembangan Komoditas Unggulan	Pengembang-an Komoditas Unggulan	Pengembang-an Komoditas Unggulan

Sumber: Dinas Pertanian, 2025

3.2. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan pembangunan merupakan langkah-langkah yang akan diterapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Bupati Solok dan Wakil Bupati Solok. Tahapan pembangunan yang dimulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi memerlukan perubahan kearah yang lebih baik yang didasarkan kepada strategi dan arah kebijakan yang tertuang dalam dokumen perencanaan secara menyeluruh. Isu strategis pembangunan pertanian menjadi dasar dalam perumusan strategi dan arah kebijakan yang akan disusun untuk masa 5 (lima) tahun kedepan. Kondisi eksternal dan internal yang ada di Kabupaten Solok juga menjadi pertimbangan dan dasar yang perlu diperhatikan dalam perumusan strategi dan arah kebijakan.

Strategi adalah langkah- langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi diperlukan untuk memperjelas arah dan tujuan pencapaian program atau implementasinya. Strategi merupakan alat metode penghubung antara visi, misi, tujuan dan arah kebijakan. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil untuk mencapai tujuan.



Tabel 3.3. Arah kebijakan Renstra

Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra
Peningkatan Produksi Komoditas Pertanian	Peningkatan produktivitas secara masif dan perluasan sumber pertumbuhan ekonomi	Menguatkan pembangunan infrastruktur dasar pertanian dalam mendukung pengembangan pondasi transformasi kawasan agrikultur nasional
		Menguatkan kolaborasi dan interaksi sektor pertanian, perkebunan, mendukung pengembangan pondasi transformasi kawasan sentra
		Meningkatkan SDM dengan melakukan pelatihan dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia, terutama di sektor pertanian.
		Meningkatkan produktivitas pertanian dengan mendorong penggunaan teknologi pertanian modern
		Menyediakan bibit /benih unggul
	Meningkatkan Produktivitas Pertanian	Menerapkan Smart Farming
		Meningkatkan penyediaan dan pemerataan sarana dan prasarana
		Mengembangkan Komoditas Unggulan
		Meningkatkan Penggunaan Teknologi tepat guna
		Meningkatkan penangkaran potensi lokal
		Meningkatkan Pengendalian dan

Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra
		penanggulangan bencana pertanian
		Mengembangkan Industri Olahan Pertanian
	Meningkatkan Hilirisasi Pertanian	Meningkatkan kualitas kinerja, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah secara efektif
		Menguatkan pembangunan infrastruktur dasar pertanian dalam mendukung pengembangan pondasi transformasi kawasan agrikultur nasional
Peningkatan perlindungan hewan dan ternak dari Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)	Meningkatkan Produktivitas Pertanian	Meningkatkan Pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner
Peningkatan akuntabilitas kinerja Dinas Pertanian	Meningkatkan aksesibilitas, efektivitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatkan kualitas kinerja, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah secara efektif

Sumber: Dinas Pertanian, 2025

Strategi dan kebijakan pembangunan Pertanian yang dilaksanakan oleh Dinas berdasarkan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Solok dapat dilihat pada tabel 3.4 berikut :

Tabel 3.4. Tujuan , Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Visi: Terwujudnya pemerintahan yang melayani menuju masyarakat madani dan sejahtera			
Misi: Peningkatan ekonomi berbasis potensi dan sumber daya nagari			
Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi
Meningkatkan kontribusi sektor pertanian terhadap pertumbuhan ekonomi	Meningkatnya produksi komoditas pertannian	Menguatkan pembangunan infrastruktur dasar pertanian dalam mendukung pengembangan pondasi transformasi kawasan agrikultur nasional	Penguatan pembangunan infrastruktur dasar pertanian dalam mendukung pengembangan pondasi transformasi kawasan agrikultur nasional
		Menguatkan kolaborasi dan interaksi sektor pertanian, perkebunan, mendukung pengembangan pondasi transformasi kawasan sentra	Penguatan kolaborasi dan interaksi sektor pertanian, perkebunan, dalam mendukung pengembangan pondasi transformasi kawasan sentra
		Meningkatkan SDM dengan melakukan pelatihan dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia, terutama di sektor pertanian.	Peningkatan SDM dengan melakukan pelatihan dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia, terutama di sektor pertanian
		Meningkatkan produktivitas pertanian dengan mendorong penggunaan teknologi pertanian modern	Peningkatan produktivitas pertanian dengan mendorong penggunaan teknologi pertanian modern
		Menyediakan bibit /benih unggul	Penyediaan bibit/ benih unggul
		Menerapkan Smart Farming	Penerapan Smart Farming
		Meningkatkan penyediaan dan pemerataan sarana dan prasarana	Peningkatan penyediaan dan pemerataan sarana dan prasarana
		Mengembangkan Komoditas Unggulan	Pengembangan Komoditas Unggulan
		Meningkatkan	Peningkatan

--	--

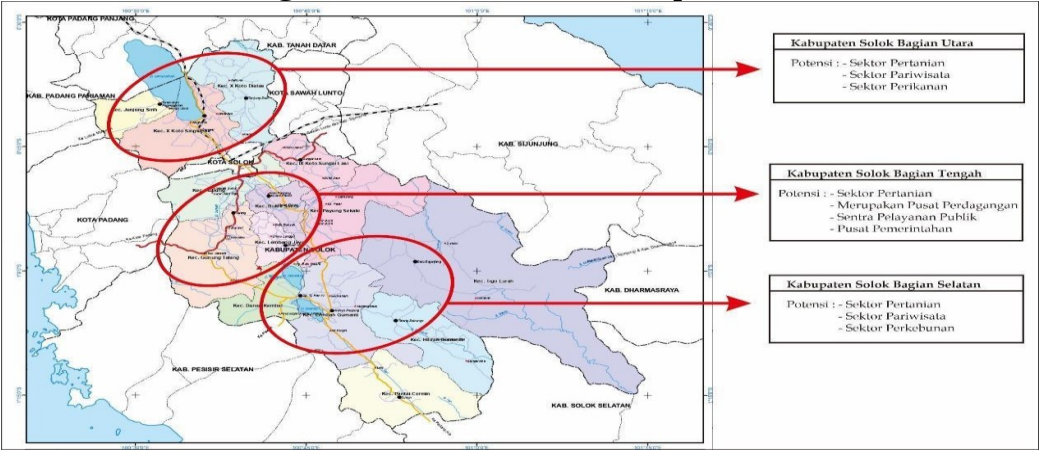
Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi
		Penggunaan Teknologi tepat guna	penggunaan Teknologi tepat guna
		Meningkatkan penangkaran potensi lokal	Peningkatan penangkaran potensi lokal
		Meningkatkan Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Meningkatkan Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian
		Mengembangkan Industri Olahan Pertanian	Pengembangan Industri Olahan Pertanian
	Meningkatnya perlindungan hewan dan ternak dari penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)	Meningkatkan Pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Peningkatan Pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Pertanian	Meningkatkan kualitas kinerja, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah secara efektif	Peningkatan kualitas kinerja, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah secara efektif

Sumber: Dinas Pertanian, 2025

3.2.1. Arah Kebijakan Pembangunan Berdimensi Kewilayahan

Arah kebijakan pembangunan di Kabupaten Solok berdasarkan RTRW Kabupaten Solok Tahun 2012-2031 wilayah dibagi menjadi tiga kawasan utama meliputi tiga kawasan utama sebagaimana gambar 3.3.

Gambar 3.3
Tiga Kawasan Utama Kabupaten Solok



Sumber : RTRW Kab. Solok Tahun 2013-2031

--	--

A. Daerah Kabupaten Solok Bagian Utara

Pada daerah bagian utara ini berpotensi untuk pengembangan sektor pertanian khususnya padi di Kecamatan X Koto Singkarak dan Kecamatan Junjung Sirih. Selain padi juga dapat dikembangkan tanaman buah-buahan seperti durian dan manggis. Untuk sektor Perkebunan dan peternakan juga dapat dikembangkan di Kecamatan X Koto Diatas.

B. Daerah Kabupaten Solok Bagian Tengah

Untuk daerah Kabupaten Solok bagian tengah meliputi Kecamatan Gunung Talang, Kecamatan Kubung dan Kecamatan Bukit Sundi, daerah ini berpotensi untuk pengembangan sektor pertanian khususnya padi. Daerah yang paling berpotensi untuk pengembangan padi adalah Kecamatan Gunung Talang, Kecamatan Kubung, Kecamatan Bukit Sundi dan Kecamatan Lembang Jaya. Selain itu pada kawasan ini juga berpotensi untuk pengembangan tanaman perkebunan, buah-buahan dan komoditi peternakan.

C. Daerah Kabupaten Solok Bagian Selatan

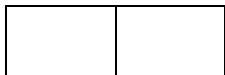
Kebijakan pembangunan pada kawasan ini meliputi sektor pertanian hortikultura dengan produknya antara lain bawang, cabe, kol dan lain-lain. Daerah yang berpotensi untuk pengembangan ini adalah Kecamatan Lembah Gumanti dan Kecamatan Danau Kembar. Selain itu pada kawasan ini juga terdapat potensi sektor perkebunan seperti kopi, teh dan lain-lain. Komoditi peternakan juga dapat dikembangkan di wilayah ini terutama ternak kerbau

3.2.2. Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Solok dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029

Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Kabupaten Solok ditetapkan sebagai bagian dari Kawasan Andalan Solok dsk (Danau Di Atas dan Danau Di Bawah, Danau Singkarak, Lubuk Alung dan Ketaping) dengan sektor unggulan pertambangan, pertanian, perkebunan, pariwisata dan industri.

Kabupaten Solok memiliki potensi wilayah di sektor pertanian (agro), dengan komoditas pertanian bahan pangan (padi) dan lainnya namun masih didistribusikan dalam bentuk bahan mentah (belum memiliki nilai tambah). Berdasarkan kondisi fisik wilayahnya, maka arah kebijakan pembangunan wilayah Kabupaten Solok yaitu :

- 1) Penataan pusat pertumbuhan ekonomi dan sistem pusat permukiman yang menunjang sistem pemasaran hasil pertanian, pelayanan pariwisata dan pelayanan dasar masyarakat, melalui :
 - meningkatkan prasarana pendukung aksesibilitas menuju Kawasan;
 - meningkatkan prasarana pendukung fungsi kegiatan ekonomi Kawasan;
 - meningkatkan konektivitas dengan Kawasan pasar atau pelayanannya.
 - menetapkan sistem pusat permukiman; dan
 - menyediakan pemenuhan kebutuhan Ruang terbuka hijau pada kawasan perkotaan paling sedikit seluas 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan, meliputi 20% (dua puluh persen) Ruang terbuka hijau publik dan 10% (sepuluh persen) Ruang terbuka hijau privat.



- 2) Pengembangan sistem jaringan prasarana wilayah yang mendukung kawasan agropolitan dan kawasan pariwisata, melalui :
 - meningkatkan akses jaringan jalan menuju kawasan agropolitan, kawasan pariwisata dan daerah terisolir;
 - mengembangkan jalan lingkar perkotaan;
 - merevitalisasi sistem angkutan kereta api;
 - mengembangkan sarana dan prasarana telekomunikasi; dan
 - mengoptimalkan jaringan irigasi.
- 3) Pengelolaan wilayah yang memperhatikan daya dukung dan daya tampung lahan dan aspek konservasi sumber daya alam, melalui :
 - mengembangkan ruang terbuka hijau, tempat evakuasi bencana, dan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
 - melestarikan sumber air dan mengembangkan sistem cadangan air untuk musim kemarau; dan
 - memelihara kawasan peninggalan sejarah dan situs budaya sebagai objek penelitian dan pariwisata.
- 4) Pengembangan wilayah berbasis konsep agropolitan, melalui :
 - menyusun kajian pengembangan kawasan agropolitan;
 - menetapkan kawasan agropolitan; dan
 - mengembangkan infrastruktur pendukung kawasan agropolitan.
- 5) Pengendalian kawasan pertanian pangan berkelanjutan secara ketat, melalui :
 - menetapkan kawasan pertanian pangan berkelanjutan;
 - mengoptimalkan kawasan pertanian pangan berkelanjutan;
 - meminimalisir alih fungsi lahan pertanian, lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan; dan
 - mengembangkan sawah baru pada lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan.
- 6) Pengembangan kawasan pariwisata terpadu berbasis potensi alam, melalui :
 - mengembangkan kawasan obyek wisata unggulan;
 - mengembangkan zona wisata terpadu di bagian utara dan selatan kabupaten; dan
 - mengembangkan sarana dan prasarana penunjang kepariwisataan.
- 7) Pengembangan kawasan budi daya dengan menumbuhkan kearifan lokal dan memperhatikan aspek ekologis, melalui :
 - mengendalikan pengelolaan kawasan hutan produksi dan kawasan perkebunan;
 - mengembangkan perkebunan dan pertanian secara terpadu; dan
 - mengembangkan dan memberdayakan industri besar, industri kecil dan industri rumah tangga.
- 8) Pengembangan dan pengendalian Kawasan Strategis, melalui :
 - menetapkan Kawasan Strategis sesuai dengan nilai strategis dan kekhususannya;
 - mengembangkan prasarana dan sarana penunjang kegiatan perekonomian;
 - membatasi alih fungsi lahan Kawasan strategis pada sentra



- unggulan berbasis potensi pertanian; dan
- menetapkan, mengembangkan, dan mempertahankan Kawasan agropolitan.

Kabupaten Solok perlu mengembangkan ekonominya di sektor pertanian secara luas, baik di pertanian, perkebunan, maupun peternakan.

--	--

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Program, Kegiatan dan Subkegiatan Dinas Pertanian

Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Sedangkan kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program. Program dan kegiatan dilaksanakan dalam rangka mendukung pencapaian dari masing-masing misi pembangunan kepala daerah dan dilengkapi dengan indikator capaian yang terukur dan kerangka pendanaan untuk lima tahun kedepan.

Rencana program dan kegiatan untuk tahun 2025–2029 dalam rangka pembangunan pertanian Kabupaten Solok, akan terus berlanjut dan diprioritaskan sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Solok serta sesuai dengan misi Bupati dan Wakil Bupati Solok Periode 2025-2029. Dalam rangka mengoptimalkan prioritas pembangunan tersebut diatas maka perlu menetapkan program, kegiatan, sub kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Dinas Pertanian.

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan, baik kuantitatif maupun kualitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkat yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi, baik kinerja input, proses, output, outcomes maupun impacts sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan.

Program pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Solok terdiri dari:

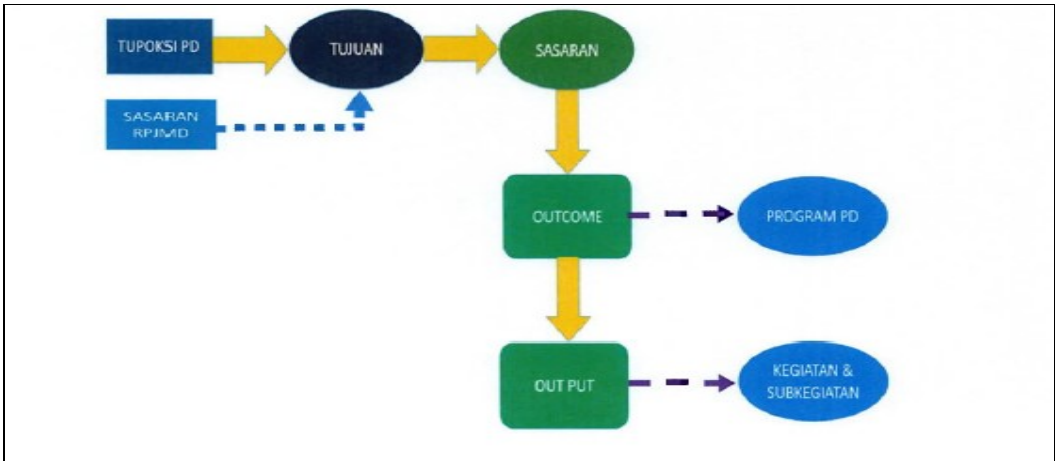
1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota
2. Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian
3. Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian
4. Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner
5. Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian
6. Program penyuluhan pertanian

Selain dari program pembangunan daerah, untuk pencapaian kinerja Dinas Pertanian juga didukung dari program pusat Kementerian Pertanian yang sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang akan dilaksanakan dengan melalui pendekatan tugas dan fungsi Kementerian Pertanian.

Kerangka perumusan program/kegiatan/subkegiatan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian Kabupaten Solok 2025-2029 dapat dilihat pada gambar 4.1.



Gambar 4.1
 Kerangka Perumusan Pogram/Kegiatan/Subkegiatan Rencana
 Strategis (Renstra) Dinas Pertanian



Sumber: Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 2025

Dalam mewujudkan pelayanan publik sektor pertanian yang prima di tingkat kecamatan dan kabupaten, peningkatan kinerja, pengelolaan Keuangan dan aset daerah yang didukung oleh aparatur yang profesional, penguatan sistem agribisnis yang efisien, aman dan berkelanjutan, dan komoditas lokal bernilai tambah,dan berdaya saing akan dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan pada program pembangunan daerah sebagai berikut:

NO	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
1	2	3
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Layanan kesekretariatan
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu
2	Kegiatan Administrasi keuangan perangkat daerah	Persentase pemenuhan adminstrasi keuangan dan pelaporan keuangan tepat waktu
3	Kegiatan: Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat daerah	Persentase Pemenuhan administrasi barang milik daerah
4	Kegiatan: Administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah
5	Kegiatan: Administrasi umum perangkat daerah	Persentase pemenuhan Sarana Prasarana dan

NO	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
		Pelayanan Administrasi Perkantoran
6	Kegiatan Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan yang disediakan
7	Kegiatan penyediaan Barang Milik daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik daerah
8	Kegiatan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase Penyediaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
II	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Peningkatan Produksi tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan perkebunan
9	Kegiatan Pengawasan penggunaan Sarana Pertanian	Persentase pengawasan penggunaan sarana pertanian
10	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG)Hewan,Tumbuhan,dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase SDG hewan dan tumbuhan yang dikelola dan dimanfaatkan
11	Kegiatan Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak Serta Pakan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan penggunaan benih/bibit unggul dan pakan ternak berkualitas
12	Kegiatan: Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer	Peningkatan pengawasan obat hewan
13	Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak
14	Kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumber dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Persentase peningkatan populasi ternak sapi
III	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Cakupan luas lahan pertanian yang ditetapkan menjadi LP2B

--	--

NO	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
		Persentase Peningkatan penyediaan prasarana pertanian
15	Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Peningkatan Indeks Pertanaman
16	Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah prasarana pertanian yang dibangun/direhab
17	Kegiatan: Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak
18	Kegiatan pengembangan lahan penggembalaan umum	Luas lahan penggembalaan ternak
IV	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan dan Kesehatan masyarakat Veteriner	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)
		Persentase Usaha Pangan Asal Hewan yang memiliki sertifikat pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner)
19	Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten /Kota	Persentase kasus Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) yang dapat ditangani
20	Kegiatan: Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota
21	Kegiatan Pengelolaan Pelayanan jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner Dalam Daerah Kabupaten/kota	Persentase peningkatan pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner dalam daerah kabupaten/kota
22	Kegiatan: Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner

--	--

NO	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
23	Kegiatan: Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	Persentase pelaksanaan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan
V	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase Penanganan Bencana Pertanian
		Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim terhadap pertanian
24	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Persentase pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) Tanaman pangan, Hortikultura dan perkebunan
VI	Program Penyuluhan Pertanian	Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang ditingkatkan
		Persentase kelembagaan koperasi tani yang dibentuk dan beroperasi
25	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Persentase Pelaksanaan Penyuluh Pertanian

Sumber: Dinas Pertanian, 2025

Sumber daya manusia dan sumber daya alam merupakan factor penentu pembangunan pertanian sektor tanaman pangan dan hortikultura. Tercapainya pembangunan perlu ditentukan kelompok sasaran berdasarkan kawasan / wilayah / lokasi, SDA, SDM .

Pelaksanaan pembangunan pertanian di Kabupaten Solok diarahkan pada kawasan pengembangan komoditi unggulan. Untuk menindaklanjuti keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 521-849-2019 tentang penetapan Kawasan pertanian Pangan, Hortikultura dan perkebunan Propinsi Sumatera Barat maka Bupati Solok menetapkan kawasan pertanian Kabupaten Solok dengan Keputusan Bupati Solok No. 520-232-2020 tanggal 3 April 2020 tentang Penetapan Kawasan Pertanian di Kabupaten Solok.

Penetapan Kawasan Pertanian di Kabupaten Solok:

A. KAWASAN PERTANIAN TANAMAN PANGAN

No	KAWASAN	KECAMATAN
I	TANAMAN PADI	
1	Kawasan Gunung Talang	Gunung Talang, Kubung
2	Kawasan Bukit Sundi	Bukit Sundi, Lembang Jaya, Payung Sekaki
3	Kawasan Singkarak	Junjung Sirih, X Koto

--	--

		Singkarak, X Koto Diatas, IX Koto Sungai Lasi
4	Kawasan Pantai Cermin	Pantai Cermin, Hiliran Gumanti, Tigo Lurah
5	Kawasan Pertanian Organik	Gunung Talang, Hiliran Gumanti, Tigo Lurah, Kubung
II	TANAMAN UBI JALAR	
5	Kawasan Lembang Jaya	Lembang Jaya, Danau kembar, Lembah Gumanti

B. KAWASAN PERTANIAN HORTIKULTURA

No	KAWASAN	KECAMATAN
I	TANAMAN PISANG	
1	Kawasan Guguak	Gunung Talang, Kubung, IX Koto Sungai Lasi
II	TANAMAN MANGGIS	
1	Kawasan Talang Babungo	Hiliran Gumanti, Tigo Lurah
2	Kawasan Sungai Lasi	IX Koto Sungai Lasi, Kubung X Koto Diatas
II	TANAMAN DURIAN	
1	Kawasan Aripan	X Koto Diatas, X Koto Singkarak, Junjung Sirih
2	Kawasan Lurah Nan Tigo	Kubung, Bukit Sundi, IX Koto Sungai Lasi
III	TANAMAN ALPUKAT	
1	Kawasan Koto Gaek	Gunung Talang, Kubung, IX Koto Sungai Lasi
IV	TANAMAN ANEKA CABAI	
1	Kawasan Danau Kembar	Lembang Jaya, Danau Kembar, Gunung Talang
V	TANAMAN ANEKA BAWANG	
1	Kawasan Solok Sakato	Lembah Gumanti, Lembang Jaya, Danau Kembar
VI	TANAMAN HIAS (Krisan)	
1	Kawasan Arosuka	Gunung Talang
VII	TANAMAN SAYUR LAINNYA	
1	Kawasan Alahan Panjang	Lembah Gumanti, Lembang Jaya, Danau Kembar
VIII	KAWASAN MARKISA	



1	Kawasan Lembah Gumanti	Lembah Gumanti, Danau Kembar, Lembang Jaya
---	------------------------	--

C. KAWASAN PERTANIAN PERKEBUNAN

No	KAWASAN	KECAMATAN
I	TANAMAN KOPI	
1.	Kawasan Surian	Pantai Cermin
2.	Kawasan Aia Dingin	Danau Kembar, Lembah Gumanti, Hiliran Gumanti
3	Kawasan Danau Tuo	X Koto Singkarak, Junjung Sirih, X Koto Diatas
4	Kawasan Batu Bajanjang	Tigo Lurah Lembang Jaya, Gunung Talang,
II	TANAMAN KAKAO	
1	Kawasan Selayo	Kubung, IX Koto Sungai Lasi
2	Kawasan Payung Sekaki	Bukit Sundi, Payung Sekaki, Tigo Lurah
3	Kawasan Singkarak	X Koto Singkarak, X Koto Diatas
II	TANAMAN KARET	
1	Kawasan Bukit Tandang	Bukit Sundi, Kubung, Payung Sekaki
2	Kawasan Tanjung Alai	X Koto Singkarak, X Koto Diatas
III	TANAMAN KELAPA	
1	Kawasan Paninggahan	Junjung Sirih, X Koto Singkarak, X Koto Diatas
2	Kawasan Cupak	Gunung Talang, Kubung, Bukit Sundi
IV	TANAMAN CENGKEH	
1	Kawasan Tanjung Balik	X Koto Diatas, X Koto Singkarak, Junjung Sirih
2	Kawasan Koto Anau	Lembang Jaya, Gunung Talang, Bukit Sundi, Kubung
V	TANAMAN TEH	
1	Kawasan Aia Batumbuak	Gunung Talang, Danau Kembar
VI	TANAMAN SEREH WANGI	
1	Kawasan Dilam	Bukit Sundi, Gunung Talang

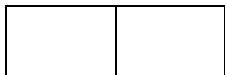
--	--

D. KAWASAN PETERNAKAN

No	KAWASAN	KECAMATAN
1	Kawasan Sentra Peternakan Sapi Potong/Sapi PO	Lembang Jaya, Lembah Gumanti, X Koto Singkarak
2	Kawasan Sentra Peternakan Sapi Potong/Sapi Simental	Lembang Jaya, Bukit Sundi
3	Kawasan Sentra Peternakan Kerbau	Lembah Gumanti, X Koto Diatas, X Koto Singkarak
4	Kawasan Sentra Peternakan Itik	Kubung, Bukit Sundi
5	Kawasan Sentra Peternakan Aneka Ternak (Kelinci, Puyuh)	Lembang Jaya, Danau Kembar, Lembah Gumanti, Kubung, Pantai cermin
6	Kawasan Sentra Peternakan Kambing	X Koto Diatas, X Koto Singkarak, Junjung Sirih, Kubung, IX Koto Sungai Lasi, Bukit Sundi

Terkait pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pertanian, maka dalam Renstra Dinas Pertanian Tahun 2025-2029 ditetapkan sebanyak 6 program dan 25 kegiatan. Untuk mendukung pencapaian target kinerja pada Renstra tersebut, maka perlu dukungan anggaran. Adapun jumlah total anggaran yang dibutuhkan selama 6 tahun adalah sebesar Rp. 160.806.565.952,- dengan rincian alokasi anggaran pertahun perprogram dapat dilihat pada tabel 4.1. dan teknik merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian Kabupaten Solok 2025-2029 tersaji dalam tabel 4.2.

Secara rinci Program dan Kegiatan serta kebutuhan anggaran untuk kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pertanian selama 5 (lima) tahun dengan rincian program dan kegiatan serta pendanaan dapat dilihat pada tabel 4.3. dan rincian sub kegiatan prioritas dalam mendukung program prioritas pembangunan daerah dapat dilihat pada tabel 4.4 berikut:



Tabel 4.1. Program Dinas Pertanian Kabupaten Solok

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN					27.251.371.224		33.325.641.457		33.367.248.520		33.409.691.660		33.452.613.091	
3.27.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA					15.987.171.224		15.936.441.457		15.955.048.520		15.975.491.660		15.996.413.091	
Meningkatnya layanan administrasi kesekretariatan	Persentase pemenuhan layanan kesekretariat- an (%)	100	100	100	15.987.171.224	100	15.936.441.457	100	15.955.048.520	100	15.975.491.660	100	15.996.413.091	Dinas /Badan yang menangani Bidang Pertanian
3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANG- AN SARANA PERTANIAN					1.600.000.000		3.725.000.000		3.748.000.000		3.770.000.000		3.792.000.000	
Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (%)	-14,12	2	2	1.600.000.000	2	3.725.000.000	2	3.748.000.000	2	3.770.000.000	2	3.792.000.000	Dinas /Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Peningkatan Produksi Hortikultura (%)	-2,96	2	2		2		2		2		Dinas /Badan yang menangani Bidang Pertanian		
	Peningkatan Produksi Komoditas Petrnakan (%)	7,73	2	2		2		2		2		2		Dinas /Badan yang menangani Bidang Pertanian

--	--

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Peningkatan produksi tanaman perkebunan (%)	22,51	2,5	2,5		2,5		2,5		2,5		2,5		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANG-AN PRASARANA PERTANIAN					4.000.000.000		8.000.000.000		8.000.000.000		8.000.000.000		8.000.000.000	
Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian	cakupan luas lahan pertanian yang ditetapkan menjadi LP2B (%)	90,16	90,16	90,16	4.000.000.000	90,16	8.000.000.000	90,16	8.000.000.000	90,16	8.000.000.000	90,16	8.000.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Persentase peningkatan penyediaan prasarana pertanian (%)	19,46	5	5				5				5		
3.27.04 - PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER					1.400.000.000		1.400.000.000		1.400.000.000		1.400.000.000		1.400.000.000	
Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	tingkat pengendalian penyakit hewan menular strategis (PHMS) (%)	20	20	20	1.400.000.000	20	1.400.000.000	20	1.400.000.000	20	1.400.000.000	20	1.400.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian

--	--

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner) (%)	6	7	8		9		10		11		12		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
3.27.05 - PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANG AN BENCANA PERTANIAN					264.200.000		264.200.000		264.200.000		264.200.000		264.200.000	
Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Persentase Penanganan Bencana Pertanian (%)	41,1	42	42	264.200.000	42	264.200.000	42	264.200.000	42	264.200.000	42	264.200.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim Terhadap Pertanian (%)	88	89	89		89		89		89		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian		
3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN					4.000.000.000		4.000.000.000		4.000.000.000		4.000.000.000		4.000.000.000	
Meningkatnya SDM Bidang Penyuluhan Pertanian	Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan (%)	-	5	5	4.000.000.000	5	4.000.000.000	5	4.000.000.000	5	4.000.000.000	5	4.000.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Persentase Kelembagaan Koperasi Tani yang Dibentuk dan Beroperasi (%)	-	5	5		5		5		5		5		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
TOTAL KESELURUHAN					27.251.371.224		33.325.641.457		33.367.248.520		33.409.691.660		33.452.613.091	

Sumber: Dinas Pertanian, 2025

--	--

Tabel 4.2. Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Solok

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
3.27.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pertanian							
Meningkatnya pemerataan pendapatan berbasis potensi lokal	Meningkatkan kontribusi sektor pertanian terhadap pertumbuhan ekonomi				PDRB sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (Juta Rupiah)		
		Meningkatnya produksi komoditas pertanian			Persentase peningkatan produksi komoditas pertanian (%)		
			Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (%)	3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	
					Peningkatan Produksi Hortikultura (%)	3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	
					Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan (%)	3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	

--	--

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Peningkatan produksi tanaman perkebunan (%)	3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	
				Persentase Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Batang yang diperbanyak (Batang)	3.27.02.2.01 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	
					Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang (Batang)	3.27.02.2.01 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	
					Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian (Laporan)	3.27.02.2.01 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	
					Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen hortikultura (Laporan)	3.27.02.2.01 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	
					Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen Perkebunan (Laporan)	3.27.02.2.01 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	
					Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen tanaman pangan (Laporan)	3.27.02.2.01 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	
					Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan	3.27.02.2.01 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	

--	--

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi (Laporan)		
					Jumlah pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil hortikultura (Laporan)	3.27.02.2.01 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	
					Jumlah pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil Perkebunan (Laporan)	3.27.02.2.01 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	
					Jumlah pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil tanaman pangan (Laporan)	3.27.02.2.01 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	
					Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi (Laporan)	3.27.02.2.01.0001 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	
					Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian (Laporan)	3.27.02.2.01.0002 - Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	
					Jumlah pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil tanaman pangan (Laporan)	3.27.02.2.01.0005 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Tanaman	

--	--

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
						Pangan	
					Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen Perkebunan (Laporan)	3.27.02.2.01.0006 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Perkebunan	
					Jumlah pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil hortikultura (Laporan)	3.27.02.2.01.0007 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Hortikultura	
					Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang (Batang)	3.27.02.2.01.0008 - Perbanyak Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang	
					Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Batang yang diperbanyak (Batang)	3.27.02.2.01.0009 - Perbanyak Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang	
					Jumlah pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil Perkebunan (Laporan)	3.27.02.2.01.0012 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Perkebunan	
					Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen tanaman pangan (Laporan)	3.27.02.2.01.0014 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Tanaman Pangan	

--	--

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen hortikultura (Laporan)	3.27.02.2.01.0016 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Hortikultura	
				Persentase Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan dan Tumbuhan yang dikelola dan dimanfaatkan	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman (Dokumen)	3.27.02.2.02 - Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman (Dokumen)	3.27.02.2.02 - Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah SDG hewan yang dilakukan pelestarian dan pemurnian (laporan)	3.27.02.2.02 - Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	

--	--

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian (Varietas Unggul Baru (VUB))	3.27.02.2.02 - Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman (Dokumen)	3.27.02.2.02.0002 - Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	
					Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman (Dokumen)	3.27.02.2.02.0003 - Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	
					Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian (Varietas Unggul Baru (VUB))	3.27.02.2.02.0004 - Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman	
					Jumlah SDG hewan yang dilakukan pelestarian dan pemurnian (laporan)	3.27.02.2.02.0005 - Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan	
				Persentase peningkatan penggunaan benih/bibit unggul dan pakan ternak yang berkualitas	Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang Beredar (Laporan)	3.27.02.2.03 - Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	

--	--

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil (Laporan)	3.27.02.2.03 - Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil (Laporan)	3.27.02.2.03.0001 - Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	
					Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang Beredar (Laporan)	3.27.02.2.03.0002 - Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	
				Persentase pengawasan obat hewan ditingkat pengecer	Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar (Laporan)	3.27.02.2.04 - Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer	
					Jumlah Penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan yang Ditindak (Kasus)	3.27.02.2.04 - Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer	
					Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar (Laporan)	3.27.02.2.04.0001 - Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan	

--	--

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
						Peredaran Obat Hewan	
					Jumlah Penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan yang Ditindak (Kasus)	3.27.02.2.04.0002 - Penindakan atas Penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan	
				Persentase Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih / Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia (Laporan)	3.27.02.2.05 - Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah pengawasan peredaran benih/bibit ternak yang beredar dan bersertifikat (Laporan)	3.27.02.2.05 - Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	

--	--

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan (Laporan)	3.27.02.2.05 - Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan (Laporan)	3.27.02.2.05.0006 - Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	
					Jumlah pengawasan peredaran benih/bibit ternak yang beredar dan bersertifikat (Laporan)	3.27.02.2.05.0007 - Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak	
					Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia (Laporan)	3.27.02.2.05.0009 - Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	
				Persentase peningkatan populasi ternak	Jumlah benih ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain (Dosis)	3.27.02.2.06 - Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah	

--	--

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
						Kabupaten/Kota Lain	
					Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain (Ekor)	3.27.02.2.06 - Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	
					Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain (Ekor)	3.27.02.2.06.0003 - Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	
					Jumlah benih ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain (Dosis)	3.27.02.2.06.0004 - Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	
			Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian		cakupan luas lahan pertanian yang ditetapkan menjadi LP2B (%)	3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	

--	--

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Persentase peningkatan penyediaan prasarana pertanian (%)	3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	
				Persentase prasarana pertanian yang dikembangkan	Jumlah Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian (Dokumen)	3.27.03.2.01 - Pengembangan Prasarana Pertanian	
					Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya (Laporan)	3.27.03.2.01 - Pengembangan Prasarana Pertanian	
					Jumlah pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan (Unit)	3.27.03.2.01 - Pengembangan Prasarana Pertanian	
					Jumlah prasarana pascapanen hortikultura yang dikendalikan dan dimanfaatkan (Unit)	3.27.03.2.01 - Pengembangan Prasarana Pertanian	
					Jumlah prasarana pascapanen perkebunan yang dikendalikan dan dimanfaatkan (Unit)	3.27.03.2.01 - Pengembangan Prasarana Pertanian	
					Jumlah prasarana pascapanen tanaman pangan yang dikendalikan dan dimanfaatkan (Unit)	3.27.03.2.01 - Pengembangan Prasarana Pertanian	

--	--

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah prasarana pengolahan hasil hortikultura yang dikendalikan dan dimanfaatkan (Unit)	3.27.03.2.01 - Pengembangan Prasarana Pertanian	
					Jumlah prasarana pengolahan hasil perkebunan yang dikendalikan dan dimanfaatkan (Unit)	3.27.03.2.01 - Pengembangan Prasarana Pertanian	
					Jumlah prasarana pengolahan hasil tanaman pangan yang dikendalikan dan dimanfaatkan (Unit)	3.27.03.2.01 - Pengembangan Prasarana Pertanian	
					Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola (Dokumen)	3.27.03.2.01 - Pengembangan Prasarana Pertanian	
					Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Dokumen)	3.27.03.2.01 - Pengembangan Prasarana Pertanian	
					Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B (Dokumen)	3.27.03.2.01 - Pengembangan Prasarana Pertanian	

--	--

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya (Laporan)	3.27.03.2.01.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	
					Jumlah prasarana pascapanen tanaman pangan yang dikendalikan dan dimanfaatkan (Unit)	3.27.03.2.01.0006 - Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Tanaman Pangan	
					Jumlah prasarana pascapanen perkebunan yang dikendalikan dan dimanfaatkan (Unit)	3.27.03.2.01.0007 - Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Perkebunan	
					Jumlah prasarana pascapanen hortikultura yang dikendalikan dan dimanfaatkan (Unit)	3.27.03.2.01.0008 - Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Hortikultura	
					Jumlah pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan (Unit)	3.27.03.2.01.0010 - Peningkatan pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan	
					Jumlah prasarana pengolahan hasil hortikultura yang dikendalikan dan dimanfaatkan (Unit)	3.27.03.2.01.0011 - Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Hortikultura	

--	--

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah prasarana pengolahan hasil tanaman pangan yang dikendalikan dan dimanfaatkan (Unit)	3.27.03.2.01.0012 - Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan	
					Jumlah prasarana pengolahan hasil perkebunan yang dikendalikan dan dimanfaatkan (Unit)	3.27.03.2.01.0013 - Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Perkebunan	
					Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Dokumen)	3.27.03.2.01.0014 - Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan secara numerik dan spasial di Kabupaten/Kota	
					Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola (Dokumen)	3.27.03.2.01.0015 - Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota	

--	--

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B (Dokumen)	3.27.03.2.01.0016 - Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota	
					Jumlah Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian (Dokumen)	3.27.03.2.01.0017 - Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian	
				Jumlah prasarana pertanian yang dibangun/ direhab	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	3.27.03.2.02 - Pembangunan Prasarana Pertanian	
					Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	3.27.03.2.02 - Pembangunan Prasarana Pertanian	
					Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	3.27.03.2.02 - Pembangunan Prasarana Pertanian	
					Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	3.27.03.2.02 - Pembangunan Prasarana Pertanian	
					Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang	3.27.03.2.02 - Pembangunan	

--	--

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					direhabilitasi (Unit)	Prasarana Pertanian	
					Jumlah Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara (Unit)	3.27.03.2.02 - Pembangunan Prasarana Pertanian	
					Jumlah Pintu Air yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	3.27.03.2.02 - Pembangunan Prasarana Pertanian	
					Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	3.27.03.2.02 - Pembangunan Prasarana Pertanian	
					Jumlah Puskesmas yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi (Unit)	3.27.03.2.02 - Pembangunan Prasarana Pertanian	
					Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi (Unit)	3.27.03.2.02 - Pembangunan Prasarana Pertanian	
					Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	3.27.03.2.02.0002 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	
					Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	3.27.03.2.02.0003 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan	

--	--

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
						Usaha Tani	
					Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	3.27.03.2.02.0004 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	
					Jumlah Pintu Air yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	3.27.03.2.02.0006 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air	
					Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	3.27.03.2.02.0008 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	
					Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	3.27.03.2.02.0009 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	
					Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi (Unit)	3.27.03.2.02.0010 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	

--	--

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara (Unit)	3.27.03.2.02.0012 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	
					Jumlah Puskesmas yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi (Unit)	3.27.03.2.02.0014 - Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Puskesmas	
					Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi (Unit)	3.27.03.2.02.0015 - Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan	
				Persentase Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Jumlah Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak (Laporan)	3.27.03.2.03 - Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota	
					Jumlah Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Dilestarikan dan	3.27.03.2.03 - Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan	

--	--

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Dimanfaatkan (Laporan)	Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota	
					Jumlah Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Dilestarikan dan Dimanfaatkan (Laporan)	3.27.03.2.03.0001 - Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	
					Jumlah Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak (Laporan)	3.27.03.2.03.0002 - Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	
				Luas lahan penggembalaan ternak yang dikembangkan	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Lahan Penggembalaan Umum (Laporan)	3.27.03.2.04 - Pengembangan Lahan Penggembalaan Umum	
					Luas Lahan Penggembalaan Umum yang Diidentifikasi dan Ditetapkan (Ha)	3.27.03.2.04 - Pengembangan Lahan Penggembalaan Umum	
					Luas Lahan Penggembalaan Umum yang Dikelola (Ha)	3.27.03.2.04 - Pengembangan Lahan Penggembalaan Umum	
					Luas Lahan Penggembalaan Umum yang Diidentifikasi dan	3.27.03.2.04.0001 - Identifikasi dan Penetapan Lahan	

--	--

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Ditetapkan (Ha)	Pengembalaan Umum	
					Luas Lahan Pengembalaan Umum yang Dikelola (Ha)	3.27.03.2.04.0002 - Pengelolaan Lahan Pengembalaan Umum	
					Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Lahan Pengembalaan Umum (Laporan)	3.27.03.2.04.0003 - Pembinaan dan Pengawasan Lahan Pengembalaan Umum	
			Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian		Persentase Penanganan Bencana Pertanian (%)	3.27.05 - PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	
					Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim Terhadap Pertanian (%)	3.27.05 - PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	
				Persentase pengendalian Bencana pertanian	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani (Ha)	3.27.05.2.01 - Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	

--	--

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan (Ha)	3.27.05.2.01 - Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	
					Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan (Ha)	3.27.05.2.01.0001 - Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	
					Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani (Ha)	3.27.05.2.01.0002 - Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	
			Meningkatnya SDM Bidang Penyuluhan Pertanian		Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan (%)	3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	
					Persentase Kelembagaan Koperasi Tani yang Dibentuk dan Beroperasi (%)	3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	
				Persentase Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian (Dokumen)	3.27.07.2.01 - Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	

--	--

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Kelembagaan Ekonomi Petani yang dibentuk (Unit)	3.27.07.2.01 - Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	
					Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)	3.27.07.2.01 - Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	
					Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian di tingkat kabupaten/kota yang ditingkatkan kapasitasnya (Unit)	3.27.07.2.01 - Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	
					Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)	3.27.07.2.01 - Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	
					Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya (Orang)	3.27.07.2.01 - Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian (Unit)	3.27.07.2.01 - Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	
					Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi (Unit)	3.27.07.2.01 - Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	

--	--

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)	3.27.07.2.01.0001 - Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	
					Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)	3.27.07.2.01.0002 - Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian (Unit)	3.27.07.2.01.0003 - Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	
					Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi (Unit)	3.27.07.2.01.0005 - Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	
					Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya (Orang)	3.27.07.2.01.0006 - Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	

--	--

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian di tingkat kabupaten/kota yang ditingkatkan kapasitasnya (Unit)	3.27.07.2.01.0007 - Penguatan Kelembagaan penyuluhan pertanian di Tingkat Kabupaten/Kota	
					Jumlah Kelembagaan Ekonomi Petani yang dibentuk (Unit)	3.27.07.2.01.0008 - Pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani	
					Jumlah diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian (Dokumen)	3.27.07.2.01.0009 - Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	
		Meningkatnya perlindungan hewan dan ternak dari penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)			Persentase wilayah yang terkendali Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) (%)		
			Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner		Tingkat pengendalian penyakit hewan menular strategis (PHMS) (%)	3.27.04 - PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT	

--	--

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
						VETERINER	
					Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner) (%)	3.27.04 - PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	
				Persentase Kasus Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) yang dapat ditangani	Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali (Laporan)	3.27.04.2.01 - Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah kejadian penyakit yang ditindaklanjuti dengan penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan (Kasus)	3.27.04.2.01 - Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis	3.27.04.2.01 - Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah	

--	--

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota (Laporan)	Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan (Wilayah)	3.27.04.2.01 - Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali (Laporan)	3.27.04.2.01.0003 - Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	
					Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan (Wilayah)	3.27.04.2.01.0005 - Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	
					Jumlah kejadian penyakit yang ditindaklanjuti dengan penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan (Kasus)	3.27.04.2.01.0006 - Pelaksanaan Penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	
					Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis	3.27.04.2.01.0008 - Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1	

--	--

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota (Laporan)	(satu) Daerah Kabupaten/Kota	
				Persentase Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya (Laporan)	3.27.04.2.02 - Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah kegiatan pengawasan peredaran produk hewan (Laporan)	3.27.04.2.02 - Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah pengawasan dan pemeriksaan kesehatan HPM di Perbatasan Tempat Pemeriksaan HPM (Laporan)	3.27.04.2.02 - Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah kabupaten/Kota	
					Jumlah kegiatan pengawasan peredaran produk hewan (Laporan)	3.27.04.2.02.0005 - Pengawasan Peredaran Produk Hewan	

--	--

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah pengawasan dan pemeriksaan kesehatan HPM di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM (Laporan)	3.27.04.2.02.0006 - Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM	
					Jumlah analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya (Laporan)	3.27.04.2.02.0007 - Analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya	
				Persentase Peningkatan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner Dalam daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium (Laporan)	3.27.04.2.03 - Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner (Laporan)	3.27.04.2.03 - Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	

--	--

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium (Laporan)	3.27.04.2.03.0001 - Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	
					Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner (Laporan)	3.27.04.2.03.0002 - Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	
				Persentase Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Tekhnis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan peningkatan kesadaran terhadap kesmavet dan kesejahteraan hewan (Orang)	3.27.04.2.04 - Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	
					Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan (Laporan)	3.27.04.2.04 - Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	
					Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner (Dokumen)	3.27.04.2.04 - Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	
					Jumlah Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan kesejahteraan hewan	3.27.04.2.04 - Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan	

--	--

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					yang mengikuti pengembangan kompetensi (Orang)	Masyarakat Veteriner	
					Jumlah produk hewan segar berkemasan yang memenuhi persyaratan registrasi produk hewan (Produk)	3.27.04.2.04 - Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	
					Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerpan cara yang baik (Unit Usaha)	3.27.04.2.04 - Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	
					Jumlah unit usaha produk hewan yang telah dibina untuk penerapan persyaratan higiene sanitasi (Unit Usaha)	3.27.04.2.04 - Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	
					Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan (Laporan)	3.27.04.2.04.0002 - Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	
					Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner (Dokumen)	3.27.04.2.04.0004 - Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat	

--	--

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
						Veteriner	
					Jumlah unit usaha produk hewan yang telah dibina untuk penerapan persyaratan higiene sanitasi (Unit Usaha)	3.27.04.2.04.0005 - Pembinaan Penerapan persyaratan higiene sanitasi pada unit usaha produk hewan	
					Jumlah Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan kesejahteraan hewan yang mengikuti pengembangan kompetensi (Orang)	3.27.04.2.04.0007 - Pengembangan Kompetensi Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan kesejahteraan hewan	
					Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan peningkatan kesadaran terhadap kesmavet dan kesejahteraan hewan (Orang)	3.27.04.2.04.0008 - Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap Kesmavet dan Kesejahteraan Hewan	
					Jumlah produk hewan segar berkemasan yang memenuhi persyaratan registrasi produk hewan (Produk)	3.27.04.2.04.0009 - Pembinaan dan pendampingan Pemenuhan Persyaratan registrasi Produk hewan segar	

--	--

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
						berkemasan	
					Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerpan cara yang baik (Unit Usaha)	3.27.04.2.04.0010 - Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan	
				Persentase pelaksanaan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Tekhnis Kesejahteraan Hewan	Jumlah Kasus Pelanggaran Kesejahteraan Hewan yang Ditangani (Kasus)	3.27.04.2.05 - Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	
					Jumlah unit usaha yang dibina terhadap penerapan kesejahteraan hewan (Unit)	3.27.04.2.05 - Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	
					Jumlah Kasus Pelanggaran Kesejahteraan Hewan yang Ditangani (Kasus)	3.27.04.2.05.0002 - Penanganan atas Pelanggaran Kesejahteraan Hewan Sesuai Kewenangannya	
					Jumlah unit usaha yang dibina terhadap penerapan kesejahteraan hewan (Unit)	3.27.04.2.05.0003 - Pembinaan Penerapan Kesejahteraan Hewan pada Unit Usaha	
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas			Nilai Akuntabilitas Kinerja (Poin)		

--	--

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
		Pertanian					
			Meningkatnya layanan administrasi kesekretariatan		Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan (%)	3.27.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Persentase Penyusunan dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Tepat Waktu	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3.27.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	3.27.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	3.27.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3.27.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan	

--	--

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
						Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	3.27.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	3.27.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Persentase Pemenuhan administrasi keuangan dan pelaporan keuangan tepat waktu	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	3.27.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	3.27.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	

--	--

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD (Laporan)	3.27.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	3.27.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	3.27.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	3.27.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD (Laporan)	3.27.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	

--	--

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	3.27.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	
				Persentase Pemenuhan administrasi barang milik daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	3.27.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	3.27.01.2.03.0004 - Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Persentase pemenuhan adminintrasi kepegawaian perangkat daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	3.27.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	3.27.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	3.27.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	

--	--

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	3.27.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
				Persentase pemenuhan sarana prasarana dan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	3.27.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	3.27.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	3.27.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	3.27.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	3.27.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	3.27.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	

--	--

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	3.27.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	3.27.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	3.27.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	3.27.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	3.27.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	3.27.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
					Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	3.27.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	3.27.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Persentase Pemenuhan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	3.27.01.2.07 - Pengadaan Barang	

--	--

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Barang Milik Daerah		Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	3.27.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	3.27.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	3.27.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	3.27.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	3.27.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	
				Persentase jasa penunjang yang disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	3.27.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	3.27.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	

--	--

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Kantor yang Disediakan (Laporan)	Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	3.27.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	3.27.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	3.27.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	3.27.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
					Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)	3.27.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Persentase penyediaan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)	3.27.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	

--	--

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
						Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	3.27.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	3.27.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)	3.27.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)	3.27.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

--	--

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	3.27.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	3.27.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)	3.27.01.2.09.0007 - Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)	3.27.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)	3.27.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

--	--

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)	3.27.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

Sumber: Dinas Pertanian, 2025

--	--

Tabel 4.3. Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				27.251.371.224		33.325.641.457		33.367.248.520		33.409.691.660		33.452.613.091		
3.27.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				15.987.171.224		15.936.441.457		15.955.048.520,00		15.975.491.660		15.996.413.091		
Meningkatnya layanan administrasi kesekretariatan	Persentase pemenuhan layanan kesekretariat-an (%)	100	100	15.987.171.224,0	100	15.936.441.457	100	15.955.048.520,00	100	15.975.491.660	100	15.996.413.091	3.27.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pertanian	
3.27.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				70.472.359,00		93.440.102,00		92.267.313,00		92.532.812,00		93.050.815,00		
Persentase Penyusunan dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Tepat Waktu	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1	1	70.472.359,00	1	93.440.102,00	1	92.267.313,00	1	92.532.812,00	1	93.050.815,00		
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	2	2		2		2		2		2			



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)													
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	2		2		2		2		2			
3.27.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				56.696.965,00		74.224.595,00		73.027.787,00		73.268.853,00		73.761.814,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	2	56.696.965,00	2	74.224.595,00	2	73.027.787,00	2	73.268.853,00	2	73.761.814,00		
3.27.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4.404.436,00		4.416.066,00		4.421.586,00		4.427.201,00		4.432.956,00		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	2	2	4.404.436,00	2	4.416.066,00	2	4.421.586,00	2	4.427.201,00	2	4.432.956,00		

--	--

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)													
3.27.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				9.370.958,00		14.799.441,00		14.817.940,00		14.836.758,00		14.856.045,00		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1	1	9.370.958,00	1	14.799.441,00	1	14.817.940,00	1	14.836.758,00	1	14.856.045,00		
3.27.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				14.602.033.663,00		14.781.012.633,00		14.781.058.266,00		14.798.620.044,00		14.627.813.836,00		
Persentase Pemenuhan administrasi keuangan dan pelaporan keuangan tepat waktu	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	1	1	14.602.033.663,00	1	14.781.012.633,00	1	14.781.058.266,00	1	14.798.620.044,00	1	14.627.813.836,00		
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	130	162		162		162		162		162			
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1		1		1		1		1			

--	--

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	(Laporan)													
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD (Laporan)	14	14		14		14		14		14			
3.27.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				14.431.383.287,0		14.744.506.760,0		14.744.506.760,00		14.762.022.122		14.591.168.339		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ bulan)	130	162	14.431.383.287,0	162	14.744.506.760,0	162	14.744.506.760,00	162	14.762.022.122	162	14.591.168.339		
3.27.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1.716.226,00		1.720.999,00		1.723.150,00		1.725.338,00		1.727.580,00		
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1	1.716.226,00	1	1.720.999,00	1	1.723.150,00	1	1.725.338,00	1	1.727.580,00		

--	--

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	(Laporan)													
3.27.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				167.871.734,00		33.719.365,00		33.761.514,00		33.804.391,00		33.848.336,00		
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD (Laporan)	14	14	167.871.734,00	14	33.719.365,00	14	33.761.514,00	14	33.804.391,00	14	33.848.336,00		
3.27.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1.062.416,00		1.065.509,00		1.066.842,00		1.068.193,00		1.069.581,00		
Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	1	1	1.062.416,00	1	1.065.509,00	1	1.066.842,00	1	1.068.193,00	1	1.069.581,00		
3.27.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				0,00		25.000.000,00		25.031.250,00		50.126.079,00		50.191.243,00		

--	--

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Persentase Pemenuhan administrasi barang milik daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	0	0	0,00	1	25.000.000,00	1	25.031.250,00	1	50.126.079,00	1	50.191.243,00		
3.27.01.2.03.0004 - Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				0,00		25.000.000,00		25.031.250,00		50.126.079,00		50.191.243,00		
Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	0	0	0,00	1	25.000.000,00	1	25.031.250,00	1	50.126.079,00	1	50.191.243,00		
3.27.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				0,00		23.304.810,00		23.333.941,00		23.363.575,00		88.193.947,00		
Persentase pemenuhan adminintrasi kepegawaian perangkat daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0	0	0,00	0	23.304.810,00	0	23.333.941,00	0	23.363.575,00	1	88.193.947,00		
	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan	0	0		5		5		5		5			

--	--

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Pelatihan (Orang)													
3.27.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				0,00		0,00		0,00		0,00		64.800.000,00		
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	64.800.000,00		
3.27.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				0,00		23.304.810,00		23.333.941,00		23.363.575,00		23.393.947,00		
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	0	0	0,00	5	23.304.810,00	5	23.333.941,00	5	23.363.575,00	5	23.393.947,00		
3.27.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				241.976.777,00		456.246.227,00		457.260.767,00		482.081.483,00		482.708.188,00		
Persentase pemenuhan sarana prasarana dan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2	2	241.976.777,00	2	456.246.227,00	2	457.260.767,00	2	482.081.483,00	2	482.708.188,00		

--	--

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	3	1		7		7		7		7			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	5	7		5		5		5		5			
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	0		2		2		2		2			
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	0	0		1		1		1		1			

--	--

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.27.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				5.484.838,00		5.502.152,00		5.509.029,00		5.516.025,00		5.523.195,00		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	5	7	5.484.838,00	5	5.502.152,00	5	5.509.029,00	5	5.516.025,00	5	5.523.195,00		
3.27.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0,00		48.270.593,00		48.330.930,00		48.392.310,00		48.455.220,00		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	0	0,00	2	48.270.593,00	2	48.330.930,00	2	48.392.310,00	2	48.455.220,00		
3.27.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				0,00		35.000.000,00		35.043.750,00		35.088.255,00		35.133.870,00		
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	0	0	0,00	1	35.000.000,00	1	35.043.750,00	1	35.088.255,00	1	35.133.870,00		
3.27.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				65.884.379,00		66.064.558,00		66.147.138,00		66.231.144,00		66.317.244,00		

--	--

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	3	1	65.884.379,00	7	66.064.558,00	7	66.147.138,00	7	66.231.144,00	7	66.317.244,00		
3.27.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				5.867.560,00		18.763.794,00		18.787.248,00		18.811.107,00		18.835.561,00		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2	2	5.867.560,00	2	18.763.794,00	2	18.787.248,00	2	18.811.107,00	2	18.835.561,00		
3.27.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu				3.750.000,00		3.760.124,00		3.764.824,00		3.769.605,00		3.774.505,00		
Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	1	1	3.750.000,00	1	3.760.124,00	1	3.764.824,00	1	3.769.605,00	1	3.774.505,00		
3.27.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				160.990.000,00		278.885.006,00		279.677.848,00		304.273.037,00		304.668.593,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	1	160.990.000,00	1	278.885.006,00	1	279.677.848,00	1	304.273.037,00	1	304.668.593,00		

--	--

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.27.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				500.000.000,00		30.000.000,00		0,00		0,00		125.000.000,00		
Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	0	500.000.000,00	3	30.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	125.000.000,00		
	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	0		0		0		0		1			
	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0	1		0		0		0		0			
3.27.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				500.000.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0	1	500.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		

--	--

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.27.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				0,00		0,00		0,00		0,00		125.000.000,00		
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	125.000.000,00		
3.27.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				0,00		30.000.000,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	0	0,00	3	30.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
3.27.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				204.534.409,00		192.999.150,00		193.240.399,00		193.485.814,00		193.737.344,00		
Persentase jasa penunjang yang disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	1	204.534.409,00	1	192.999.150,00	1	193.240.399,00	1	193.485.814,00	1	193.737.344,00		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1		1		1		1		1			

--	--

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
3.27.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2.990.000,00		2.999.150,00		3.002.899,00		3.006.713,00		3.010.621,00		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1	2.990.000,00	1	2.999.150,00	1	3.002.899,00	1	3.006.713,00	1	3.010.621,00		
3.27.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				32.151.500,00		65.000.000,00		65.081.250,00		65.163.903,00		65.248.616,00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	1	32.151.500,00	1	65.000.000,00	1	65.081.250,00	1	65.163.903,00	1	65.248.616,00		
3.27.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				169.392.909,00		125.000.000,00		125.156.250,00		125.315.198,00		125.478.107,00		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1	169.392.909,00	1	125.000.000,00	1	125.156.250,00	1	125.315.198,00	1	125.478.107,00		

--	--

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.27.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				368.154.016,00		334.438.535,00		382.856.584,00		335.281.853,00		335.717.718,00		
Persentase penyediaan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	0	0	368.154.016,00	1	334.438.535,00	1	382.856.584,00	1	335.281.853,00	1	335.717.718,00		
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitas i (Unit)	14	0		14		14		14		14			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitas i (Unit)	0	14		0		1		0		0			
	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)	0	0		0		5		0		0			

--	--

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	206	186		185		185		185		185			
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)	0	0		0		0		0		0			
3.27.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				0,00		100.000.000,00		100.125.000,00		100.252.159,00		100.382.487,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	0	0	0,00	1	100.000.000,00	1	100.125.000,00	1	100.252.159,00	1	100.382.487,00		

--	--

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.27.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				358.214.016,00		224.438.535,00		224.719.084,00		225.004.479,00		225.296.983,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	206	186	358.214.016,00	185	224.438.535,00	185	224.719.084,00	185	225.004.479,00	185	225.296.983,00		
3.27.01.2.09.0007 - Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				0,00		0,00		5.000.000,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)	0	0	0,00	0	0,00	5	5.000.000,00	0	0,00	0	0,00		
3.27.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		

--	--

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.27.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				9.940.000,00		0,00		43.000.000,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)	0	14	9.940.000,00	0	0,00	1	43.000.000,00	0	0,00	0	0,00		
3.27.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0,00		10.000.000,00		10.012.500,00		10.025.215,00		10.038.248,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)	14	0	0,00	14	10.000.000,00	14	10.012.500,00	14	10.025.215,00	14	10.038.248,00		
3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN				1.600.000.000,00		3.725.000.000,00		3.748.000.000,00		3.770.000.000,00		3.792.000.000,00		
Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (%)	-14,12	2	1.600.000.000,00	2	3.725.000.000,00	2	3.748.000.000,00	2	3.770.000.000,00	2	3.792.000.000,00	3.27.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pertanian	

--	--

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Peningkatan Produksi Hortikultura (%)	-2,96	2		2		2		2		2			
	Peningkatan Produksi Komoditas Pternakan (%)	7,73	2		2		2		2					
	Peningkatan produksi tanaman perkebunan (%)	22,51	2,5		2,5		2,5		2,5					
3.27.02.2.01 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian				513.054.080,00		1.104.377.960,00		1.124.107.654,00		1.142.768.004,00		1.161.408.576,00		
Persentase Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang (Batang)			513.054.080,00		1.104.377.960,00		1.124.107.654,00		1.142.768.004,00		1.161.408.576,00		
	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil tanaman pangan (Laporan)	-	-		1		1		1		1			
	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil Perkebunan (Laporan)	-	-		1		1		1		1			
	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil hortikultura	-	-		1		1		1		1			

--	--

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	(Laporan)													
	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen tanaman pangan (Laporan)	-	-		1		1		1		1			
	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen Perkebunan (Laporan)	-	-		1		1		1					
	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen hortikultura (Laporan)	-	-		1		1		1		1			
	Jumlah Pendamping an Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian (Laporan)	-	1		1		1		1		1			

--	--

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Batang yang diperbanyak (Batang)	-	1.000		7.000		7.000		7.000		7.000			
3.27.02.2.01.0001 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi				300.000.000,00		410.503.970,00		429.366.323,00		447.144.351,00		464.880.613,00		
Terawasinya Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi (Laporan)	1	1	300.000.000,00	1	410.503.970,00	1	429.366.323,00	1	447.144.351,00	1	464.880.613,00		
3.27.02.2.01.0002 - Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian				163.054.080,00		263.764.326,00		264.094.031,00		264.429.430,00		264.773.188,00		
Terlaksananya Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian (Laporan)	-	1	163.054.080,00	1	263.764.326,00	1	264.094.031,00	1	264.429.430,00	1	264.773.188,00		
3.27.02.2.01.0005 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan				0,00		25.000.000,00		25.031.250,00		25.063.039,00		25.095.621,00		

--	--

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terawasinya penggunaan sarana pengolahan hasil tanaman pangan	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil tanaman pangan (Laporan)	-	-	0,00	1	25.000.000,00	1	25.031.250,00	1	25.063.039,00	1	25.095.621,00		
3.27.02.2.01.0006 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Perkebunan				0,00		15.000.000,00		15.018.750,00		15.037.824,00		15.057.373,00		
Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Perkebunan	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen Perkebunan (Laporan)	-	-	0,00	1	15.000.000,00	1	15.018.750,00	1	15.037.824,00	1	15.057.373,00		
3.27.02.2.01.0007 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Hortikultura				0,00		15.551.189,00		15.570.627,00		15.590.402,00		15.610.670,00		
Terawasinya penggunaan sarana pengolahan hasil hortikultura	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil hortikultura (Laporan)	-	-	0,00	1	15.551.189,00	1	15.570.627,00	1	15.590.402,00	1	15.610.670,00		
3.27.02.2.01.0009 - Perbanyakkan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang				50.000.000,00		309.558.475,00		309.945.423,00		310.339.054,00		310.742.494,00		

--	--

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya benih bersertikat Hortikultura Berbentuk Batang	Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Batang yang diperbanyak (Batang)	-	1.000	50.000.000,00	7.000	309.558.475,00	7.000	309.945.423,00	7.000	310.339.054,00	7.000	310.742.494,00		
3.27.02.2.01.0012 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Perkebunan				0,00		15.000.000,00		15.018.750,00		15.037.824,00		15.057.373,00		
Terawasinya penggunaan sarana pengolahan hasil Perkebunan	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil Perkebunan (Laporan)	-	-	0,00	1	15.000.000,00	1	15.018.750,00	1	15.037.824,00	1	15.057.373,00		
3.27.02.2.01.0014 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Tanaman Pangan				0,00		25.000.000,00		25.031.250,00		25.063.040,00		25.095.622,00		
Terawasinya penggunaan sarana pascapanen tanaman pangan	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen tanaman pangan (Laporan)	-	-	0,00	1	25.000.000,00	1	25.031.250,00	1	25.063.040,00	1	25.095.622,00		
3.27.02.2.01.0016 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Hortikultura				0,00		25.000.000,00		25.031.250,00		25.063.040,00		25.095.622,00		

--	--

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terawasinya penggunaan sarana pascapanen hortikultura	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen hortikultura (Laporan)	-	-	0,00	1	25.000.000,00	1	25.031.250,00	1	25.063.040,00	1	25.095.622,00		
3.27.02.2.02 - Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota				819.705.006,00		2.032.356.456,00		2.039.785.063,00		2.042.375.590,00		2.044.974.706,00		
Persentase Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan dan Tumbuhan yang dikelola dan dimanfaatkan	Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian (Varietas Unggul Baru (VUB))	-	1	819.705.006,00	1	2.032.356.456,00	1	2.039.785.063,00	1	2.042.375.590,00	1	2.044.974.706,00		
	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman (Dokumen)	1	1				1				1			
	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah SDG hewan yang dilakukan pelestarian dan pemurnian (laporan)	1	-				1				1			

--	--

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.27.02.2.02.0002 - Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman				100.000.010,00		100.270.000,00		105.283.500,00		105.417.210,00		105.554.252,00		
Meningkatnya Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tana man (Dokumen)	1	1	100.000.010,00	1	100.270.000,00	1	105.283.500,00	1	105.417.210,00	1	105.554.252,00		
3.27.02.2.02.0003 - Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman				619.704.996,00		1.781.816.456,00		1.784.043.726,00		1.786.309.462,00		1.788.575.692,00		
Termanfaatkannya SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tana man (Dokumen)	1	1	619.704.996,00	1	1.781.816.456,00	1	1.784.043.726,00	1	1.786.309.462,00	1	1.788.575.692,00		
3.27.02.2.02.0004 - Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman				100.000.000,00		100.270.000,00		100.395.337,00		100.522.839,00		100.653.519,00		
Terjaminnya kemurnian dan kelestarian SDG tanaman	Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian (Varietas Unggul Baru (VUB))	-	1	100.000.000,00	1	100.270.000,00	1	100.395.337,00	1	100.522.839,00	1	100.653.519,00		
3.27.02.2.02.0005 - Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan				0,00		50.000.000,00		50.062.500,00		50.126.079,00		50.191.243,00		

--	--

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terjaminnya kemurnian dan kelestarian SDG hewan	Jumlah SDG hewan yang dilakukan pelestarian dan pemurnian (laporan)	1	-	0,00	1	50.000.000,00	1	50.062.500,00	1	50.126.079,00	1	50.191.243,00		
3.27.02.2.03 - Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota				0,00		25.000.000,00		25.031.250,00		25.070.347,00		25.102.938,00		
Persentase peningkatan penggunaan benih/bibit unggul dan pakan ternak yang berkualitas	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil (Laporan)	1	0	0,00	1	25.000.000,00	1	25.031.250,00	1	25.070.347,00	1	25.102.938,00		
	Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang Beredar (Laporan)	-	-		1		1		1		1			
3.27.02.2.03.0001 - Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil				0,00		15.000.000,00		15.018.750,00		15.020.000,00		15.039.526,00		

--	--

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terawasinya Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil (Laporan)	1	0	0,00	1	15.000.000,00	1	15.018.750,00	1	15.020.000,00	1	15.039.526,00		
3.27.02.2.03.0002 - Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak				0,00		10.000.000,00		10.012.500,00		10.050.347,00		10.063.412,00		
Terawasinya Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang Beredar (Laporan)	-	-	0,00	1	10.000.000,00	1	10.012.500,00	1	10.050.347,00	1	10.063.412,00		
3.27.02.2.04 - Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer				0,00		25.067.500,00		40.098.834,00		40.149.760,00		40.201.955,00		
Persentase pengawasan obat hewan ditingkat pengecer	Jumlah Penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan yang Ditindak (Kasus)	-	-	0,00	-	25.067.500,00	5	40.098.834,00	5	40.149.760,00	5	40.201.955,00		

--	--

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar (Laporan)		0		1		1		1		1			
3.27.02.2.04.0001 - Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan				0,00		25.067.500,00		20.098.834,00		20.124.360,00		20.150.522,00		
Terperiksanya Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan	Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar (Laporan)		0	0,00	1	25.067.500,00	1	20.098.834,00	1	20.124.360,00	1	20.150.522,00		
3.27.02.2.04.0002 - Penindakan atas Penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan				0,00		0,00		20.000.000,00		20.025.400,00		20.051.433,00		
Terlaksananya Penindakan atas Penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan	Jumlah Penyimpang an Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan yang Ditindak (Kasus)	-	-	0,00	-	0,00	5	20.000.000,00	5	20.025.400,00	5	20.051.433,00		
3.27.02.2.05 - Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan				0,00		100.000.000,00		80.231.368,00		80.333.262,00		80.437.695,00		

--	--

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota														
Persentase Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih / Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia (Laporan)	-	-	0,00	-	100.000.000,00	1	80.231.368,00	1	80.333.262,00	1	80.437.695,00		
	Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan (Laporan)	1	0		1		1		1		1			
	Jumlah pengawasan peredaran benih/bibit ternak yang beredar dan bersertifikat (Laporan)													
3.27.02.2.05.0006 - Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan				0,00		100.000.000,00		55.231.368,00		55.301.512,00		55.373.404,00		
Terawasinya Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan (Laporan)	1	0	0,00	1	100.000.000,00	1	55.231.368,00	1	55.301.512,00	1	55.373.404,00		

--	--

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.27.02.2.05.0009 - Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak				0,00		0,00		25.000.000,00		25.031.750,00		25.064.291,00		
Terkendalinya penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak	Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia (Laporan)	-	-	0,00	-	0,00	1	25.000.000,00	1	25.031.750,00	1	25.064.291,00		
3.27.02.2.06 - Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain				267.240.914,00		438.198.084,00		438.745.831,00		439.303.037,00		439.874.130,00		
Persentase peningkatan populasi ternak	Jumlah benih ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/ kota lain (Dosis)	-	4.000	267.240.914,00	6.000	438.198.084,00	6.000	438.745.831,00	6.000	439.303.037,00	6.000	439.874.130,00		
	Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/ kota lain (Ekor)	-	250		250		100		100		100			
3.27.02.2.06.0003 - Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain				100.000.000,00		120.324.000,00		120.474.405,00		120.627.407,00		120.784.222,00		

--	--

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain (Ekor)	-	250	100.000.000,00	250	120.324.000,00	100	120.474.405,00	100	120.627.407,00	100	120.784.222,00		
3.27.02.2.06.0004 - Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain				167.240.914,00		317.874.084,00		318.271.426,00		318.675.630,00		319.089.908,00		
Tersedianya benih ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	Jumlah benih ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain (Dosis)	-	4.000	167.240.914,00	6.000	317.874.084,00	6.000	318.271.426,00	6.000	318.675.630,00	6.000	319.089.908,00		
3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN				4.000.000.000,00		8.000.000.000,00		8.000.000.000,00		8.000.000.000,00		8.000.000.000,00		
Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian	Cakupan luas lahan pertanian yang ditetapkan menjadi LP2B (%)	90,16	90,16	4.000.000.000,00	90,16	8.000.000.000,00	90,16	8.000.000.000,00	90,16	8.000.000.000,00	90,16	8.000.000.000,00	3.27.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pertanian	
	Persentase peningkatan penyediaan prasarana pertanian (%)	19,46	5		5		5		5		5			
3.27.03.2.01 - Pengembangan Prasarana Pertanian				475.001.165,00		1.301.890.000,00		1.703.517.362,00		1.705.680.830,00		2.007.898.214,00		

--	--

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Persentase prasarana pertanian yang dikembangkan	Jumlah prasarana pascapanen perkebunan yang dikendalikan dan dimanfaat-kan (Unit)	0	0	475.001.165,00	1	1.301.890.000,00	1	1.703.517.362,00	1	1.705.680.830,00	1	2.007.898.214,00		
	Jumlah prasarana pascapanen tanaman pangan yang dikendalikan dan dimanfaat-kan (Unit)	0	1		2		2		2		2			
	Jumlah Action Plan Pengembang-an Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian (Dokumen)	0	0		1		0		0		0			
	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan (Unit)	0	0		1		1		1		1			

--	--

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah prasarana pascapanen hortikultura yang dikendalikan dan dimanfaatkan (Unit)	0	1		2		2		2		2			
	Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B (Dokumen)	0	0		0		1		1		1			
	Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Dokumen)	0	0		0		0		0		1			
	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola (Dokumen)	1	0		1		1		1		1			

--	--

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah prasarana pengolahan hasil tanaman pangan yang dikendalikan dan dimanfaat-kan (Unit)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah prasarana pengolahan hasil perkebunan yang dikendalikan dan dimanfaat-kan (Unit)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah prasarana pengolahan hasil hortikultura yang dikendalikan dan dimanfaat-kan (Unit)	0	1		0		2		2		2			
3.27.03.2.01.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya				100.001.004,00		50.135.000,00		50.197.669,00		50.261.420,00		50.326.760,00		
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya (Laporan)	1	1	100.001.004,00	1	50.135.000,00	1	50.197.669,00	1	50.261.420,00	1	50.326.760,00		

--	--

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.27.03.2.01.0006 - Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Tanaman Pangan				299.999.768,00		501.350.000,00		501.976.686,00		502.614.197,00		503.267.595,00		
Terkendali dan termanfaatkannya prasarana pascapanen Tanaman Pangan	Jumlah prasarana pascapanen tanaman pangan yang dikendalikan dan dimanfaat- kan (Unit)	0	1	299.999.768,00	2	501.350.000,00	2	501.976.686,00	2	502.614.197,00	2	503.267.595,00		
3.27.03.2.01.0007 - Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Perkebunan				0,00		100.000.000,00		100.125.000,00		100.252.159,00		100.382.487,00		
Terkendali dan termanfaatkannya prasarana pascapanen Perkebunan	Jumlah prasarana pascapanen perkebunan yang dikendalikan dan dimanfaat- kan (Unit)	0	0	0,00	1	100.000.000,00	1	100.125.000,00	1	100.252.159,00	1	100.382.487,00		
3.27.03.2.01.0008 - Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Hortikultura				0,00		100.000.000,00		100.125.000,00		100.252.159,00		100.382.487,00		
Terkendali dan termanfaatkannya prasarana pascapanen Hortikultura	Jumlah prasarana pascapanen hortikultura yang dikendalikan dan dimanfaat- kan (Unit)	0	1	0,00	2	100.000.000,00	2	100.125.000,00	2	100.252.159,00	2	100.382.487,00		

--	--

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.27.03.2.01.0010 - Peningkatan pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan				0,00		100.000.000,00		100.125.000,00		100.252.159,00		100.382.487,00		
Terwujudkannya peningkatan pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan	Jumlah pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan (Unit)	0	0	0,00	1	100.000.000,00	1	100.125.000,00	1	100.252.159,00	1	100.382.487,00		
3.27.03.2.01.0011 - Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Hortikultura				25.000.694,00		0,00		250.312.500,00		250.630.397,00		250.956.216,00		
Terkendali dan termanfaatkannya prasarana pengolahan hasil Hortikultura	Jumlah prasarana pengolahan hasil hortikultura yang dikendalikan dan dimanfaatkan (Unit)	0	1	25.000.694,00	0	0,00	2	250.312.500,00	2	250.630.397,00	2	250.956.216,00		
3.27.03.2.01.0012 - Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan				24.999.963,00		50.135.000,00		50.197.669,00		50.261.420,00		50.326.760,00		
Terkendali dan termanfaatkannya prasarana pengolahan hasil Tanaman Pangan	Jumlah prasarana pengolahan hasil tanaman pangan yang dikendalikan dan dimanfaatkan (Unit)	0	1	24.999.963,00	1	50.135.000,00	1	50.197.669,00	1	50.261.420,00	1	50.326.760,00		

--	--

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.27.03.2.01.0013 - Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Perkebunan				24.999.736,00		50.000.000,00		50.062.500,00		50.126.079,00		50.191.243,00		
Terkendali dan termanfaatkannya prasarana pengolahan hasil Perkebunan	Jumlah prasarana pengolahan hasil perkebunan yang dikendalikan dan dimanfaatkan (Unit)	0	1	24.999.736,00	1	50.000.000,00	1	50.062.500,00	1	50.126.079,00	1	50.191.243,00		
3.27.03.2.01.0014 - Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan secara numerik dan spasial di Kabupaten/Kota				0,00		0,00		0,00		0,00		300.000.000,00		
Ditetapkannya Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota	Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Dokumen)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	300.000.000,00		
3.27.03.2.01.0015 - Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2 B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2 B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP 2B di Kabupaten/Kota				0,00		100.270.000,00		100.395.338,00		100.522.840,00		100.653.519,00		

--	--

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terkelolanya Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2 B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2 B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP 2B di Kabupaten/Kota	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola (Dokumen)	1	0	0,00	1	100.270.000,00	1	100.395.338,00	1	100.522.840,00	1	100.653.519,00		
3.27.03.2.01.0016 - Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota				0,00		0,00		400.000.000,00		400.508.000,00		401.028.660,00		
Tersusunnya Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota	Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B (Dokumen)	0	0	0,00	0	0,00	1	400.000.000,00	1	400.508.000,00	1	401.028.660,00		
3.27.03.2.01.0017 - Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian				0,00		250.000.000,00		0,00		0,00		0,00		
Tersusunnya Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian	Jumlah Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian (Dokumen)	0	0	0,00	1	250.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		

--	--

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.27.03.2.02 - Pembangunan Prasarana Pertanian				3.424.999.065,00		6.358.880.559,00		5.948.297.910,00		5.945.713.511,00		5.643.098.181,00		
Jumlah prasarana pertanian yang dibangun/direhab	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	83	11	3.424.999.065,00	17	6.358.880.559,00	17	5.948.297.910,00	17	5.945.713.511,00	20	5.643.098.181,00		
	Jumlah Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara (Unit)	0	0		0		0		0		0			
	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi (Unit)	15	8		17		18		20		20			
	Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	5	2		2		2		2		2			

--	--

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	0	1		0		0		0		0			
	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	5	0		1		1		1		1			
	Jumlah Puskesmas yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi (Unit)	0	0		1		1		1		0			
	Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi (Unit)	0	0		1		0		0		0			
	Jumlah Pintu Air yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	0	0		0		2		2		2			

--	--

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	(Unit)													
3.27.03.2.02.0002 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian				149.999.952,00		150.382.330,00		150.570.308,00		150.761.532,00		150.957.522,00		
Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Embung Pertanian	Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilita- si dan Dipelihara (Unit)	0	1	149.999.952,00	1	150.382.330,00	1	150.570.308,00	1	150.761.532,00	1	150.957.522,00		
3.27.03.2.02.0003 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani				1.745.178.658,00		2.396.992.718,00		2.390.001.078,00		2.382.860.201,00		2.375.681.829,00		
Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilita- si dan Dipelihara (Unit)	83	11	1.745.178.658,00	17	2.396.992.718,00	17	2.390.001.078,00	17	2.382.860.201,00	20	2.375.681.829,00		
3.27.03.2.02.0004 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit				299.999.748,00		206.841.955,00		207.100.507,00		207.363.525,00		207.633.098,00		
Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya DAM Parit	Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilita- si dan Dipelihara (Unit)	5	2	299.999.748,00	2	206.841.955,00	2	207.100.507,00	2	207.363.525,00	2	207.633.098,00		
3.27.03.2.02.0006 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air				0,00		0,00		300.000.000,00		300.381.000,00		300.771.495,00		

--	--

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERAN GAN	
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Pintu Air	Jumlah Pintu Air yang Dibangun, Direhabilita- si dan Dipelihara (Unit)	0	0	0,00	0	0,00	2	300.000.000,00	2	300.381.000,00	2	300.771.495,00			
3.27.03.2.02.0008 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya				67.195.402,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukung- nya yang Dibangun, Direhabilita- si dan Dipelihara (Unit)	0	1	67.195.402,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00			
3.27.03.2.02.0009 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya				0,00		200.540.000,00		200.790.675,00		201.045.680,00		201.307.040,00			
Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilita- si dan Dipelihara (Unit)	5	0	0,00	1	200.540.000,00	1	200.790.675,00	1	201.045.680,00	1	201.307.040,00			

--	--

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.27.03.2.02.0010 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani				1.162.625.305,00		2.204.123.556,00		2.449.835.342,00		2.452.946.632,00		2.406.747.197,00		
Terehabilitasi dan terpeliharanya jaringan irigasi usaha tani	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi (Unit)	15	8	1.162.625.305,00	17	2.204.123.556,00	18	2.449.835.342,00	20	2.452.946.632,00	20	2.406.747.197,00		
3.27.03.2.02.0014 - Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Puskeswan				0,00		200.000.000,00		250.000.000,00		250.354.941,00		0,00		
Terbangun, terehabilitasi, terpelihara dan beroperasinya Puskeswan	Jumlah Puskeswan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi (Unit)	0	0	0,00	1	200.000.000,00	1	250.000.000,00	1	250.354.941,00	0	0,00		
3.27.03.2.02.0015 - Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan				0,00		1.000.000.000,00		0,00		0,00		0,00		
Terbangun, terehabilitasi, terpelihara dan beroperasinya rumah potong hewan	Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi (Unit)	0	0	0,00	1	1.000.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		

--	--

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.27.03.2.03 - Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota				99.999.770,00		164.229.441,00		164.434.728,00		164.643.559,00		164.857.596,00		
Persentase Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Jumlah Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Ga lur Ternak (Laporan)	0	0	99.999.770,00	1	164.229.441,00	1	164.434.728,00	1	164.643.559,00	1	164.857.596,00		
	Jumlah Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Ga lur Ternak yang Dilestarikan dan Dimanfaat- kan (Laporan)	0	1		1		1		1		1			
3.27.03.2.03.0001 - Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak				99.999.770,00		139.229.441,00		139.403.478,00		139.580.520,00		139.761.975,00		
Terlaksananya Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Jumlah Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Ga lur Ternak yang Dilestarikan dan Dimanfaat- kan (Laporan)	0	1	99.999.770,00	1	139.229.441,00	1	139.403.478,00	1	139.580.520,00	1	139.761.975,00		

--	--

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.27.03.2.03.0002 - Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak				0,00		25.000.000,00		25.031.250,00		25.063.039,00		25.095.621,00		
Terawasinya Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Jumlah Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak (Laporan)	0	0	0,00	1	25.000.000,00	1	25.031.250,00	1	25.063.039,00	1	25.095.621,00		
3.27.03.2.04 - Pengembangan Lahan Penggembalaan Umum				0,00		175.000.000,00		183.750.000,00		183.962.100,00		184.146.009,00		
Luas lahan penggembalaan ternak yang dikembangkan	Luas Lahan Pengembalaan Umum yang Diidentifikasi dan Ditetapkan (Ha)	0	10	0,00	10	175.000.000,00	10	183.750.000,00	10	183.962.100,00	10	184.146.009,00		
	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Lahan Penggembalaan Umum (Laporan)	0	0		1		1		1		1			
	Luas Lahan Penggembalaan Umum yang Dikelola (Ha)	0	0		10		10		10		10			

--	--

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.27.03.2.04.0001 - Identifikasi dan Penetapan Lahan Pengembalaan Umum				0,00		50.000.000,00		52.500.000,00		52.552.500,00		52.605.000,00		
Teridentifikasi dan Ditetapkannya Lahan Pengembalaan Umum	Luas Lahan Pengembala- an Umum yang Diidentifika- si dan Ditetapkan (Ha)	0	10	0,00	10	50.000.000,00	10	52.500.000,00	10	52.552.500,00	10	52.605.000,00		
3.27.03.2.04.0002 - Pengelolaan Lahan Pengembalaan Umum				0,00		100.000.000,00		105.000.000,00		105.133.350,00		105.238.483,00		
Terkelolanya Lahan Pengembalaan Umum	Luas Lahan Pengembala- an Umum yang Dikelola (Ha)	0	0	0,00	10	100.000.000,00	10	105.000.000,00	10	105.133.350,00	10	105.238.483,00		
3.27.03.2.04.0003 - Pembinaan dan Pengawasan Lahan Pengembalaan Umum				0,00		25.000.000,00		26.250.000,00		26.276.250,00		26.302.526,00		
Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Lahan Pengembalaan Umum	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Lahan Pengembala- an Umum (Laporan)	0	0	0,00	1	25.000.000,00	1	26.250.000,00	1	26.276.250,00	1	26.302.526,00		

--	--

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.27.04 - PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER				1.400.000.000,00		1.400.000.000,00		1.400.000.000,00		1.400.000.000,00		1.400.000.000,00		
Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	tingkat pengendali- an penyakit hewan menular strategis (PHMS) (%)	20	20	1.400.000.000,00	20	1.400.000.000,00	20	1.400.000.000,00	20	1.400.000.000,00	20	1.400.000.000,00	3.27.0.00.0. 00.01.0000 - Dinas Pertanian	
	Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner) (%)	6	8		9		10		11		12			
3.27.04.2.01 - Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota				382.437.638,00		334.031.864,00		332.701.503,00		331.343.225,00		320.375.478,00		
Persentase Kasus Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) yang dapat ditangani	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/	1	1	382.437.638,00	1	334.031.864,00	1	332.701.503,00	1	331.343.225,00	1	320.375.478,00		

--	--

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	kota (Laporan)													
	Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan (Wilayah)	0	0		1		1		1		1			
	Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali (Laporan)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah kejadian penyakit yang ditindaklanjuti dengan penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan (Kasus)	0	0		10		10		10		10			
3.27.04.2.01.0003 - Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular				149.999.700,00		134.031.864,00		132.451.503,00		130.838.914,00		119.670.510,00		
Tertanggulangnya Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali (Laporan)	0	1	149.999.700,00	1	134.031.864,00	1	132.451.503,00	1	130.838.914,00	1	119.670.510,00		

--	--

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.27.04.2.01.0005 - Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan				0,00		25.000.000,00		25.031.250,00		25.063.035,00		25.065.620,00		
Terlaksananya surveilans penyakit hewan dan zoonosis pada Hewan	Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan (Wilayah)	0	0	0,00	1	25.000.000,00	1	25.031.250,00	1	25.063.035,00	1	25.065.620,00		
3.27.04.2.01.0006 - Pelaksanaan Penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan				0,00		25.000.000,00		25.031.250,00		25.063.039,00		25.065.620,00		
Terlaksananya Penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	Jumlah kejadian penyakit yang ditindaklanj uti dengan penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan (Kasus)	0	0	0,00	10	25.000.000,00	10	25.031.250,00	10	25.063.039,00	10	25.065.620,00		
3.27.04.2.01.0008 - Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				232.437.938,00		150.000.000,00		150.187.500,00		150.378.237,00		150.573.728,00		
Menurunnya kasus penyakit hewan menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit	1	1	232.437.938,00	1	150.000.000,00	1	150.187.500,00	1	150.378.237,00	1	150.573.728,00		

--	--

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ kota (Laporan)													
3.27.04.2.02 - Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota				24.999.833,00		65.000.000,00		65.081.250,00		65.163.471,00		65.248.182,00		
Persentase Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengawasan dan pemeriksaan kesehatan HPM di Perbatasan Tempat Pemeriksaan HPM (Laporan)	0	0	24.999.833,00	1	65.000.000,00	1	65.081.250,00	1	65.163.471,00	1	65.248.182,00		
	Jumlah kegiatan pengawasan peredaran produk hewan (Laporan)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya (Laporan)	0	0		1		1		1		1			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.27.04.2.02.0005 - Pengawasan Peredaran Produk Hewan				24.999.833,00		25.000.000,00		25.031.250,00		25.063.040,00		25.095.621,00		
Terlaksananya pengawasan peredaran produk hewan	Jumlah kegiatan pengawasan peredaran produk hewan (Laporan)	0	1	24.999.833,00	1	25.000.000,00	1	25.031.250,00	1	25.063.040,00	1	25.095.621,00		
3.27.04.2.02.0006 - Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriksaan HPM				0,00		20.000.000,00		20.025.000,00		20.050.431,00		20.076.496,00		
Terawasi dan terperiksanya kesehatan HPM di Perbatasan Tempat Pemeriksaan HPM	Jumlah pengawasan dan pemeriksaan kesehatan HPM di Perbatasan Tempat Pemeriksaan HPM (Laporan)	0	0	0,00	1	20.000.000,00	1	20.025.000,00	1	20.050.431,00	1	20.076.496,00		
3.27.04.2.02.0007 - Analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya				0,00		20.000.000,00		20.025.000,00		20.050.000,00		20.076.065,00		
Terkendalinya Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya	Jumlah analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media	0	0	0,00	1	20.000.000,00	1	20.025.000,00	1	20.050.000,00	1	20.076.065,00		

--	--

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	pembawa penyakit hewan lainnya (Laporan)													
3.27.04.2.03 - Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota				884.036.014,00		737.418.136,00		723.337.806,00		724.259.693,00		734.779.734,00		
Persentase Peningkatan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner Dalam daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner (Laporan)	1	1	884.036.014,00	1	737.418.136,00	1	723.337.806,00	1	724.259.693,00	1	734.779.734,00		
	Jumlah Pelayanan Jasa Laboratori- um (Laporan)	0	1		1		1		1		1			
3.27.04.2.03.0001 - Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium				200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		
Tersedianya Pelayanan Jasa Laboratorium	Jumlah Pelayanan Jasa Laboratori- um (Laporan)	0	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00		
3.27.04.2.03.0002 - Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner				684.036.014,00		537.418.136,00		523.337.806,00		524.259.693,00		534.779.734,00		

--	--

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner (Laporan)	1	1	684.036.014,00	1	537.418.136,00	1	523.337.806,00	1	524.259.693,00	1	534.779.734,00		
3.27.04.2.04 - Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Masyarakat Veteriner				108.526.515,00		213.550.000,00		228.816.941,00		229.107.532,00		229.405.366,00		
Persentase Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Tekhnis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan peningkatan kesadaran terhadap kesmavet dan kesejahteraan hewan (Orang)	0	0	108.526.515,00	100	213.550.000,00	100	228.816.941,00	100	229.107.532,00	100	229.405.366,00		
	Jumlah Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan kesejehteraa n hewan yang mengikuti pengembang an kompetensi (Orang)	0	8		8		8		8		8			
	Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerpan cara yang	0	1		1		1		1		1			

--	--

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	baik (Unit Usaha)													
	Jumlah unit usaha produk hewan yang telah dibina untuk penerapan persyaratan higiene sanitasi (Unit Usaha)	0	0		1		1		1		1			
	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner (Dokumen)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan (Laporan)	0	0		0		1		1		1			
	Jumlah produk hewan segar berkemasan yang memenuhi persyaratan registrasi produk hewan (Produk)	0	0		1		1		1		1			
3.27.04.2.04.0002 - Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan				0,00		0,00		15.000.000,00		15.019.050,00		15.038.574,00		

--	--

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terawasinya Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan (Laporan)	0	0	0,00	0	0,00	1	15.000.000,00	1	15.019.050,00	1	15.038.574,00		
3.27.04.2.04.0004 - Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner				18.926.515,00		18.950.000,00		18.973.687,00		18.997.783,00		19.022.480,00		
Terlaksananya Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner (Dokumen)	0	1	18.926.515,00	1	18.950.000,00	1	18.973.687,00	1	18.997.783,00	1	19.022.480,00		
3.27.04.2.04.0005 - Pembinaan Penerapan persyaratan higiene sanitasi pada unit usaha produk hewan				0,00		25.000.000,00		25.031.250,00		25.063.040,00		25.095.620,00		
Terbinanya unit usaha produk hewan dalam penerapan persyaratan higiene sanitasi	Jumlah unit usaha produk hewan yang telah dibina untuk penerapan persyaratan higiene sanitasi (Unit Usaha)	0	0	0,00	1	25.000.000,00	1	25.031.250,00	1	25.063.040,00	1	25.095.620,00		
3.27.04.2.04.0007 - Pengembangan Kompetensi Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan kesejhteraan hewan				89.600.000,00		89.600.000,00		89.712.000,00		89.825.934,00		89.942.707,00		

--	--

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Pengembangan Kompetensi Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan kesejahteraan hewan	Jumlah Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan kesejehtera-an hewan yang mengikuti pengembang-an kompetensi (Orang)	0	8	89.600.000,00	8	89.600.000,00	8	89.712.000,00	8	89.825.934,00	8	89.942.707,00		
3.27.04.2.04.0008 - Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap Kesmavet dan Kesejahteraan Hewan				0,00		25.000.000,00		25.031.250,00		25.063.039,00		25.095.620,00		
Terlaksananya kegiatan peningkatan kesadaran masyarakat	Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan peningkatan kesadaran terhadap kesmavet dan kesejahtera-an hewan (Orang)	0	0	0,00	100	25.000.000,00	100	25.031.250,00	100	25.063.039,00	100	25.095.620,00		
3.27.04.2.04.0009 - Pembinaan dan pendampingan Pemenuhan Persyaratan registrasi Produk hewan segar berkemasan				0,00		20.000.000,00		20.025.000,00		20.050.431,00		20.076.496,00		

--	--

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya kegiatan Pembinaan dan pendampingan Pemenuhan Persyaratan registrasi Produk hewan segar berkemasan	Jumlah produk hewan segar berkemasan yang memenuhi persyaratan registrasi produk hewan (Produk)	0	0	0,00	1	20.000.000,00	1	20.025.000,00	1	20.050.431,00	1	20.076.496,00		
3.27.04.2.04.0010 - Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan				0,00		35.000.000,00		35.043.754,00		35.088.255,00		35.133.869,00		
Terlaksananya pengawasan pada unit usaha produk hewan	Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerpan cara yang baik (Unit Usaha)	0	1	0,00	1	35.000.000,00	1	35.043.754,00	1	35.088.255,00	1	35.133.869,00		
3.27.04.2.05 - Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan				0,00		50.000.000,00		50.062.500,00		50.126.079,00		50.191.240,00		
Persentase pelaksanaan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Tekhnis Kesejahteraan Hewan	Jumlah Kasus Pelanggaran Kesejahteraan Hewan yang Ditangani (Kasus)	0	0	0,00	1	50.000.000,00	1	50.062.500,00	1	50.126.079,00	1	50.191.240,00		
	Jumlah unit usaha yang dibina terhadap penerapan kesejahteraan hewan (Unit)	0	0		1		1		1		1			

--	--

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.27.04.2.05.0002 - Penanganan atas Pelanggaran Kesejahteraan Hewan Sesuai Kewenangannya				0,00		25.000.000,00		25.031.250,00		25.063.039,00		25.095.620,00		
Tertanganinya Pelanggaran Kesejahteraan Hewan Sesuai Kewenangannya	Jumlah Kasus Pelanggaran Kesejahteraan Hewan yang Ditangani (Kasus)	0	0	0,00	1	25.000.000,00	1	25.031.250,00	1	25.063.039,00	1	25.095.620,00		
3.27.04.2.05.0003 - Pembinaan Penerapan Kesejahteraan Hewan pada Unit Usaha				0,00		25.000.000,00		25.031.250,00		25.063.040,00		25.095.620,00		
Terlaksananya pembinaan penerapan kesejahteraan hewan pada unit usaha	Jumlah unit usaha yang dibina terhadap penerapan kesejahteraan hewan (Unit)	0	0	0,00	1	25.000.000,00	1	25.031.250,00	1	25.063.040,00	1	25.095.620,00		
3.27.05 - PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN				264.200.000,00		264.200.000,00		264.200.000,00		264.200.000,00		264.200.000,00		
meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Persentase Penanganan Bencana Pertanian (%)	41,1	42	264.200.000,00	42	264.200.000,00	42	264.200.000,00	42	264.200.000,00	42	264.200.000,00	3.27.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pertanian	
	Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim Terhadap	88	89		89		89		89					

--	--

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Pertanian (%)													
3.27.05.2.01 - Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota				264.200.000,00		264.200.000,00		264.200.000,00		264.200.000,00		264.200.000,00		
Persentase pengendalian Bencana pertanian	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura , dan Perkebunan yang Dikendalikan (Ha)	5	5	264.200.000,00	5	264.200.000,00	5	264.200.000,00	5	264.200.000,00	5	264.200.000,00		
	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura , dan Perkebunan yang Ditangani (Ha)	-	20		20		20		20		20			
3.27.05.2.01.0001 - Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan				222.673.964,00		158.134.683,00		158.331.957,00		158.533.567,00		158.735.620,00		
Terkendalinya Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan,	5	5	222.673.964,00	5	158.134.683,00	5	158.331.957,00	5	158.533.567,00	5	158.735.620,00		

--	--

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Hortikultura , dan Perkebunan yang Dikendalikan (Ha)													
3.27.05.2.01.0002 - Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan				41.526.036,00		106.065.317,00		105.868.043,00		105.666.433,00		105.464.380,00		
Tertanganinya Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura , dan Perkebunan yang Ditangani (Ha)	-	20	41.526.036,00	20	106.065.317,00	20	105.868.043,00	20	105.666.433,00	20	105.464.380,00		
3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN				4.000.000.000,00		4.000.000.000,00		4.000.000.000,00		4.000.000.000,00		4.000.000.000,00		
Meningkatnya SDM Bidang Penyuluhan Pertanian	Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan (%)	5	5	4.000.000.000,00	5	4.000.000.000,00	5	4.000.000.000,00	5	4.000.000.000,00	5	4.000.000.000,00	3.27.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pertanian	
	Persentase Kelembagaan Koperasi Tani yang Dibentuk dan Beroperasi (%)	-	5		5		5		5		5			

--	--

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.27.07.2.01 - Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian				4.000.000.000,00		4.000.000.000,00		4.000.000.000,00		4.000.000.000,00		4.000.000.000,00		
Persentase Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian di tingkat kabupaten/ kota yang ditingkatkan kapasitas- nya (Unit)	-	-	4.000.000.000,00	-	4.000.000.000,00	-	4.000.000.000,00	-	4.000.000.000,00	1	4.000.000.000,00		
	Jumlah diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian (Dokumen)	-	0		1		1		1		1			
	Jumlah Kelembagaa n Ekonomi Petani yang dibentuk (Unit)	-	0		1		1		1		1			
	Jumlah Kelembaga- an Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitas- nya (Unit)	14	14		14		14		14		14			

--	--

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Kelembaga-an Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitas-nya (Unit)	14	14		14		14		14		14			
	Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitas-nya (Orang)	0	0		67		67		67		67			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian (Unit)	14	14		14		14		14		14			
	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi (Unit)	-	14		14		14		14					
3.27.07.2.01.0001 - Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa				947.031.110,00		966.221.553,00		964.561.233,00		962.872.235,00		951.141.149,00		
Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembaga-an Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan	14	14	947.031.110,00	14	966.221.553,00	14	964.561.233,00	14	962.872.235,00	14	951.141.149,00		

--	--

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Kapasitasnya (Unit)													
3.27.07.2.01.0002 - Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa				1.489.914.376,00		1.162.836.456,00		1.164.290.001,00		1.165.768.650,00		1.167.284.148		
Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)	14	14	1.489.914.376,00	14	1.162.836.456,00	14	1.164.290.001,00	14	1.165.768.650,00	14	1.167.284.148		
3.27.07.2.01.0003 - Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian				163.054.514,00		65.151.991,00		65.233.430,00		65.316.277,00		65.401.187,00		
Tersedia dan Termanfaatkannya Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian (Unit)	14	14	163.054.514,00	14	65.151.991,00	14	65.233.430,00	14	65.316.277,00	14	65.401.187,00		
3.27.07.2.01.0005 - Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota				1.400.000.000,00		1.400.000.000,00		1.400.000.000,00		1.400.000.000,00		1.400.000.000,00		
Terbentuknya dan Terselenggaranya Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi (Unit)	-	14	1.400.000.000,00	14	1.400.000.000,00	14	1.400.000.000,00	14	1.400.000.000,00	14	1.400.000.000,00		

--	--

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.27.07.2.01.0006 - Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian				0,00		305.520.000,00		305.520.000,00		305.520.000,00		305.520.000,00		
Tersedia dan meningkatnya kapasitas penyuluh pertanian	Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitas- nya (Orang)	0	0	0,00	67	305.520.000,00	67	305.520.000,00	67	305.520.000,00	67	305.520.000,00		
3.27.07.2.01.0007 - Penguatan Kelembagaan penyuluhan pertanian di Tingkat Kabupaten/Kota				0,00		0,00		0,00		0,00		10.000.000,00		
Terlaksananya peningkatan kapasitas dan pengelolaan kelembagaan penyuluhan pertanian di tingkat kabupaten/kota	Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian di tingkat kabupaten/ kota yang ditingkatkan kapasitas- nya (Unit)	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	1	10.000.000,00		
3.27.07.2.01.0008 - Pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani				0,00		50.135.000,00		50.197.668,00		50.261.419,00		50.326.758,00		
Terbentuknya Kelembagaan Ekonomi Petani	Jumlah Kelembagaa n Ekonomi Petani yang dibentuk (Unit)	-	0	0,00	1	50.135.000,00	1	50.197.668,00	1	50.261.419,00	1	50.326.758,00		
3.27.07.2.01.0009 - Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian				0,00		50.135.000,00		50.197.668,00		50.261.419,00		50.326.758,00		

--	--

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Termanfaatkannya teknologi inovasi pertanian yang didesiminasikan oleh penyuluh pertanian	Jumlah diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian (Dokumen)	-	0	0,00	1	50.135.000,00	1	50.197.668,00	1	50.261.419,00	1	50.326.758,00		

Sumber: Dinas Pertanian, 2025

--	--

4.2. Daftar Sub Kegiatan Prioritas

Program prioritas memuat kegiatan yang akan dilaksanakan. Program yang disusun harus dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan keterbatasan waktu, anggaran, kapasitas dan sumberdaya yang dimiliki daerah. Setiap program prioritas terdiri dari beberapa kegiatan dan sub kegiatan yang menunjang sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Pencapaian kinerja program merupakan akumulasi dari pencapaian kinerja keluaran masing-masing kegiatan dan sub kegiatan.

Sub kegiatan dan kegiatan yang mendukung Program prioritas pembangunan daerah Dinas Pertanian dalam 5 (lima) tahun kedepan dapat dilihat pada table 4.4.

Tabel 4.4. Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
3.27.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pertanian				
1.	3.27.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Meningkat-nya layanan administrasi kesekretariat-an	3.27.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			3.27.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
			3.27.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
			3.27.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			3.27.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
			3.27.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
			3.27.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	



NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANG AN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
			SKPD	
			3.27.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
			3.27.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	
			3.27.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
			3.27.01.2.03.0004 - Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	
			3.27.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
			3.27.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
			3.27.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
			3.27.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
			3.27.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
			3.27.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
			3.27.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
			3.27.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANG AN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
			3.27.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
			3.27.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu	
			3.27.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
			3.27.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
			3.27.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
			3.27.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
			3.27.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	
			3.27.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			3.27.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
			3.27.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
			3.27.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
			3.27.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			3.27.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	

--	--

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANG AN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
			Jabatan	
			3.27.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
			3.27.01.2.09.0007 - Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	
			3.27.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilit asi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
			3.27.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilit asi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			3.27.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilit asi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
2.	3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANG- AN SARANA PERTANIAN	Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	3.27.02.2.01 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	
			3.27.02.2.01.0001 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	
			3.27.02.2.01.0002 - Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	
			3.27.02.2.01.0005 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan	
			3.27.02.2.01.0006 -	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANG AN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
			Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Perkebunan	
			3.27.02.2.01.0007 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Hortikultura	
			3.27.02.2.01.0009 - Perbanyakkan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang	
			3.27.02.2.01.0012 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Perkebunan	
			3.27.02.2.01.0014 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Tanaman Pangan	
			3.27.02.2.01.0016 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Hortikultura	
			3.27.02.2.02 - Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	
			3.27.02.2.02.0002 - Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	
			3.27.02.2.02.0003 - Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	
			3.27.02.2.02.0004 - Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman	
			3.27.02.2.02.0005 - Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan	
			3.27.02.2.03 - Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANG AN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
			Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	
			3.27.02.2.03.0001 - Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanama n Skala Kecil	
			3.27.02.2.03.0002 - Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	
			3.27.02.2.04 - Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer	
			3.27.02.2.04.0001 - Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	
			3.27.02.2.04.0002 - Penindakan atas Penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan	
			3.27.02.2.05 - Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	
			3.27.02.2.05.0006 - Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	
			3.27.02.2.05.0009 - Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	
			3.27.02.2.06 - Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah	

--	--

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANG AN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
			Kabupaten/Kota Lain	
			3.27.02.2.06.0003 - Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	
			3.27.02.2.06.0004 - Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	
3.	3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANG- AN PRASARANA PERTANIAN	Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian	3.27.03.2.01 - Pengembangan Prasarana Pertanian	
			3.27.03.2.01.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	
			3.27.03.2.01.0006 - Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Tanaman Pangan	
			3.27.03.2.01.0007 - Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Perkebunan	
			3.27.03.2.01.0008 - Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Hortikultura	
			3.27.03.2.01.0010 - Peningkatan pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan	
			3.27.03.2.01.0011 - Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Hortikultura	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANG AN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
			3.27.03.2.01.0012 - Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan	
			3.27.03.2.01.0013 - Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Perkebunan	
			3.27.03.2.01.0014 - Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan secara numerik dan spasial di Kabupaten/Kota	
			3.27.03.2.01.0015 - Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota	
			3.27.03.2.01.0016 - Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota	
			3.27.03.2.01.0017 - Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian	
			3.27.03.2.02 - Pembangunan Prasarana Pertanian	
			3.27.03.2.02.0002 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	
			3.27.03.2.02.0003 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANG AN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
			3.27.03.2.02.0004 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	
			3.27.03.2.02.0006 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air	
			3.27.03.2.02.0008 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	
			3.27.03.2.02.0009 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	
			3.27.03.2.02.0010 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	
			3.27.03.2.02.0014 - Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Puskesmas	
			3.27.03.2.02.0015 - Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan	
			3.27.03.2.03 - Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota	
			3.27.03.2.03.0001 - Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	
			3.27.03.2.03.0002 - Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur	

--	--

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANG AN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
			Ternak	
			3.27.03.2.04 - Pengembangan Lahan Penggembalaan Umum	
			3.27.03.2.04.0001 - Identifikasi dan Penetapan Lahan Penggembalaan Umum	
			3.27.03.2.04.0002 - Pengelolaan Lahan Penggembalaan Umum	
			3.27.03.2.04.0003 - Pembinaan dan Pengawasan Lahan Penggembalaan Umum	
4.	3.27.04 - PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Meningkat-nya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	3.27.04.2.01 - Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	
			3.27.04.2.01.0003 - Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	
			3.27.04.2.01.0005 - Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	
			3.27.04.2.01.0006 - Pelaksanaan Penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	
			3.27.04.2.01.0008 - Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			3.27.04.2.02 - Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	
			3.27.04.2.02.0005 - Pengawasan Peredaran Produk Hewan	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANG AN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
			3.27.04.2.02.0006 - Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriksaan HPM	
			3.27.04.2.02.0007 - Analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya	
			3.27.04.2.03 - Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	
			3.27.04.2.03.0001 - Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	
			3.27.04.2.03.0002 - Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	
			3.27.04.2.04 - Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	
			3.27.04.2.04.0002 - Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	
			3.27.04.2.04.0004 - Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	
			3.27.04.2.04.0005 - Pembinaan Penerapan persyaratan higiene sanitasi pada unit usaha produk hewan	
			3.27.04.2.04.0007 - Pengembangan Kompetensi Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan kesejahteraan hewan	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANG AN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
			3.27.04.2.04.0008 - Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap Kesmavet dan Kesejahteraan Hewan	
			3.27.04.2.04.0009 - Pembinaan dan pendampingan Pemenuhan Persyaratan registrasi Produk hewan segar berkemasan	
			3.27.04.2.04.0010 - Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan	
			3.27.04.2.05 - Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	
			3.27.04.2.05.0002 - Penanganan atas Pelanggaran Kesejahteraan Hewan Sesuai Kewenangannya	
			3.27.04.2.05.0003 - Pembinaan Penerapan Kesejahteraan Hewan pada Unit Usaha	
5.	3.27.05 - PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULAN GAN BENCANA PERTANIAN	Meningkatnya pengendalian dan penanggulan an bencana pertanian	3.27.05.2.01 - Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	
			3.27.05.2.01.0001 - Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	
			3.27.05.2.01.0002 - Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	
6.	3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Meningkat-nya SDM Bidang Penyuluhan Pertanian	3.27.07.2.01 - Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	
			3.27.07.2.01.0001 - Peningkatan Kapasitas Kelembagaan	

--	--

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANG AN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
			Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	
			3.27.07.2.01.0002 - Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	
			3.27.07.2.01.0003 - Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	
			3.27.07.2.01.0005 - Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	
			3.27.07.2.01.0006 - Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	
			3.27.07.2.01.0007 - Penguatan Kelembagaan penyuluhan pertanian di Tingkat Kabupaten/Kota	
			3.27.07.2.01.0008 - Pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani	
			3.27.07.2.01.0009 - Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	

Sumber: Dinas Pertanian, 2025

4.3. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

4.3.1. Indikator Kinerja Utama

Indikator kinerja utama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Solok dijabarkan melalui indikator kinerja utama Dinas Pertanian. Indikator kinerja utama pembangunan/program/kegiatan Dinas Pertanian serta target kinerja sasaran yang harus dicapai dapat dilihat pada tabel berikut:

--	--

Tabel 4.5. Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanian Tahun 2025-2030

No	Indikator	Satuan	Tahun dan Target Kinerja						Keterangan
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	3.27.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pertanian								
1	PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	Juta Rupiah	4.097.002	4.209.670	4.331.329	4.462.135	4.609.386	4.774.402	
2	Persentase peningkatan produksi komoditas pertanian	%	2,13	4,26	6,39	8,52	10,65	12,78	
3	Persentase wilayah yang terkendali penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)	%	65	68	71	74	77	80	
4	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	73,30	73,55	74,06	76,05	78,03	80,01	

Sumber: Dinas Pertanian, 2025

--	--

4.3.2. Indikator Kinerja Daerah

Indikator Kinerja Daerah secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Pertanian sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Solok.

Tabel 4.6. Indikator Kinerja Daerah Pemerintah Kabupaten Solok Tahun 2025-2030

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KETERANGAN
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
3.27.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pertanian									
I	ASPEK DAYA SAING DAERAH								
1	Rasio PDRB Sektor Pertanian, kehutanan dan Perikanan(%)	%	32,26	31,88	31,5	31,12	30,74	30,36	
II	ASPEK PELAYANAN UMUM								
1	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	%	100	100	100	100	100	100	
III	INDIKATOR KINERJA KUNCI								
1	cakupan luas lahan pertanian yang ditetapkan menjadi LP2B	%	90,16	90,16	90,16	90,16	90,16	90,16	
2	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	%	2	2	2	2	2	2	
3	tingkat pengendalian penyakit hewan menular strategis (PHMS)	%	20	20	20	20	20	20	
4	Persentase Penanganan Bencana Pertanian	%	42	42	42	42	42	42	
5	Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan	%	5	5	5	5	5	5	
6	Persentase Kelembagaan Koperasi Tani yang Dibentuk dan Beroperasi	%	5	5	5	5	5	5	
7	Persentase Penanganan Dampak Perubahan	%	89	89	89	89	89	89	



NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KETERANGAN
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Iklim Terhadap Pertanian								
8	Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner)	%	7	8	9	10	11	12	
9	Peningkatan Produksi Hortikultura	%	2	2	2	2	2	2	
10	Persentase peningkatan penyediaan prasarana pertanian	%	5	5	5	5	5	5	
11	Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan	%	2	2	2	2	2	2	
12	Peningkatan produksi tanaman perkebunan	%	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	

Sumber: Dinas Pertanian, 2025

4.3.3. Indikator Kinerja Kunci

Untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan proses atau kegiatan operasional yang mendukung pencapaian IKU maka ditetapkan 12 (dua belas) Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang merupakan indikator kinerja program Dinas Pertanian tahun 2025-2030 yang disajikan dalam Tabel 4.7.

Tabel 4.7.Indikator Kinerja Kunci Dinas Pertanian tahun 2025-2030

No	Indikator	Satuan	Tahun dan Target Kinerja						Keterangan
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN								
1	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	
2	Peningkatan Produksi Hortikultura	%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	



No	Indikator	Satuan	Tahun dan Target Kinerja						Keterangan
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan	%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	
4	Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan	%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	
5	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang ditetapkan menjadi LP2B	%	90,16%	90,16%	90,16%	90,16%	90,16%	90,16%	
6	Persentase Peningkatan penyediaan Prasarana Pertanian	%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	
7	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)	%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	
8	Persentase Unit Usaha Pangan asal Hewan yang Memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner)	%	7%	8%	9%	10%	11%	12%	
9	Persentase Penanganan Bencana Pertanian	%	42,0%	42,0%	42,0%	42,0%	42,0%	42,0%	
10	Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim Terhadap Pertanian	%	89,00%	89,00%	89,00%	89,00%	89,00%	89,00%	
11	Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang ditingkatkan	%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	



No	Indikator	Satuan	Tahun dan Target Kinerja						Keterangan
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	Persentase Kelembagaan Koperasi Tani yang dibentuk dan Beroperasi	%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	

Sumber: Dinas Pertanian, 2025

--	--

BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Solok periode 2025-2029 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian Kabupaten Solok untuk 5 (lima) tahun ke depan. Keberhasilan pelaksanaan Renstra ini sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM dan sumber pendanaannya serta komitmen semua pimpinan dan staf Dinas Pertanian Kabupaten Solok. Selain itu, untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra periode 2025-2029, setiap tahun akan dilakukan evaluasi. Apabila diperlukan, dapat dilakukan perubahan/revisi muatan Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Solok termasuk indikator-indikator kinerjanya yang dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan tanpa mengubah tujuan Dinas Pertanian Kabupaten Solok.

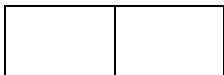
Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Solok periode 2025-2029 harus dijadikan acuan kerja bagi unit-unit kerja di lingkungan Dinas Pertanian Kabupaten Solok sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Diharapkan semua unit kerja dapat melaksanakannya dengan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja (*better performance*) lembaga, unit kerja dan kinerja pegawai.

Sebagai penutup, Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Solok Tahun 2025–2029 ini diharapkan dapat memberikan arah dan pedoman bagi seluruh personil Dinas Pertanian beserta *stake holder* dalam membangun kesepahaman dan komitmen bersama guna mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Pertanian secara berkesinambungan, yang selanjutnya dapat meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah dalam upaya mewujudkan keselarasan dan sinkronisasi dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Solok, sesuai kewenangan dalam tugas dan fungsi Dinas Pertanian Kabupaten Solok.

5.2 Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan Renstra (Rencana Strategis) adalah prinsip-prinsip atau pedoman yang digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan rencana strategis. Kaidah ini bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan Renstra dilakukan dengan efektif, efisien, dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dengan mengikuti kaidah pelaksanaan Renstra, organisasi dapat memastikan bahwa rencana strategis yang telah disusun dapat diimplementasikan dengan baik dan mencapai tujuan yang diharapkan.

Oleh karena itu konsistensi, kerjasama, transparansi dan inovasi serta rasa tanggung jawab yang tinggi diperlukan guna pencapaian target-target yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Solok Tahun 2025-2029 dengan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:



- a. keselarasan dengan RPJMD: penyusunan dan pelaksanaan Renstra harus sesuai dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
- b. konsistensi dengan Rencana Kerja (Renja): Renstra menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahunan, memastikan bahwa program dan kegiatan tahunan sejalan dengan strategi jangka panjang;
- c. pengukuran kinerja dan evaluasi: Renstra menetapkan indikator kinerja utama yang akan digunakan untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan. Proses ini juga mencakup evaluasi kinerja secara berkala;
- d. koordinasi dan sinkronisasi: pelaksanaan Renstra harus melibatkan koordinasi yang baik antar perangkat daerah, unit kerja, dan instansi terkait untuk memastikan sinergi dalam pencapaian tujuan;
- e. akuntabilitas dan pelaporan: melaporkan hasil pelaksanaan kinerja Renstra secara berkala menjadi salah satu kaidah penting untuk memberikan akuntabilitas kinerja kepada publik dan pimpinan;
- f. pemenuhan prioritas dan anggaran: pelaksanaan Renstra harus memprioritaskan kegiatan yang paling relevan dan memastikan alokasi anggaran yang memadai untuk mendukung pencapaian sasaran-sasaran yang telah ditetapkan;
- g. kepatuhan terhadap peraturan: seluruh tata cara dan pelaksanaan Renstra harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta kebijakan pemerintah terkait perencanaan pembangunan.

5.3 Pengendalian dan Evaluasi

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra merupakan proses penting untuk memastikan bahwa rencana strategis yang telah disusun dapat diimplementasikan dengan efektif dan efisien. Berikut adalah beberapa aspek yang terkait dengan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra:

- a. memantau progres pelaksanaan Renstra untuk memastikan bahwa target dan sasaran dapat dicapai;
- b. mengukur kinerja pelaksanaan Renstra berdasarkan indikator yang telah ditetapkan;
- c. menilai efektivitas pencapaian tujuan dan sasaran Renstra;
- d. mengidentifikasi hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Renstra;
- e. merumuskan rekomendasi perbaikan untuk periode selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi.



Dengan melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra, perangkat daerah dapat:

- a. Meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
- b. Mengoptimalkan penggunaan sumber daya;
- c. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan Renstra;
- d. Mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki dan merumuskan strategi perbaikan.

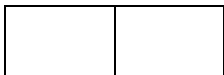
BUPATI SOLOK,

dto

JON FIRMAN PANDU

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

FEBRIZALDI



LAMPIRAN I
META DATA INDIKATOR RENSTRA DINAS PERTANIAN
TAHUN 2025-2029

I. INDIKATOR KINERJA UTAMA

1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sektor Pertanian

Nama Indikator	Produk Domestik Regional Bruto Sektor Pertanian (Juta Rupiah)
Definisi	PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) Sektor Pertanian adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh unit produksi sektor pertanian di wilayah atau daerah tertentu dalam jangka waktu tertentu. .
Rumus Perhitungan	$PDRB = \Sigma (\text{Nilai Tambah Bruto})$ Nilai Tambah Bruto (NTB): adalah nilai output (produksi) suatu sektor ekonomi dikurangi biaya antara (input) yang digunakan dalam proses produksi.
Interpretasi	Peningkatan PDRB biasanya dianggap sebagai tanda pertumbuhan ekonomi yang positif dan dapat meningkatkan standar hidup penduduk.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan

2. Persentase Peningkatan Produksi Komoditas Pertanian

Nama Indikator	Persentase Peningkatan produksi komoditas pertanian
Definisi	Persentase kenaikan produksi komoditas pertanian dari tahun sebelumnya
Rumus Perhitungan	$\text{Peningkatan Produksi komoditas pertanian (\%)} = (\text{Produksi tahun ini} - \text{Produksi tahun lalu}) / \text{Produksi tahun lalu} \times 100\%$
Interpretasi	Semakin tinggi persentase menunjukkan peningkatan produktivitas pertanian. Jika negatif atau rendah berarti terjadi penurunan produksi yang dapat berdampak pada ketahanan pangan
Sumber Data	Perangkat Daerah Urusan Pertanian
Frekuensi	Tahunan



3. Persentase wilayah yang terkendali penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)

Nama Indikator	Persentase wilayah yang terkendali penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)
Definisi	Persentase Wilayah yang Terkendali Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) merupakan rata-rata angka status kesehatan hewan di kabupaten/kota. Angka status kesehatan hewan dihitung melalui serangkaian kegiatan pengamatan, pencegahan, pemberantasan dan pembebasan PHMS khususnya lebih difokuskan pada penyakit Anthrax, Brucellosis, Avian Influenza, Hog Cholera, ASF, LSD, serta PMK.
Rumus Perhitungan	$\frac{a}{b} \times 100\%$ Keterangan: a adalah Identifikasi total wilayah yang terkendali dari PHMS (Nagari) b adalah Identifikasi total wilayah yang terdampak PHMS (Nagari)
Interpretasi	Nilai semakin tinggi menunjukkan semakin baik tingkat pengendalian PHMS. Nilai 100% menunjukkan seluruh wilayah telah dikendalikan
Sumber Data	Perangkat Daerah Urusan Pertanian
Frekuensi	Tahunan



4. Nilai Akuntabilitas Kinerja

Nama Indikator	Nilai Akuntabilitas Kinerja
Definisi	Nilai Akuntabilitas Kinerja adalah hasil penilaian terhadap tingkat keterkaitan antara perencanaan kinerja, pengukuran, pelaporan, evaluasi, dan capaian kinerja suatu instansi pemerintah. Penilaian ini dilakukan oleh Kementerian PANRB melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
Rumus Perhitungan	• Perencanaan Kinerja (keterkaitan RPJMD, Renstra, Renja). • Pengukuran Kinerja (indikator kinerja yang jelas, terukur, dan berbasis outcome). • Pelaporan Kinerja (laporan yang informatif, transparan, dan tepat waktu). • Evaluasi Kinerja (tindak lanjut hasil evaluasi untuk perbaikan). • Capaian Kinerja (keterkaitan dengan penggunaan anggaran).
Interpretasi	Hasil penilaian biasanya disajikan dalam nilai huruf (grade) dan angka: • AA (sangat memuaskan) → nilai 90–100 • A (memuaskan) → nilai 80–89,9 • BB (sangat baik) → nilai 70–79,9 • B (baik) → nilai 60–69,9 • CC (cukup baik) → nilai 50–59,9 • C (kurang) → nilai 30–49,9 • D (sangat kurang) → nilai <30
Sumber Data	Inspektorat Daerah Kabupaten Solok
Frekuensi	Tahunan



II. INDIKATOR KINERJA DAERAH

A. ASPEK DAYA SAING DAERAH

1. Rasio PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan

Nama Indikator	Rasio PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (%)
Definisi	Rasio PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan adalah nilai tambah yang dihasilkan oleh unit usaha sektor pertanian, kehutanan dan perikanan terhadap PDRB ADHB.
Rumus Perhitungan	Rasio PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan = $\frac{PDRB\ Sektor\ Pertanian, Kehutanan\ dan\ perikanan}{PDRB\ ADHB} \times 100\%$
Interpretasi	Semakin besar nilai PDRB yang dihasilkan oleh sub Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, semakin tinggi proporsinya terhadap PDRB Suatu Daerah (Kabupaten).
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan

B. INDIKATOR KINERJA KUNCI

1. Peningkatan produksi tanaman pangan

Nama Indikator	Peningkatan produksi tanaman pangan
Definisi	Persentase kenaikan produksi komoditas tanaman pangan utama dari tahun sebelumnya
Rumus Perhitungan	Peningkatan Produksi tanaman pangan(%)=(Produksi tahun berjalan-Produksi tahun lalu)/ Produksi tahun lalu x 100%
Interpretasi	Semakin tinggi persentase menunjukkan peningkatan produktivitas pertanian pangan. Jika negatif atau rendah berarti terjadi penurunan produksi yang dapat berdampak pada ketahanan pangan
Sumber Data	Perangkat Daerah Urusan Pertanian
Frekuensi	Tahunan



2. Peningkatan produksi hortikultura

Nama Indikator	Peningkatan produksi hortikultura
Definisi	Persentase kenaikan produksi komoditas hortikultura (buah, sayuran, tanaman hias) dibandingkan tahun sebelumnya
Rumus Perhitungan	$\text{Peningkatan Produksi tanaman hortikultura(\%)} = \frac{\text{Produksi tahun berjalan} - \text{Produksi tahun lalu}}{\text{Produksi tahun lalu}} \times 100\%$
Interpretasi	Nilai tinggi menunjukkan keberhasilan dalam pengembangan hortikultura. Nilai rendah berarti masih ada kendala dalam produksi hortikultura
Sumber Data	Perangkat Daerah Urusan Pertanian
Frekuensi	Tahunan

3. Peningkatan produksi komoditas peternakan

Nama Indikator	Peningkatan produksi komoditas peternakan
Definisi	Persentase peningkatan jumlah hasil produksi peternakan (daging, telur, susu, dan lainnya) dari tahun sebelumnya
Rumus Perhitungan	$\text{Peningkatan produksi komoditas peternakan(\%)} = \frac{\text{Produksi tahun berjalan} - \text{Produksi tahun lalu}}{\text{Produksi tahun lalu}} \times 100\%$
Interpretasi	Semakin tinggi persentase menunjukkan peningkatan ketersediaan produk peternakan untuk konsumsi masyarakat. Rendah berarti produktivitas peternakan belum optimal
Sumber Data	Perangkat Daerah Urusan Pertanian
Frekuensi	Tahunan



4. Peningkatan produksi tanaman perkebunan

Nama Indikator	peningkatan produksi tanaman perkebunan
Definisi	Persentase peningkatan jumlah hasil produksi perkebunan dari tahun sebelumnya
Rumus Perhitungan	Peningkatan Produksi tanaman perkebunan (%)=(Produksi tahun berjalan-Produksi tahun lalu)/ Produksi tahun lalu x 100%
Interpretasi	Semakin tinggi persentase menunjukkan peningkatan ketersediaan produk peternakan untuk konsumsi masyarakat. Rendah berarti produktivitas peternakan belum optimal
Sumber Data	Perangkat Daerah Urusan Pertanian
Frekuensi	Tahunan

5. Cakupan luas lahan pertanian yang ditetapkan menjadi LP2B

Nama Indikator	cakupan luas lahan pertanian yang ditetapkan menjadi LP2B
Definisi	Persentase luas lahan pertanian yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dari total lahan pertanian
Rumus Perhitungan	Cakupan LP2B (%)=(luas lahan yg ditetapkan lp2b/ total luas lahan pertanian) x 100%
Interpretasi	Nilai tinggi menunjukkan komitmen dalam menjaga keberlanjutan lahan pertanian. Nilai rendah berarti ancaman alih fungsi lahan masih besar
Sumber Data	Perangkat Daerah Urusan Pertanian
Frekuensi	Tahunan



6. Persentase peningkatan penyediaan prasarana pertanian

Nama Indikator	Persentase peningkatan penyediaan prasarana pertanian
Definisi	Persentase peningkatan jumlah prasarana pertanian dari tahun sebelumnya
Rumus Perhitungan	$\text{Peningkatan penyediaan prasarana pertanian (\%)} = \frac{(\text{Prasarana pertanian tahun berjalan} - \text{prasarana pertanian tahun lalu})}{\text{prasaranapertanian tahun lalu}} \times 100\%$
Interpretasi	Semakin tinggi persentase menunjukkan peningkatan ketersediaan prasarana pertanian
Sumber Data	Perangkat Daerah Urusan Pertanian
Frekuensi	Tahunan

7. Tingkat pengendalian Penyakit hewan menular strategis (PHMS)

Nama Indikator	Tingkat pengendalian penyakit hewan menular strategis (PHMS)
Definisi	Persentase kasus penyakit hewan menular strategis yang berhasil dikendalikan dari total kasus yang ditemukan
Rumus Perhitungan	$\text{Tingkat pengendalian PHMS (\%)} = \frac{(\text{Jlh kasus PHMS yg berhasil dikendalikan})}{\text{PHMS yg ditemukan}} \times 100\%$
Interpretasi	Semakin tinggi persentase berarti upaya pengendalian PHMS efektif. Rendah berarti potensi penyebaran penyakit hewan masih tinggi
Sumber Data	Perangkat Daerah Urusan Pertanian
Frekuensi	Tahunan

8. Persentase usaha pangan asal hewan yang memiliki sertifikat pra NKV atau NKV (nomor kontrol veteriner)

Nama Indikator	Persentase usaha pangan asal hewan yang memiliki sertifikat pra NKV atau NKV (nomor kontrol veteriner)
----------------	---



Definisi	Persentase unit usaha pangan asal hewan yang telah memiliki sertifikat Nomor Kontrol Veteriner (NKV) dari total usaha yang ada
Rumus Perhitungan	% usaha bersertifikat NKV= (Jlh usaha pangan asal hewan yang memiliki NKV/ jlh seluruh usaha pangan asal hewan)x 100%
Interpretasi	Semakin tinggi persentase menunjukkan peningkatan standar keamanan pangan asal hewan. Rendah berarti masih banyak usaha belum memenuhi standar kesehatan veteriner
Sumber Data	Perangkat Daerah Urusan Pertanian
Frekuensi	Tahunan

9. Persentase penanganan bencana pertanian

Nama Indikator	Persentase penanganan bencana pertanian
Definisi	Persentase kasus bencana pertanian (banjir, kekeringan, serangan organisme pengganggu tanaman) yang berhasil ditangani
Rumus Perhitungan	% penanganan= (jlh kasus bencana pertanian yg tertangani/jlh kasus bencana pertanian) x 100%
Interpretasi	Nilai tinggi berarti respon cepat dan penanganan bencana pertanian sudah baik. Nilai rendah berarti banyak bencana yang tidak tertangani optimal
Sumber Data	Perangkat Daerah Urusan Pertanian
Frekuensi	Tahunan

10. Persentase penanganan dampak perubahan iklim terhadap pertanian

Nama Indikator	Persentase penanganan dampak perubahan iklim terhadap pertanian
Definisi	Persentase lokasi usaha tani terdampak perubahan iklim yang mendapatkan intervensi atau penanganan
Rumus	% penanganan=(jlh lokasi yg ditangani



Perhitungan	dampaknya/jlh usaha tani yg terdampak) x 100%
Interpretasi	Semakin tinggi persentase berarti adaptasi terhadap perubahan iklim berjalan baik. Rendah berarti ketahanan pertanian terhadap iklim masih lemah
Sumber Data	Perangkat Daerah Urusan Pertanian
Frekuensi	Tahunan

11. Persentase SDM penyuluhan pertanian yang ditingkatkan

Nama Indikator	Persentase SDM penyuluhan pertanian yang ditingkatkan
Definisi	Persentase tenaga penyuluh pertanian yang mengikuti peningkatan kapasitas (pelatihan, bimtek, sertifikasi) dari total penyuluh
Rumus Perhitungan	$\% \text{ SDM Penyuluh pertanian yg ditingkatkan} = (\text{jumlah penyuluh yg ditingkatkan} / \text{total jumlah penyuluh}) \times 100\%$
Interpretasi	Nilai tinggi menunjukkan peningkatan kualitas penyuluh pertanian. Nilai rendah berarti pengembangan SDM penyuluhan masih terbatas
Sumber Data	Perangkat Daerah Urusan Pertanian
Frekuensi	Tahunan



12. Persentase kelembagaan koperasi tani yang dibentuk dan beroperasi

Nama Indikator	Persentase kelembagaan koperasi tani yang dibentuk dan beroperasi
Definisi	Persentase koperasi tani yang berhasil dibentuk dan aktif beroperasi dibandingkan target kelembagaan yang direncanakan
Rumus Perhitungan	$\% \text{ kelembagaan koperasi tani} = (\text{jlh kelembagaan tani yg dibentuk dan beroperasi} / \text{jumlah target atau total kelembagaan tani}) \times 100\%$
Interpretasi	Nilai tinggi berarti semakin banyak koperasi tani berfungsi dalam mendukung usaha pertanian. Nilai Rendah berarti kelembagaan koperasi belum berkembang optimal
Sumber Data	Perangkat Daerah Urusan Pertanian
Frekuensi	Tahunan

--	--